



## **RENCANA KERJA**

# **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**HALAMAN VERIFIKASI**

**RENCANA KERJA BADAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

**TAHUN 2022**

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2022

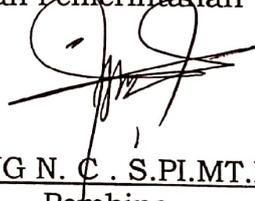
Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator

Pada Tanggal : 07 September 2021

Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia  
dan Pemerintahan

  
RINAWATI HERI PRASTUTI, SE MM  
Pembina  
NIP. 19730501 199603 2 004

Sub Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia  
dan Pemerintahan

  
NUNUNG N. C . S.PI.MT.M.Sc  
Pembina  
NIP. 19800916 200312 2 003

Mengetahui  
**KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

  
IR. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 1961121 198703 1 006

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas perkenannya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat disusun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan. Rancangan awal Rencana Kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan perangkat daerah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Program Indikatif Tahun Anggaran 2022. Adapun tujuan dari disusunnya Rancangan awal Renja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022;

Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 bisa menjadi sebuah Dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas - tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung.

Temanggung, September 2021

KERALA BPKPAD  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
  
TRI WINARNO / SE.MM  
Kabupaten Temanggung Tk. I  
NIP. 197310201999031005

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN DEPAN .....   | i   |
| HALAMAN VERIFIKASI .....  | ii  |
| KATA PENGANTAR .....  | iii |
| DAFTAR ISI .....  | iv  |
| DAFTAR TABEL .....  | v   |
| LAMPIRAN .....  |     |
| <br>  |     |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1   |
| 1.1. Latar Belakang .....   | 1   |
| 1.2. Landasan Hukum.....  | 8   |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....  | 10  |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....  | 11  |
| BAB II :EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,<br>PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2020.....  | 12  |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan,<br>Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra<br>Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah<br>Tahun 2019-2023 ..... | 12  |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan,<br>Pendapatan dan Aset Daerah.....   | 24  |
| 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan<br>Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah .....  | 80  |
| 2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD .....   | 80  |
| 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat .....  | 104 |
| 2.6. Inovasi Perangkat Daerah.....  | 104 |
| 2.7. Penghargaan .....  | 105 |
| BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....   | 107 |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....   | 107 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKPAD.....   | 107 |
| 3.3. Program dan Kegiatan.....  | 110 |
| BAB IV : PENUTUP.....   | 133 |

## DAFTAR TABEL

|             |  |     |
|-------------|--|-----|
| TABEL 2.1.  | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKPAD Tahun 2020 .....  | 13  |
| TABEL 2.2   | Capaian Kinerja Per Sasaran BPPKAD.....  | 24  |
| TABEL 2.3.  | Capaian Kinerja Pembangunan Daerah BPKPAD Kabupaten Temanggung.....  | 25  |
| TABEL 2.4.  | Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022.  | 82  |
| TABEL 2.5   | Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat.....   | 104 |
| TABEL 2.6   | Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2019-2021 .....  | 104 |
| TABEL.2.7   | Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021.....  | 106 |
| TABEL 3.1   | Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022..... | 108 |
| TABEL 3.2.  | Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan BPKPAD Kab. Temanggung Tahun 2022.....   | 111 |
| TABEL. 3.3  | Rencana Program dan Kegiatan BPKPAD Kab. Temanggung Tahun 2022.....  | 117 |
| TABEL. 4.1. | Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKPAD Tahun 2022.....   | 134 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

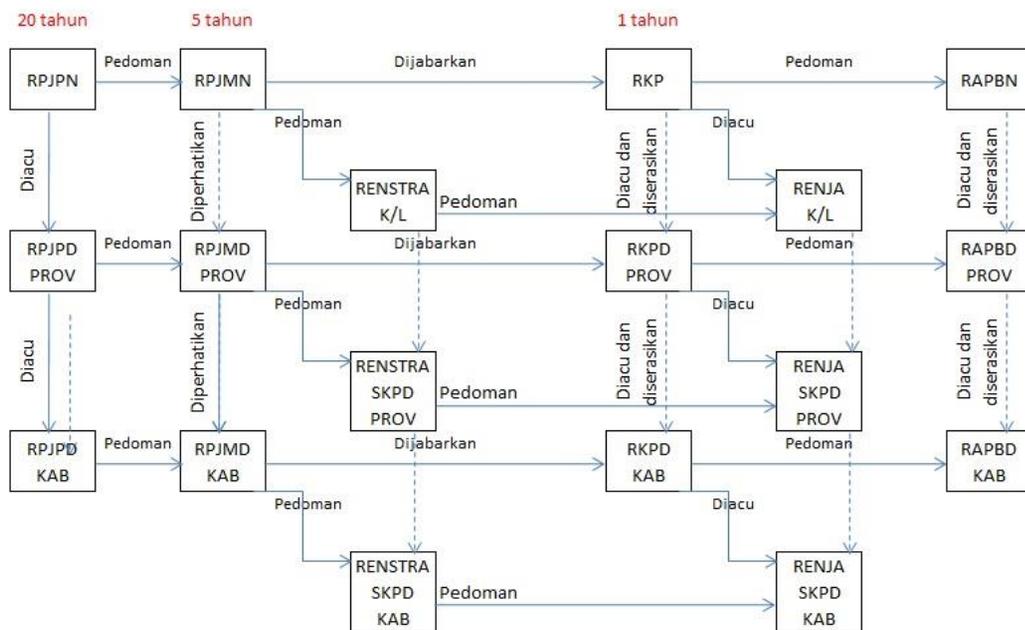
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen

perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1  
**Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

**a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang

diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang menyangkut aspek:

- 1) Kondisi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);
- 2) Organisasi dan Tatalaksana Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun sebelumnya;
- 4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
- 6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
- 9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2022;
- 10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- 11) Data Pokok Pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan
- 12) Informasi lain terkait pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

**b. Analisis gambaran pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk kondisi tahun 2019-2023;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun

2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;

- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

**c. *Mereview* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;**

*Review* hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

*Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

*Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;

- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah).

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 3) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

**e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja

program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

**g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Penyediaan anggaran untuk usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Namun dalam proses ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai peran yang sangat penting karena penyediaan anggaran untuk keberlangsungan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam pembangunan daerah.

**i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;**

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokras dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

**k. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

**l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

**m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAHTAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan,  
Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra  
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun  
2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2020 terhadap capaian renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BPKPAD / TAHUN 2020

| KODE  | BIDANG/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN                             | SATUAN      | TARGET AKHIR<br>RENSTRA (2023) |               | REALISASI<br>s/d 2019 |                  | TARGET 2020 |             |               | REALISASI 2020 |                | CAPAIAN 2020 |        | REALISASI s/d 2020 |               | CAPAIAN<br>s/d<br>2020<br>Rp | KET |
|---|--|--|-------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------|--------------------|---------------|------------------------------|-----|
|   |  |  |             | K                              | Rp            | K                     | Rp               | K           | Rp(Renja)   | Rp(DPA)       | K              | Rp             | K (%)        | Rp (%) | K                  | Rp            |                              |     |
|   |  |  |             | 5                              | 6             | 7                     | 8                | 9           | 10          | 11            | 12             | 13             | 14           | 15     | 16                 | 17            |                              |     |
| 40401   | Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah |  |             | 4.397.418.160                  |               | 983.111.378,00        |                  | 897.418.160 | 298.682.400 |               | 202.859.743,00 |                | 67,92        |        | 1.185.971.121      | 26,97         |                              |     |
|   |  | Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak                       | %           | 1,27                           |               | 1,05                  |                  | 0,73        |             |               | 1,05           |                | 100          |        | 1                  |               |                              |     |
|   |  | Persentase terverifikasi perubahan data yang tepat waktu             | %           | 100                            |               | 100                   |                  | 100         |             |               | 100            |                | 100          |        | 100                |               |                              |     |
| 404.01.001  | Pendataan massal SISMIOB obyek / subyek PBB-P2                 | Peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2                           | OP          | 1E+06                          | 2.445.034.972 | 6.591                 | 642.029.000,00   | 3000        | 513.143.000 | 51.955.000    | 6393           | 22.506.000     | 100          | 43,32  | 12,984             | 664.535.000   | 27,18                        |     |
|   |  | Peta digitasi objek pajak (blok)                                     | unit        | 4                              |               | 1                     |                  | 1           |             |               | 1              | 0              | 100          |        | 2                  | 0             |                              |     |
| 404.01.002  | Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah        | Terverifikasinya perubahan data PBB-P2                               | SPPT        | 49000                          | 1.952.383.188 | 17.184                | 341.082.378,00   | 10000       | 384.275.160 | 246.727.400   | 7184           | 180.353.743    | 71,84        | 73,10  | 24,368             | 521.436.121   | 26,71                        |     |
|   |  | Terlaksananya pendataan wajib/obyek pajak daerah                     | jenis pajak | 69                             |               | 75                    | 0                | 9           |             |               | 6              | 0              | 66,67        |        | 81                 | 0             |                              |     |
|   |  | Terlaksananya pendataan/penilaian individual subyek/obyek khusus PBB | OP          | 33                             |               | 34                    | 0                | 5           |             |               | 1              | 0              | 20           |        | 35                 | 0             |                              |     |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40401 |  |  |             |                                |               |                       |                  |             |             |               |                | 71,70          |              |        |                    |               |                              |     |
| Predikat  |  |  |             |                                |               |                       |                  |             |             |               |                | Sedang         |              |        |                    |               |                              |     |
| 40402   | Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah       |  |             | 51,45                          | 2.135.000.000 |                       | 1.420.741.292,00 |             | 550.000.000 | 1.040.801.216 |                | 952.021.682,00 |              | 91,47  |                    | 2.372.762.974 | 111,14                       |     |
|   |  | Prosentase pemutakhiran obyek pajak                                  | %           | 2,9                            |               | 0,66                  |                  | 2,9         |             |               | 0,66           |                | 22,76        |        | 1                  |               |                              |     |
|   |  | Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu       | %           | 100                            |               | 100                   |                  | 100         |             |               | 100            |                | 100          |        | 100                |               |                              |     |

| KODE   | BIDANG/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN   | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN                                  | SATUAN       | TARGET AKHIR<br>RENSTRA (2023) |                    | REALISASI<br>s/d 2019 |                       | TARGET 2020 |                    |                   | REALISASI 2020 |                      | CAPAIAN 2020         |              | REALISASI s/d 2020 |                    | CAP<br>AIA<br>N<br>s/d<br>202<br>0<br>Rp | KET |    |    |
|--|---|---|--------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--|-----|----|----|
|  |   |   |              | K                              | Rp                 | K                     | Rp                    | K           | Rp(Renja)          | Rp(DPA)           | K              | Rp                   | K (%)                | Rp (%)       | K                  | Rp                 |  |     |    |    |
|  |   |   |              | 5                              | 6                  | 7                     | 8                     | 9           | 10                 | 11                | 12             | 13                   | 14                   | 15           | 16                 | 17                 |  |     | 18 | 19 |
| 404.02.00<br>1   | Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah | Termutakhirnya data obyek dan subyek pajak daerah                         | OP           | 49000                          | 575.000.000        | 13485                 | 301.752.750,00        | 3000        | 150.000.000        | 164.024.400       | 3985           | 156.710.250          | 100,00               | 95,54        | 17.470             | 458.463.000        | 79,73                                    |     |    |    |
|  |   | Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIM-PBB) | SIM PBB      | 4                              |                    | 1                     | 0                     | 1           |                    |                   | 1              | 0                    | 100,00               |              | 2                  | 0                  |  |     |    |    |
| 404.02.00<br>2   | Percetakan SPPT PBB-P2  | Tercetaknya SPPT PBB-P2 dan tersedianya Blangko SPPT untuk cetak massal   | SPPT         | 3E+06                          | 880.000.000        | 1.803.500             | 463.049.418,00        | 1250000     | 200.000.000        | 328.751.016       | #####          | 301.262.815          | 100,00               | 91,64        | #####              | 764.312.233        | 86,85                                    |     |    |    |
| 404.02.00<br>3   | Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah   | Terciptanya tertib administrasi pengelolaan Pajak Daerah                  | Pajak Daerah | 35                             | 680.000.000        | 16                    | 655.939.124,00        | 7           | 200.000.000        | 548.025.800       | 7              | 494.048.617          | 100                  | 90,15        | 23                 | 1.149.987.741      | 169,12                                   |     |    |    |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40402</b> |   |   |              |                                |                    |                       |                       |             |                    |                   |                |                      | <b>100,00</b>        |              |                    |                    |  |     |    |    |
| <b>Predikat</b>  |   |   |              |                                |                    |                       |                       |             |                    |                   |                |                      | <b>Sangat Tinggi</b> |              |                    |                    |  |     |    |    |
| <b>40403</b>   | <b>Program peningkatan pendapatan daerah</b>                                      |   |              | <b>95</b>                      | <b>486.000.000</b> |                       | <b>128.444.369,00</b> | <b>92,5</b> | <b>106.000.000</b> | <b>54.631.900</b> |                | <b>52.260.813,00</b> |                      | <b>95,66</b> |                    | <b>100.998.691</b> | <b>20,78</b>                             |     |    |    |
|  |   | <b>Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah</b>                  | %            | <b>95</b>                      |                    | <b>100</b>            |                       | <b>90</b>   |                    |                   | <b>100</b>     |                      | <b>111,11</b>        |              | <b>100</b>         |                    |  |     |    |    |
|  |   | <b>Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu</b>                 | %            | <b>95</b>                      |                    | <b>100</b>            |                       | <b>95</b>   |                    |                   | <b>100</b>     |                      | <b>100</b>           |              | <b>100</b>         |                    |  |     |    |    |
| 404.03.00<br>3   | Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah                                    | Terlaksananya kegiatan monitoring & evaluasi PAD                          | Bulan        | 60                             | 300.000.000        | 24                    | 87.155.969,00         | 12          | 65.000.000         | 41.027.500        | 12             | 38.766.413           | 100,00               | 94,49        | 36                 | 125.922.382        | 41,97                                    |     |    |    |
| 404.03.00<br>4   | Penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah                   | Terlaksananya penagihan pajak daerah                                      | Bulan        | 60                             | 186.000.000        | 24                    | 41.288.400,00         | 12          | 41.000.000         | 13.604.400        | 12             | 13.494.400           | 100,00               | 99,19        | 36                 | 54.782.800         | 29,45                                    |     |    |    |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40403</b> |   |   |              |                                |                    |                       |                       |             |                    |                   |                |                      | <b>100,00</b>        |              |                    |                    |  |     |    |    |
| <b>Predikat</b>  |   |   |              |                                |                    |                       |                       |             |                    |                   |                |                      | <b>sangat tinggi</b> |              |                    |                    |  |     |    |    |

| KODE       | BIDANG/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN  | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN   | SATUAN    | TARGET AKHIR<br>RENSTRA (2023) |               | REALISASI<br>s/d 2019 |               | TARGET 2020 |               |               | REALISASI 2020 |                | CAPAIAN 2020 |        | REALISASI s/d 2020 |               | CAP<br>AIA<br>N<br>s/d<br>202<br>0<br>Rp | KET |
|------------|--|--|-----------|--------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------|--------------------|---------------|--|-----|
|            |  |  |           | K                              | Rp            | K                     | Rp            | K           | Rp(Renja)     | Rp(DPA)       | K              | Rp             | K (%)        | Rp (%) | K                  | Rp            |  |     |
|            |  |  |           | 5                              | 6             | 7                     | 8             | 9           | 10            | 11            | 12             | 13             | 14           | 15     | 16                 | 17            |  |     |
| 1          | 2  | 3  | 4         | 5                              | 6             | 7                     | 8             | 9           | 10            | 11            | 12             | 13             | 14           | 15     | 16                 | 17            | 18                                       | 19  |
| 40404      | Program pengelolaan keuangan daerah  |  |           | 97,49                          | 8.917.917.000 |                       | 997.283.406   | 96,84       | 1.728.297.000 | 1.337.237.700 |                | 984.793.315,00 |              | 73,64  |                    | 0             | 0,00                                     |     |
|            |  | Realisasi belanja terhadap APBD  | %         | 89,96                          |               | 90,05                 |               | 89,35       |               |               | 90,05          |                | 100          |        | 90                 |               |  |     |
|            |  | Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan   | %         | 100                            |               | 99,93                 |               | 100         |               |               | 99,93          |                | 99,93        |        | 100                |               |  |     |
|            |  | Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu  | %         | 100                            |               | 85,71                 |               | 100         |               |               | 85,71          |                | 85,71        |        | 86                 |               |  |     |
|            |  | Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu  | %         | 100                            |               | 100                   |               | 98          |               |               | 100            |                | 100          |        | 100                |               |  |     |
| 404.04.001 | Penyusunan KUA dan PPAS  | Terlaksananya penyusunan KUA, PPAS, KUPA & PPAS perubahan APBD   | Dokumen   | 48                             | 846.150.000   | 48                    | 236.485.750   | 4           | 150.000.000   | 150.000.000   | 4              | 135.845.250    | 100          | 90,56  | 52                 | 372.331.000   | 44,00                                    |     |
| 404.04.002 | Penyusunan sistem informasi keuangan daerah                                  | Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD)   | Aplikasi  | 48                             | 520.000.000   |                       | 16.500.000    | 4           | 100.000.000   | 100.000.000   | 0              | 16.500.000     | 0            | 17     | -                  | 33.000.000    | 6  |     |
| 404.04.003 | Pengelolaan Gaji   | Tersedianya daftar gaji bg PNS se kabupaten Temanggung   | orang/ASN | 37400                          | 1.128.200.000 | 67.924                | 210.762.838   | 7500        | 200.000.000   | 145.650.300   | 7500           | 97.977.488     | 100          | 67,27  | 75.424             | 308.740.326   | 27,37                                    |     |
| 404.04.004 | Penelitian RKA & pengesahan DPA  | Terlaksananya penelitian RKA, RKPA, & terlaksananya Verifikasi DPA, DPPA                                       | Dokumen   | 40900                          | 564.100.000   | 11050                 | 78.415.800    | 9600        | 100.000.000   | 46.699.800    | 9600           | 41.128.300     | 100,00       | 88,07  | 20.650             | 119.544.100   | 21,19                                    |     |
| 404.04.005 | Penyusunan APBD Kab.Temanggung   | Terlaksananya penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung dan Perbup tentang Penjabaran APBD | Dokumen   | 30                             | 3.764.000.000 | 24                    | 1.279.656.047 | 6           | 820.000.000   | 681.212.600   | 6              | 624.843.884    | 100          | 91,73  | 30                 | 1.904.499.931 | 50,60                                    |     |
| 404.04.006 | Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak) | Terlaksananya penyediaan Jamsostek Non PNS(bagi  | orang/ASN | 175                            | 495.987.000   | 130                   | 132.513.436   | 40          | 78.297.000    | 78.290.000    | 40             | 68.498.393     | 100          | 87,49  | 170                | 201.011.829   | 40,53                                    |     |

| KODE   | BIDANG/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN                | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN  | SATUAN     | TARGET AKHIR<br>RENSTRA (2023) |                      | REALISASI<br>s/d 2019 |                    | TARGET 2020  |                    |                    | REALISASI 2020 |                       | CAPAIAN 2020  |              | REALISASI s/d 2020 |                    | CAP<br>AIA<br>N<br>s/d<br>202<br>0<br>Rp | KET |
|--|--|---|------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|--|-----|
|  |  |   |            | K                              | Rp                   | K                     | Rp                 | K            | Rp(Renja)          | Rp(DPA)            | K              | Rp                    | K (%)         | Rp (%)       | K                  | Rp                 |  |     |
|  |  |   |            | 5                              | 6                    | 7                     | 8                  | 9            | 10                 | 11                 | 12             | 13                    | 14            | 15           | 16                 | 17                 |  |     |
|  |  | PTT&Tenaga kontrak)   |            |                                |                      |                       |                    |              |                    |                    |                |                       |               |              |                    |                    |  |     |
| 404.04.009   | Penyusunan Analisis Standar Belanja (Lanjutan) | Tersusunnya analisis standar belanja untuk lanjutan                                   | Dokumen    | 125                            | 1.128.200.000        |                       |                    | 25           | 200.000.000        | 135.385.000        | 0              | 0                     | 0             | 0            | -                  | 0                  | 0  |     |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40404</b> |  |   |            |                                |                      |                       |                    |              |                    |                    |                |                       | <b>71,43</b>  |              |                    |                    |  |     |
| <b>Predikat</b>  |  |   |            |                                |                      |                       |                    |              |                    |                    |                |                       | <b>sedang</b> |              |                    |                    |  |     |
| <b>40405</b>   | <b>Program pengelolaan aset</b>                |   |            | <b>93,6</b>                    | <b>2.537.925.000</b> |                       | <b>570.101.653</b> | <b>90,62</b> | <b>485.000.000</b> | <b>538.847.500</b> |                | <b>257.659.930,00</b> |               | <b>47,82</b> |                    | <b>827.761.583</b> | <b>32,62</b>                             |     |
|  |  | <b>Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja</b> | %          | <b>88.1</b>                    |                      | <b>66,47</b>          |                    | <b>82,74</b> |                    |                    | <b>66,47</b>   |                       | <b>80,34</b>  |              | <b>66</b>          |                    |  |     |
|  |  | <b>Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja</b>                                    | %          | <b>99.1</b>                    |                      | <b>99,39</b>          |                    | <b>98,49</b> |                    |                    | <b>99,39</b>   |                       | <b>100</b>    |              | <b>99</b>          |                    |  |     |
| 404.05.001   | Persertifikatan tanah                          | Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat  | Bidang     | 220                            | 530.912.500          | 85                    | 106.126.573        | 45           | 95.000.000         | 218.927.500        | 45             | 76.685.900            | 100           | 35,03        | 130                | 182.812.473        | 34,43                                    |     |
| 404.05.002   | Pengelolaan barang milik daerah                | Tertibnya pengelolaan barang milik daerah,  | Unit kerja | 840                            | 849.250.000          | 210                   | 298.845.858        | 168          | 165.000.000        | 192.652.200        | 120            | 156.830.809           | 71,43         | 81,41        | 330                | 455.676.667        | 53,66                                    |     |
|  |  | Pemeliharaan & pengembangan Aplikasi SIMBADA  | Aplikasi   | 5                              |                      | 1                     | 0                  | 1            |                    |                    | 1              | 0                     | 100           |              | 2                  | 0                  |  |     |
| 404.05.003   | Pembinaan pejabat pengurus barang              | Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah   | Unit kerja | 840                            |                      | 168                   |                    | 0            | 0                  | 0                  | 0              | 0                     |               |              | 168                | 0                  |  |     |
|  |  | Terlaksananya pembinaan pejabat /pembantu pejabat pengurus barang                     | unit kerja | 840                            |                      | 168                   |                    | 168          |                    |                    | 168            | 0                     | 100           |              | 336                | 0                  |  |     |
|  |  | Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu                                 | unit kerja | 840                            |                      | 168                   |                    | 168          |                    |                    | 168            | 0                     | 100           |              | 336                | 0                  |  |     |
| 404.05.004   | Penatausahaan barang milik daerah              | Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah serta           | unit kerja | 840                            | 265.412.500          | 217                   | 46.952.000         | 168          | 50.000.000         | 16.493.000         | 168            | 3.037.500             | 100           | 18,42        | 385                | 49.989.500         | 18,83                                    |     |

| KODE   | BIDANG/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN  | SATUAN         | TARGET AKHIR<br>RENSTRA (2023) |                       | REALISASI<br>s/d 2019 |                      | TARGET 2020 |                      |                      | REALISASI 2020 |                         | CAPAIAN 2020         |              | REALISASI s/d 2020 |                      | CAP<br>AIA<br>N<br>s/d<br>202<br>0<br>Rp | KET |    |    |
|--|---|---|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|--|-----|----|----|
|  |   |   |                | K                              | Rp                    | K                     | Rp                   | K           | Rp(Renja)            | Rp(DPA)              | K              | Rp                      | K (%)                | Rp (%)       | K                  | Rp                   |  |     |    |    |
|  |   |   |                | 5                              | 6                     | 7                     | 8                    | 9           | 10                   | 11                   | 12             | 13                      | 14                   | 15           | 16                 | 17                   |  |     | 18 | 19 |
|  |   | pengamanan barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah  |                |                                |                       |                       |                      |             |                      |                      |                |                         |                      |              |                    |                      |  |     |    |    |
| 404.05.005   | Pemberdayaan barang milik daerah                                    | Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok | tanah/bangunan | 17205                          | 892.350.000           | 3000                  | 118.177.222          | 3441        | 175.000.000          | 110.774.800          | 2950           | 21.105.721              | 85,73                | 19,05        | 5.950              | 139.282.943          | 15,61                                    |     |    |    |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40405</b> |   |   |                |                                |                       |                       |                      |             |                      |                      |                |                         | <b>93,88</b>         |              |                    |                      |  |     |    |    |
| <b>Predikat</b>  |   |   |                |                                |                       |                       |                      |             |                      |                      |                |                         | <b>Sangat tinggi</b> |              |                    |                      |  |     |    |    |
| <b>40406</b>   | <b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah</b> |   |                | <b>98</b>                      | <b>12.795.280.000</b> |                       | <b>3.917.982.737</b> | <b>95</b>   | <b>2.238.000.000</b> | <b>1.764.293.500</b> |                | <b>1.620.767.660,00</b> |                      | <b>91,86</b> |                    | <b>5.538.750.397</b> | <b>43,29</b>                             |     |    |    |
|  |   | <b>Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntable</b>  | %              | <b>98</b>                      |                       | <b>82,98</b>          |                      | <b>95</b>   |                      |                      | <b>82,98</b>   |                         | <b>87,35</b>         |              | <b>83</b>          |                      |  |     |    |    |
|  |   | <b>Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</b>  | %              | <b>98</b>                      |                       | <b>82,98</b>          |                      | <b>95</b>   |                      |                      | <b>82,98</b>   |                         | <b>87,35</b>         |              | <b>83</b>          |                      |  |     |    |    |
| 404.06.001   | Pengelolaan Keuangan Daerah   | Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan daerah   | Unit kerja     | 840                            | 12.264.000.000        | 256                   | 3.835.207.700        | 168         | 2.078.000.000        | 1.682.743.000        | 167            | 1.578.470.700           | 99,40                | 93,80        | 423                | 5.413.678.400        | 44,14                                    |     |    |    |
| 404.06.002   | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                           | Tersedianya laporan keuangan daerah   | Dokumen        | 5                              | 531.280.000           | 2                     | 82.775.037           | 1           | 160.000.000          | 81.550.500           | 1              | 42.296.960              | 100                  | 51,87        | 3                  | 125.071.997          | 23,54                                    |     |    |    |
|  |   | Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan   | Unit kerja     | 525                            |                       | 132                   |                      | 105         |                      |                      | 105            | 0                       | 100                  |              | 237                | 0                    |  |     |    |    |
| 404.06.007   | Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur                                |   |                |                                | 0                     |                       |                      |             | 0                    | 0                    | 0              | 0                       |                      |              | -                  | 0                    |  |     |    |    |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>                             |   |   |                |                                |                       |                       |                      |             |                      |                      |                |                         | <b>99,80</b>         |              |                    |                      |  |     |    |    |

| KODE   | BIDANG/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN                                      | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN  | SATUAN   | TARGET AKHIR<br>RENSTRA (2023) |                      | REALISASI<br>s/d 2019 |                      | TARGET 2020 |                    |                    | REALISASI 2020 |                       | CAPAIAN 2020         |              | REALISASI s/d 2020 |                      | CAP<br>AIA<br>N<br>s/d<br>202<br>0<br>Rp | KET |
|--|--|---|----------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|--|-----|
|  |  |   |          | K                              | Rp                   | K                     | Rp                   | K           | Rp(Renja)          | Rp(DPA)            | K              | Rp                    | K (%)                | Rp (%)       | K                  | Rp                   |  |     |
|  |  |   |          | 5                              | 6                    | 7                     | 8                    | 9           | 10                 | 11                 | 12             | 13                    | 14                   | 15           | 16                 | 17                   |  |     |
| <b>Kegiatan pada Program 40406</b>                           |  |   |          |                                |                      |                       |                      |             |                    |                    |                |                       | sangat tinggi        |              |                    |                      |  |     |
| <b>Predikat</b>  |  |   |          |                                |                      |                       |                      |             |                    |                    |                |                       |                      |              |                    |                      |  |     |
| <b>40701</b>   | <b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelibngan perangkat daerah</b> |   |          | <b>100</b>                     | <b>29.500.000</b>    |                       | <b>6.973.200</b>     | <b>100</b>  | <b>3.500.000</b>   | <b>3.225.000</b>   |                | <b>2.839.000,00</b>   |                      | <b>88,03</b> |                    | <b>9.812.200</b>     | <b>33,26</b>                             |     |
|  |  | <b>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah.</b> | <b>%</b> | <b>100</b>                     |                      | <b>81,82</b>          |                      | <b>100</b>  |                    |                    | <b>81,82</b>   |                       | <b>81,82</b>         |              | <b>81,82</b>       |                      |  |     |
| 407.01.066   | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan                 | Tersusunnya dokumen perencanaan & pelaporan   | dokumen  | 167                            | 29.500.000           | 67                    | 6.973.200            | 33          | 3.500.000          | 3.225.000          | 33             | 2.839.000             | 100,00               | 88,03        | 100                | 9.812.200            | 33,26                                    |     |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40701</b> |  |   |          |                                |                      |                       |                      |             |                    |                    |                |                       | <b>100,00</b>        |              |                    |                      |  |     |
| <b>Predikat</b>  |  |   |          |                                |                      |                       |                      |             |                    |                    |                |                       | <b>Sangat Tinggi</b> |              |                    |                      |  |     |
| <b>40702</b>   | <b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>                    | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>  | <b>%</b> | <b>100</b>                     | <b>4.553.568.000</b> | <b>100</b>            | <b>1.362.348.200</b> | <b>100</b>  | <b>874.000.000</b> | <b>830.040.204</b> | <b>100</b>     | <b>723.759.916,00</b> | <b>100</b>           | <b>87,20</b> | <b>100</b>         | <b>2.086.108.116</b> | <b>45,81</b>                             |     |
| 407.02.002   | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik              | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik  | Bulan    | 60                             | 1.180.000.000        | 24                    | 372.895.457          | 12          | 220.000.000        | 209.671.152        | 12             | 194.296.639           | 100,00               | 92,67        | 36                 | 567.192.096          | 48,07                                    |     |
| 407.02.008   | Penyediaan jasa kebersihan kantor                                    | Tersedianya jasa kebersihan kantor dan Honor Non PNS  | Bulan    | 60                             | 900.000.000          | 24                    | 209.385.693          | 12          | 175.000.000        | 195.000.000        | 12             | 192.095.851           | 100,00               | 98,51        | 36                 | 401.481.544          | 44,61                                    |     |
| 407.02.010   | Penyediaan alat tulis kantor   | Tersedianya alat tulis kantor   | Bulan    | 60                             | 179.230.000          | 24                    | 39.682.500           | 12          | 30.000.000         | 27.502.500         | 12             | 20.948.500            | 100,00               | 76,17        | 36                 | 60.631.000           | 33,83                                    |     |
| 407.02.011   | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                            | Tersedianya barang cetakan dan fotocopy   | Bulan    | 60                             | 86.410.000           | 24                    | 74.916.750           | 12          | 20.000.000         | 39.999.800         | 12             | 34.958.250            | 100,00               | 87,40        | 36                 | 109.875.000          | 127,16                                   |     |
| 407.02.012   | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor     | Tersedianya komponen listrik bangunan kantor  | Bulan    | 60                             | 99.615.000           | 24                    | 28.035.900           | 12          | 15.000.000         | 13.000.000         | 12             | 11.892.000            | 100,00               | 91,48        | 36                 | 39.927.900           | 40,08                                    |     |

| KODE   | BIDANG/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN   | SATUAN   | TARGET AKHIR<br>RENSTRA (2023) |                      | REALISASI<br>s/d 2019 |                      | TARGET 2020 |                    |                    | REALISASI 2020 |                       | CAPAIAN 2020 |              | REALISASI s/d 2020 |                      | CAP<br>AIA<br>N<br>s/d<br>202<br>0<br>Rp | KET |
|--|--|--|----------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|--|-----|
|  |  |  |          | K                              | Rp                   | K                     | Rp                   | K           | Rp(Renja)          | Rp(DPA)            | K              | Rp                    | K (%)        | Rp (%)       | K                  | Rp                   |  |     |
|  |  |  |          | 5                              | 6                    | 7                     | 8                    | 9           | 10                 | 11                 | 12             | 13                    | 14           | 15           | 16                 | 17                   |  |     |
| 407.02.015   | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan       | Bulan    | 60                             | 16.623.000           | 24                    | 4.272.000            | 12          | 3.000.000          | 2.520.000          | 12             | 2.136.000             | 100,00       | 84,76        | 36                 | 6.408.000            | 38,55                                    |     |
| 407.02.017   | Penyediaan makanan dan minuman                           | Tesedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai  | Bulan    | 60                             | 474.485.000          | 24                    | 108.116.950          | 12          | 80.000.000         | 64.460.752         | 12             | 48.519.950            | 100,00       | 75,27        | 36                 | 156.636.900          | 33,01                                    |     |
| 407.02.018   | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah      | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah   | Bulan    | 60                             | 470.000.000          | 24                    | 127.616.933          | 12          | 100.000.000        | 79.975.000         | 12             | 33.843.151            | 100,00       | 42,32        | 36                 | 161.460.084          | 34,35                                    |     |
| 407.02.019   | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah       | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah  | Bulan    | 60                             | 33.205.000           | 24                    | 7.040.000            | 12          | 5.000.000          | 1.500.000          | 12             | 1.495.000             | 100,00       | 99,67        | 36                 | 8.535.000            | 25,70                                    |     |
| 407.02.020   | Penyediaan jasa pelayanan perkantoran                    | Tersedianya honor tenaga outsourcing, dan uang lembur PNS dan Non PNS                                    | Bulan    | 60                             | 610.000.000          | 24                    | 267.807.000          | 12          | 100.000.000        | 62.971.000         | 12             | 60.995.558            | 100,00       | 96,86        | 36                 | 328.802.558          | 53,90                                    |     |
| 407.02.021   | Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor                 | tersedianya honor satpam   | orang    | 24                             | 504.000.000          | 24                    | 122.579.017          | 12          | 126.000.000        | 133.440.000        | 12             | 122.579.017           | 100,00       | 91,86        | 36                 | 245.158.034          | 48,64                                    |     |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40702</b> |  |  |          |                                |                      |                       |                      |             |                    |                    |                | <b>100,00</b>         |              |              |                    |                      |  |     |
| <b>Predikat</b>  |  |  |          |                                |                      |                       |                      |             |                    |                    |                | <b>Sangat Tinggi</b>  |              |              |                    |                      |  |     |
| <b>40703</b>   | <b>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</b>     |  |          | <b>100</b>                     | <b>2.405.125.000</b> |                       | <b>1.008.842.639</b> | <b>100</b>  | <b>791.000.000</b> | <b>684.112.830</b> |                | <b>580.535.786,00</b> |              | <b>84,86</b> |                    | <b>1.589.378.425</b> | <b>66,08</b>                             |     |
|  |  | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur</b>  | <b>%</b> | <b>100</b>                     |                      | <b>100</b>            |                      | <b>100</b>  |                    |                    | <b>100</b>     |                       | <b>100</b>   |              | <b>100</b>         |                      |  |     |
| 407.03.007   | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                     | Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian blj modal meja rapat, rak arsip, kanopi & mesin rumput | Bulan    | 60                             | 600.000.000          | 24                    | 202.953.499          | 12          | 250.000.000        | 90.396.430         | 12             | 88.298.999            | 100,00       | 97,68        | 36                 | 291.252.498          | 48,54                                    |     |

| KODE   | BIDANG/<br>PROGRAM/<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM/KEGIATAN   | SATUAN     | TARGET AKHIR<br>RENSTRA (2023) |                   | REALISASI<br>s/d 2019 |                   | TARGET 2020 |                   |                   | REALISASI 2020 |                      | CAPAIAN 2020 |          | REALISASI s/d 2020 |             | CAP<br>AIA<br>N<br>s/d<br>202<br>0<br>Rp | KET |    |
|--|--|--|------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------|----------|--------------------|-------------|--|-----|----|
|  |  |  |            | K                              | Rp                | K                     | Rp                | K           | Rp(Renja)         | Rp(DPA)           | K              | Rp                   | K (%)        | Rp (%)   | K                  | Rp          |  |     |    |
|  |  |  |            | 5                              | 6                 | 7                     | 8                 | 9           | 10                | 11                | 12             | 13                   | 14           | 15       | 16                 | 17          |  |     | 18 |
| 407.03.009   | Pengadaan peralatan gedung kantor                      | Tersedianya peralatan gedung kantor (blj modal komputer & printer Bidang III) honor pengadaan, acces point dan mikrotik dan komputer (sekretariat)laptop (sekretariat), Pembelian Komputer dan Laptop (Bidang AKLAP) | Bulan      | 60                             | 376.000.000       | 24                    | 228.183.450       | 12          | 146.000.000       | 175.010.000       | 12             | 172.830.000          | 100,00       | 98,75    | 36                 | 401.013.450 | 106,65                                   |     |    |
| 407.03.022   | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor               | Terpeliharanya gedung kantor   | Bulan      | 60                             | 256.025.000       | 24                    | 144.729.000       | 12          | 140.000.000       | 154.676.400       | 12             | 86.283.000           | 100,00       | 55,78    | 36                 | 231.012.000 | 90,23                                    |     |    |
| 407.03.024   | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK   | Bulan      | 60                             | 604.000.000       | 24                    | 263.343.940       | 12          | 150.000.000       | 163.620.000       | 12             | 136.782.787          | 100,00       | 83,60    | 36                 | 400.126.727 | 66,25                                    |     |    |
| 407.03.026   | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor  | Terpeliharanya service lift dan genset   | Bulan      | 60                             | 282.050.000       | 24                    | 66.147.000        | 12          | 50.000.000        | 27.410.000        | 12             | 23.475.500           | 100,00       | 85,65    | 36                 | 89.622.500  | 31,78                                    |     |    |
| 407.03.028   | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor     | Terpeliharanya service dan penggantian suku cadang komputer dan AC(pemeliharaan printrinix 15.000.000 Bidang II)   | Bulan      | 60                             | 287.050.000       | 24                    | 103.485.750       | 12          | 55.000.000        | 73.000.000        | 12             | 72.865.500           | 100,00       | 99,82    | 36                 | 176.351.250 | 61,44                                    |     |    |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40703</b> |  |  |            |                                |                   |                       |                   |             |                   |                   |                | <b>100,00</b>        |              |          |                    |             |  |     |    |
| <b>Predikat</b>  |  |  |            |                                |                   |                       |                   |             |                   |                   |                | <b>sangat tinggi</b> |              |          |                    |             |  |     |    |
| <b>40704</b>   | <b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>           | <b>Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya</b>  | <b>%</b>   | <b>100</b>                     | <b>26.250.000</b> |                       | <b>12.500.000</b> | <b>100</b>  | <b>12.500.000</b> | <b>12.500.000</b> | <b>100</b>     |                      | <b>100</b>   | <b>0</b> | <b>100</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                                 |     |    |
| 407.04.001   | Pengadaan pakaian dinas beserta                        | tersedianya pakiamn dinas  | 50 pegawai | 3E+07                          | 26.250.000        | 50                    | 12.500.000        | 50          | 12.500.000        | 12.500.000        | 50             | 12.500.000           | 100          | 100      | 100                | 25.000.000  | 95                                       |     |    |



Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
  - a. Pendataan massal SISMIOP obyek /subyek PBB-
  - b. Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah
  - c. Percetakan SPPT PBB-P2
  - d. Pengelolaaan Administrasi Pajak Daerah
  - e. Percetakan SPPT PBB-P2
  - f. Pengelolaaan Administrasi Pajak Daerah
  - g. Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah
  - h. Penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah
  - i. Penyusunan KUA dan PPAS
  - j. Pengelolaan Gaji
  - k. Penelitian RKA & pengesahan DPA
  - l. Penyusunan APBD Kab.Temanggung
  - m. Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak)
  - n. Persertifikatan tanah
  - o. Penatausahaan barang milik daerah
  - p. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  - q. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
2. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:

- a. Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah 71,84 % target 10.000 terealisasi 7.184 karena pandemic covid
- b. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah. Karena sudah berganti menggunakan SIPD dari Kemendagri.
- c. Penyusunan Analisis Standar Belanja (Lanjutan) tidak dilaksanakan karena refocusing anggaran covid
- d. Pengelolaan barang milik daerah tidak tercapai karena refocusing anggaran covid
- e. Pembinaan pejabat pengurus barang tidak dilaksanakan karena refocusing anggaran covid
- f. Pemberdayaan barang milik daerah target 3441 terealisasi 2950 karena refocusing anggaran covid
- g. Pengelolaan Keuangan Daerah 99,4 target 168 terealisasi 167 karena laporan akhir dilaporkan pada tahun depannya
- h. Fasilitasi Bantuan Keuangan tidak dilaksanakan

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **93,95%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel. 2.2  
Capaian Kinerja Per sasaran BPKPAD

| No | Sasaran   | Jumlah Indikator | Rata-Rata Capaian | Keterangan (Kategori) |
|----|---|------------------|-------------------|-----------------------|
|    | Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan            | 1                | na                | Sangat Baik           |
|    | Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah | 2                | 91,76             | Sangat Baik           |
|    | Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah        | 2                | 61,32             | cukup                 |
| 4. | Peningkatan pendapatan daerah                           | 2                | 98,70             | Sangat Baik           |
| 5  | Pengelolaan keuangan daerah                             | 4                | 95,55             | Sangat Baik           |
| 6  | Pengelolaan aset  | 2                | 87,72             | Sangat Baik           |
| 7  | Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah    | 2                | 84,67             | Baik                  |
|    | Rata rata   |                  | 93,95             | Sangat Baik           |

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**

### **2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)**

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3  
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah  
Kabupaten Temanggung

| NO | INDIKATOR KINERJA  | sat | TARGET |       |       |       |       | REALISASI KINERJA |        |      |      |      | CAPAIAN<br>2020 (%) | STATUS |
|----|--|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|------|------|------|---------------------|--------|
|    |  |     | 2019   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2019              | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 |                     |        |
| 1  | 3  | 4   | 6      | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                | 12     | 13   | 14   | 15   | 16                  | 17     |
|    | Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                       | -   | WTP    | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | WTP               | NA     |      |      |      | 100                 | TT     |
| 1  | Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak                                 | %   | 0,93   | 0,73  | 0,72  | 0,96  | 1,27  | 1,14              | 1,06   |      |      |      | 83,52               | TT     |
|    | Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu                    | %   | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100               | 100    |      |      |      | 100                 | TT     |
| 2  | Prosentase pemutakhiran obyek pajak  | %   | 2,9    | 2,9   | 2,9   | 2,9   | 2,9   | 7,20              | 0,66   |      |      |      | 22,64               | UK     |
|    | Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu                 | %   | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100               | 100    |      |      |      | 100                 | TT     |
| 3  | Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah                              | %   | 90     | 90    | 90    | 90    | 95    | 98,91             | 92,54  |      |      |      | 97,41               | AT     |
|    | Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu                             | %   | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100,00            | 100,00 |      |      |      | 100                 | TT     |
| 4  | Realisasi Belanja Terhadap APBD  | %   | 87,92  | 89,35 | 91,07 | 90,51 | 89,51 | 92,71             | 90,05  |      |      |      | 100                 | TT     |
| 5  | Prosentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan                       | %   | 90     | 100   | 100   | 100   | 100   | 97,83             | 96,49  |      |      |      | 96,49               | AT     |
|    | Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu                                    | %   | 100    | 100   | 100   | 100   | 100   | 57,14             | 85,71  |      |      |      | 85,71               | AT     |
|    | Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu                                    | %   | 98     | 98    | 98    | 100   | 100   | 100               | 100    |      |      |      | 100,00              | TT     |
| 6  | Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja | %   | 80,95  | 82,74 | 84,52 | 86,31 | 88,1  | 81,55             | 66,47  |      |      |      | 75,45               | AT     |
|    | Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja                                    | %   | 98,33  | 98,49 | 98,7  | 98,9  | 99,1  | 98,55             | 99,39  |      |      |      | 100                 | TT     |
| 7  | Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel                    | %   | 95     | 95    | 95    | 97    | 98    | 100               | 82,98  |      |      |      | 84,67               | AT     |
|    | Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu                  | %   | 95     | 95    | 95    | 97    | 98    | 85,11             | 82,98  |      |      |      | 84,67               | AT     |

|                          |           |  |              |           |
|--------------------------|-----------|--|--------------|-----------|
| JUMLAH INDIKATOR SASARAN | 1         |  | 100,00       | 1         |
| JUMLAH INDIKATOR PROGRAM | 14        |  | 87,90        | 14        |
| <b>JUMLAH IKPD</b>       | <b>15</b> |  | <b>93,95</b> | <b>15</b> |

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan **status telah tercapai** ada 8 (delapan) terdiri dari:

a. Indikator Kinerja Program Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak dengan capaian 1,06 % berstatus Telah tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan
  - Pendataan SISMIOP yang ditetapkan di tahun 2020 dilaksanakan pada tahun 2019
- Faktor penghambat keberhasilan
  - Perubahan SPPT PBB-P2 ditiadakan karena penundaan distribusi SPPT.
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
  - Pengajuan perubahan SPPT tetap diterima namun diterbitkan pada tahun berikutnya.

b. Indikator Kinerja Program Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu dengan capaian 100 % berstatus Telah tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan
  - Jumlah pemohon sebanyak 5.497 yang datang langsung diverifikasi
- Faktor penghambat keberhasilan
  - Tidak ada karena semua berkas terverifikasi
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
  - Semakin besar persentase perubahan data yang tepat waktu semakin besar juga kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja pegawai BPPKAD khususnya bagian pelayanan.

c. Indikator Kinerja Program Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu dengan capaian 100 % berstatus Telah tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan
  - 1.199 SKPD yang diterbitkan oleh sub bidang penetapan pendapatan terdiri dari 607 SKPD reklame, 497 SKPD Air Tanah, dan 95 SKPDKB BPHTB
- Faktor penghambat keberhasilan
  - Kebutuhan wajib pajak akan penerbitan SKPD itu sendiri (baik pajak reklame, pajak air tanah, maupun SKPDKB BPHTB)
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
  - Untuk SKPD reklame sempat terhambat penerbitannya karena penerbitan SKPD pajak reklame diharuskan menunggu izin reklame selesai dibuat. Sehingga beberapa kali terjadi ketika izin reklame sudah selesai, pajaknya tidak dibayarkan.

d. Indikator Kinerja Program Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah dengan capaian 101,80 % berstatus Tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan
  - Turunnya target pendapatan sebanyak 8,76 % dari penetapan awal.
- Faktor penghambat keberhasilan
  - Turunnya target pendapatan karena *pandemic*
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
  - Target pendapatan daerah disesuaikan dengan alasan kondisi wabah dan dampaknya terhadap wajib pajak baik

dampak ekonomi maupun non ekonomi. Terhentinya usaha fisik wajib pajak selama masa pandemi tentu saja akan mengurangi perolehan pajak atas omzet usahanya

e. Indikator Kinerja Program Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu dengan capaian 100 % berstatus Telah tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan
  - Turunnya target pendapatan sebanyak 8,76 % dari penetapan awal.
- Faktor penghambat keberhasilan
  - 14 OPD Sudah melaporkan semua
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
  - Sudah melaporkan semua

f. Indikator Kinerja Program Persentase Realisasi Belanja Terhadap APBD dengan capaian 100 % berstatus Telah tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan
  - Target kinerja
- Faktor penghambat keberhasilan
  - *Pandemic Covid-19*
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
  - Pemda mendorong PD segera melaksanakan target kinerja

g. Indikator Kinerja Program Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu dengan capaian 100 % berstatus Telah tercapai

- Faktor Pendorong Keberhasilan.
  - kecepatan tindak lanjut SKPD terhadap hasil verifikasi dokumen pengajuan SPM
- Faktor penghambat keberhasilan

- SKPD tidak respon terhadap verifikasi dokumen pengajuan dan lebih bersifat pasif dan tidak konfirmasi dan tidak koordinasi dengan BPPKAD
  - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
    - kordinasi dengan SKPD lebih diintensifkan
- h. Indikator Kinerja Program Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja dengan capaian 99,39 % berstatus Telah tercapai
- Faktor Pendorong Keberhasilan
    - Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola keuangan daerah dalam proses penyusunan anggaran
  - Faktor penghambat keberhasilan
    - Pihak yang memanfaatkan aset Pemda belum melakukan permohonan perpanjangan atas aset Pemda yang dimanfaatkan
  - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
    - Meningkatkan koordinasi dengan SKPD tentang pemanfaatan barang milik daerah
2. Capaian indikator dengan **status tercapai** ada 5 (lima) terdiri dari:
- a. Indikator Kinerja Program Persentase konsistensi penganggaran terhadap Perencanaan dengan capaian 96,49 % berstatus Akan tercapai
- Faktor Pendorong Keberhasilan
    - Penggunaan Aplikasi *E-Budgeting* yang sudah terintegrasi dengan aplikasi *e-planning*

- Faktor penghambat keberhasilan
    - Adanya perubahan kebijakan arah pembangunan pada periode tertentu sehingga berdampak pula terhadap kebijakan penganggaran program/kegiatan
    - Kemampuan keuangan daerah tidak bisa mengcover semua kegiatan yang direncanakan
  - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
    - Perencanaan program/kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
- b. Indikator Kinerja Program Persentase dokumen penganggaran tepat waktu dengan capaian 100 % berstatus Telah tercapai
- Faktor Pendorong Keberhasilan
    - Komitmen yang sama dari semua pihak pengelola keuangan daerah dalam proses penyusunan anggaran
  - Faktor penghambat keberhasilan
    - Keterlambatan input di *e-budgeting* oleh beberapa SKPD pengampu program/kegiatan
  - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
    - Asistensi penganggaran kepada SKPD terkait
- c. Indikator Kinerja Program Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dengan capaian 92,56 % berstatus akan tercapai
- Faktor Pendorong Keberhasilan
    - Penggunaan Aplikasi SIMBADA
  - Faktor penghambat keberhasilan
    - Sumber Daya Manusia di SKPD
  - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
    - Koordinasi dengan SKPD lebih intensif

- d. Indikator Kinerja Program Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dengan capaian 82,98 % % berstatus Akan tercapai
- Faktor Pendorong Keberhasilan
    - Laporan Keuangan disusun berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
    - Melaksanakan Peraturan Bupati nomor
    - Penggunaan Aplikasi Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan
  - Faktor penghambat keberhasilan
    - pada saat IKD dilaporkan, belum semua SKPD mengirim SPJ Anggaran dan kas bulan Desember ke BPPKAD selaku SKPKD dan adanya pergantian personil penatausahaan keuangan
  - Rekomendasi dan Tindak Lanjut
    - Melakukan monitoring laporan keuangan SKPD
    - Melaksanakan asistensi kepada perangkat Daerah
    - Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan dengan SKPD
- e. Indikator Kinerja Program Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel dengan capaian 82,98 % berstatus Telah tercapai
- Faktor Pendorong Keberhasilan
    - Melaksanakan Peraturan Bupati nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan APBD
    - Disiplin dan tertib penatausahaan dan akuntansi keuangan SKPD

- Faktor penghambat keberhasilan
  - Pada saat IKD dilaporkan, SKPD belum mengirim SPJ Anggaran dan kas bulanan bulan Desember ke BPPKAD selaku SKPKD dan adanya pergantian personil penatausahaan keuangan
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
  - Melakukan monitoring laporan keuangan SKPD
  - Melakukan desk untuk percepatan penyusunan laporan keuangan

3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 (satu) yaitu :

- a. Indikator Kinerja Program Persentase pemutakhiran obyek pajak dengan capaian 0,66 % berstatus Upaya keras

- Faktor Pendorong Keberhasilan
  - Realisasi pemutakhiran s/d triwulan IV Tahun 2020 sebanyak 3.985 SPPT. Pemutakhiran ini terdiri dari pemutakhiran data perumahan (tindak lanjut rekomendasi KPK pendataan PBB perumahan) , perubahan data atas permintaan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah terkait kepentingan pembangunan irigasi di Desa Geblog, pengajuan pemutakhiran data reguler untuk tahun 2021, serta perubahan data bangunan untuk kepentingan BPHTB.
- Faktor penghambat keberhasilan
  - Banyaknya keluhan terkait ditiadakannya penerimaan berkas pengajuan pemutakhiran SPPT PBB-P2 Tahun 2020 serta dinamisnya data perpindahan kepemilikan tanah di tingkat desa yang menyebabkan nama subjek

pajak dalam SPPT harus diubah agar Wajib Pajak berkenan membayarkan kewajibannya;

- Permintaan data terkait pembebasan tanah 94 OP untuk saluran irigasi di Desa Geblog yang dimohonkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut
  - Adanya beberapa kebijakan yang tumpang tindih dalam PBB-P2 tahun 2020 ini (reklasifikasi NJOP, stimulus PBB, serta pengurangan 50% ketetapan PBB) menyebabkan beberapa rumusan yang sangat rumit dalam aplikasi sismiop dan opentax, sehingga proses perubahan SPPT (terutama penetapan terseleksi di tahun 2020) sebisa mungkin tidak dilakukan, karena dapat menyebabkan pergerakan ketetapan yang tidak biasa mengingat banyaknya rumusan dan variabel yang di luar kebiasaan dalam PBB tahun ini

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Baik yaitu dengan nilai 87,90 %, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 8 kali WTP  
 Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik

### 2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah di bidang Keuangan dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari hasil audit BPK RI atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 disebutkan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK-RI, yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan opini tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Lampiran 1 Kerangka Konseptual Pemeriksaan menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa. Pemeriksaan BPK RI membandingkan kesesuaian LKPD dengan prinsip akuntansi yang diterapkan, sehingga dalam hal tidak terdapat kesalahan yang material maka opini yang diberikan adalah WTP.

Adapun Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.  
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| Tahun      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| Opini LKPD | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | n.a  |

Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Berdasarkan tabel di atas, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir ( Tahun 2015 sampai 2019) memperoleh opini WTP yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Data dukung Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI.

## 2. Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Warsito (2001)

Rumusnya adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi realisasi Pendapatan Daerah dikali 100%

Adapun persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.  
Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah  
Daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| Tahun   | 2015                      | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Realisasi<br>Pendapatan<br>Asli Daerah          | 212.498.<br>139.929       | 259.065.008.<br>786   | 308.466.748.<br>340   | 252.019.934.<br>778   | 278.306.408.<br>650   | 307.431.698.<br>576   |
| Realisasi<br>Pendapatan<br>Daerah               | 1.469.48<br>2.958.10<br>5 | 1.678.688.07<br>9.170 | 1.779.850.39<br>4.321 | 1.731.168.36<br>6.276 | 1.840.953.30<br>6.303 | 1.830.789.90<br>7.558 |
| Persentase<br>Realisasi<br>Pendapatan<br>Daerah | 14,46                     | 15,43                 | 17,33                 | 14,56                 | 15,12                 | 16,79                 |

Sumber: CALK 2015-2019 dan LRA 2020 Triwulan IV Bidang IV BPPKAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perolehan pendapatan asli daerah tercapai sebesar 16,79% dari realisasi pendapatan daerah, persentase 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena intensifikasi pendapatan asli daerah berjalan dengan baik.

Tren penurunan pendapatan asli daerah secara signifikan terjadi pada tahun 2018 dimana terjadi peralihan hak atas pengelolaan pajak air tanah, dimana kewenangan pemungutan pajak jenis tersebut diambil alih oleh provinsi, sehingga menurunkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun tersebut, pada tahun 2019 persentase meningkat dari pada tahun 2018 sebesar 3%, sedangkan untuk tahun 2020 ini meskipun persentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 tetapi capaian realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 10.163.398.745 dari tahun 2019.

Tabel 2.2.  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| Uraian                                      | 2015                | 2016                | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Pendapatan Asli Daerah                      | 212.498.139.92<br>9 | 281.328.148.9<br>70 | 308.466.748.3<br>40 | 252.019.934.7<br>78 | 278.306.408.6<br>50 | 307.431.698.5<br>76 |
| I.A Hasil Pajak Daerah                      | 31.523.819.462      | 32.480.985.44<br>9  | 38.291.278.09<br>4  | 40.401.374.47<br>0  | 53.424.094.04<br>6  | 47.887.604.81<br>3  |
| I.B Hasil Retribusi Daerah                  | 13.410.490.650      | 63.764.882.91<br>6  | 16.687.218.83<br>7  | 12.702.535.34<br>4  | 16.189.001.24<br>9  | 8.436.169.882       |
| I.C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah       | 13.060.826.000      | 13.013.670.03<br>8  | 13.762.738.26<br>1  | 24.857.473.73<br>1  | 14.571.585.06<br>4  | 18.800.858.16<br>5  |
| I.D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah | 154.508.000.56<br>0 | 172.068.610.5<br>67 | 239.725.513.1<br>48 | 174.058.551.2<br>33 | 190.121.728.2<br>91 | 232.307.065.7<br>16 |

Sumber: CALK 2015-2019 dan LRA 2020 Triwulan IV Bidang IV BPPKAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, untuk capaian hasil pajak daerah saja untuk tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 10,4% jika dibandingkan dengan tahun 2019, sedangkan hasil retribusi mengalami penurunan sebesar 47,9% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Untuk pendapatan dari sisi hasil pengelolaan kekayaan daerah memang mengalami peningkatan sebesar 29% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sedangkan dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami peningkatan juga sebesar 22%.

### 3. Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak

Objek Pajak adalah semua hal atau sebuah transaksi yang menurut peraturan ataupun Perundang-undangan tentang perpajakan dikenakan pajak, sedangkan Objek Pajak PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Rumus pertumbuhan objek pajak adalah  $n-1$  dibagi  $n$  dikali 100%.

Realisasi persentase peningkatan data jumlah objek pajak Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1.  
Persentase Peningkatan Data Jumlah Objek Pajak  
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| Uraian                     | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah objek pajak terdata | 493.494 | 525.243 | 579.607 | 600.224 | 607.052 | 606.871 |
| Peningkatan OP             | 2.830   | 31.749  | 54.364  | 20.617  | 6.828   | 6.393   |
| Persentase Peningkatan OP  | 0,576%  | 6,43%   | 10,35%  | 3,56%   | 1,14%   | 1,053%  |

Sumber Data : Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pelayanan

Kenaikan jumlah objek pajak tahun 2020 dikarenakan adanya pendataan SISMIOP pada tahun 2019 yang ditetapkan di tahun 2020,

Adapun data objek pajak 6 tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.2.  
Data Objek pajak 6 Tahun  
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

|           | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| HOTEL     | 14      | 14      | 16      | 18      | 18      | 18      |
| RESTORAN  | 198     | 181     | 183     | 177     | 610     | 600     |
| HIBURAN   | 16      | 19      | 28      | 34      | 19      | 13      |
| PARKIR    | 36      | 37      | 46      | 71      | 56      | 55      |
| REKLAME   | NA      | 876     | 735     | 671     | 618     | 607     |
| PPJ       | 138.462 | 137.402 | 136.564 | 138.816 | 138.377 | 138.599 |
| BPHTB     | NA      | 3.434   | 3.065   | 2.902   | 2.661   | 3.199   |
| AIR TANAH | NA      | 374     | 363     | 371     | 417     | 497     |
| PBB       | 493,494 | 525,243 | 579,607 | 600,224 | 607.052 | 606.871 |

Sumber Data : Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pelayanan

#### 4. Persentase Terverifikasinya Perubahan Data Yang Tepat Waktu

Definisi: Verifikasi perubahan data yang tepat waktu adalah proses pemeriksaan atas kebenaran dan kelengkapan permohonan perubahan data yang selesai sesuai dengan waktu yang sudah di tentukan. Permohonan perubahan data ini hanya di Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Rumus : Jumlah terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu dibagi Jumlah permohonan yang masuk dikali seratus persen.

Adapun Data Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.

Persentase Terverifikasinya Perubahan Data yang Tepat Waktu  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea  
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

| No | URAIAN               | JENIS  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019   | 2020  |
|----|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 1. | Berkas Pengajuan     | PBB-P2 | 1.873 | 1.701 | 1.113 | 1,055 | 8.305  | 3.985 |
|    |                      | BPHTB  | NA    | 3.434 | 3.065 | 2.902 | 2.661  | 3.199 |
|    | Jumlah               |        | 1.873 | 5.135 | 4.178 | 3.957 | 10.966 | 7.184 |
| 2. | Berkas Terverifikasi | PBB-P2 | 1.873 | 1.701 | 1.113 | 1,055 | 8.305  | 3.985 |
|    |                      | BPHTB  | NA    | 3.434 | 3.065 | 2.902 | 2.661  | 3.199 |
|    | Jumlah               |        | 1.873 | 5.135 | 4.178 | 3.957 | 10.966 | 7.184 |
|    |                      |        |       |       |       |       |        |       |

|    |                |      |      |      |      |      |      |      |
|----|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3. | Persentase (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|----|----------------|------|------|------|------|------|------|------|

Sumber Data : Bidang Perencanaan, Pendataan dan Pelayanan

Analisis : Semakin besar persentase perubahan data yang tepat waktu semakin besar juga kepercayaan wajib pajak terhadap kinerja pegawai BPPKAD khususnya bagian pelayanan.

Tabel 4.2.

Jumlah permohonan Perubahan Data s.d Triwulan IV Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

| No | URAIAN           | JENIS  | JAN | FEB | MAR | APRIL | MAY | JUN | JUL   | AGUST | SEPT  | OKT | NOV | DEK |
|----|------------------|--------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 1. | Berkas Pengajuan | PBB-P2 | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0   | 2.269 | 191   | 929   | 366 | 185 | 45  |
|    |                  | BPHTB  | 0   | 461 | 261 | 174   | 104 | 217 | 276   | 200   | 410   | 283 | 461 | 352 |
|    | Jumlah           |        | 0   | 461 | 261 | 174   | 104 | 217 | 2.545 | 391   | 1.339 | 649 | 646 | 397 |

Analisis : Untuk data permohonan perubahan data PBB-P2 pada tahun 2020, dimulai bulai Juli karena pandemi covid-19 sehingga SPPT PBB-P2 baru didistribusikan ke Desa dan Kelurahan pada Bulan Juli 2020, sedangkan untuk permohonan BPHTB pada bulan Januari tidak ada pengajuan dikarenakan masih menunggu Keputusan Bupati tentang penyesuaian NJOP.

### 5. Prosentase Pemutakhiran Obyek Pajak.

Pemutakhiran Obyek Pajak adalah suatu kegiatan memperbaharui data Obyek Pajak (OP) dan data Subyek Pajak (SP) PBB P2 dalam basis data SISMIOP (Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2 Tahun 2014). Pemutakhiran basis data SISMIOP perlu terus dilaksanakan mengingat cepatnya perubahan kondisi fisik (OP dan SP) di lapangan yang tidak disertai dengan perubahan pada basis data PBB sehingga menimbulkan SPPT tidak terbit dan SPPT tidak adil. Selain itu pemutakhiran data tersebut wajib terus dilaksanakan sebagai tindak lanjut Korsupgah KPK RI tentang Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Sebenarnya.

Dalam prosesnya, pemutakhiran data PBB P2 yang diajukan oleh wajib pajak melalui desa/kelurahan meliputi:

a)Proses mutasi nama,

- b) Proses perubahan data,
- c) Proses mutasi pecah,
- d) Proses mutasi gabung,
- e) Pengajuan OP baru,
- f) Proses fasum/hapus.

Proses mutasi nama dilakukan ketika terjadi perpindahan kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Sementara proses perubahan data biasanya dilakukan ketika terdapat kesalahan data berupa kesalahan nama, luas, dan spesifikasi bangunan yang tertera pada SPPT. Perbedaan keduanya terdapat pada alasan terjadinya perubahan, dimana mutasi nama dilakukan ketika terjadi perubahan kepemilikan, sementara perubahan data terjadi karena kesalahan data dalam SPPT. Untuk meminimalisir kesalahan penulisan nama/alamat dalam SPPT tersebut, pada akhir Tahun 2015 BPPKAD telah melakukan integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan database aplikasi SISMIOP. Selain mengurangi kesalahan pengetikan nama/alamat pada SPPT dan memunculkan kecepatan dan ketepatan proses entri data, integrasi NIK ini juga sangat membantu peningkatan PAD karena SISMIOP kemudian dapat membaca kepemilikan ganda oleh wajib pajak yang sama sehingga pada kepemilikan kedua dan seterusnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagai pengurangan kewajiban pajak dapat dihilangkan dan kemudian PBB dikenakan atas nilai NJOP yang ditetapkan tanpa pengurang.

Proses lain dalam pengajuan perubahan data SPPT yang memberikan dampak pada kenaikan pemasukan PAD adalah pengajuan perubahan luas bumi dan/atau penambahan objek bangunan pada SPPT yang dilakukan sebelum proses pengajuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). SPPT yang sebelumnya tidak terdapat bangunan namun pada proses perpindahan hak telah berdiri bangunan maka diajukan penambahan data bangunan pada SPPT untuk kemudian dicantumkan dalam formulir pengajuan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB). Pencantuman nilai bangunan pada SSPD BPHTB tentu saja

menambah nilai BPHTB terhutang karena BPHTB kemudian dikenakan atas nilai tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.

Proses selanjutnya adalah proses proses mutasi pecah dan mutasi gabung. Mutasi pecah biasanya dilakukan ketika terjadi perubahan kepemilikan yang disertai dengan pemecahan objek pajak dari 1 SPPT menjadi beberapa SPPT dikarenakan tanah tersebut dijual/dihibahkan tidak secara bulat luasannya seperti tercantum pada SPPT. Sementara proses mutasi gabung dilakukan ketika beberapa SPPT yang objeknya masih ada dalam satu lokasi dimiliki oleh satu orang, sehingga dilakukan penggabungan atas SPPT yang dimaksud menjadi 1 SPPT saja. Dalam proses ini, pemecahan dan penggabungan data SPPT tidak hanya dilakukan di database SISMIOP, tetapi juga dalam data spasial PBB (Smartmap).

Proses pengajuan OP baru adalah pengajuan SPPT atas bidang tanah dan/atau bangunan yang sebelumnya tidak ber SPPT. Diajukan dalam klasifikasi baru manakala memang terdapat bidang tanah dan/atau bangunan yang sebelumnya tidak terdapat/tidak terdata dalam data base aplikasi SISMIOP dan smartmap.

Proses terakhir adalah proses perubahan status penggunaan objek pajak dari penggunaan pribadi/komersial kepada penggunaan fasilitas umum. Proses ini merubah status OP yang sebelumnya dikenakan pajak menjadi OP yang dibebaskan dari pengenaan pajak misalnya untuk masjid, lapangan, tempat pemakaman, dan lain-lain.

Untuk memperoleh angka prosentase pemutakhiran data obyek pajak, maka dapat dihitung dengan cara membagi jumlah SPPT yang dilakukan dimutakhirkan datanya dengan jumlah OP PBB secara keseluruhan dikalikan 100%.

Adapun persentase pemutakhiran objek pajak Tahun 2015 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2.  
Persentase Pemutakhiran Objek Pajak Tahun 2015-2020  
s.d Triwulan IV

| <b>NO</b> | <b>Uraian</b>                          | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1         | Jumlah SPPT yang dimutakhirkan datanya | 10.965      | 12.120      | 22.430      | 14.832      | 43.237      | 3.985       |

|    |                                  |                    |                    |                    |                    |                    |         |
|----|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 2  | Jumlah OP PBB secara keseluruhan | <b>493.44</b><br>1 | <b>525.22</b><br>9 | <b>579.59</b><br>4 | <b>587.12</b><br>3 | <b>600.47</b><br>8 | 606.871 |
| 3. | Persentase (%)                   | 2,2                | 2,3                | 3,9                | 2,5                | 7,2                | 0,66    |

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Prosentase Pemutakhiran Obyek Pajak dalam 6 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2015 s.d 2017 mengalami peningkatan, tahun 2018 menurun, tahun 2019 meningkat, namun tahun 2020 turun drastis dikarenakan dengan adanya pandemi Covid-19 kebijakan daerah menunda distribusi SPPT dan tidak menerima permohonan perubahan SPPT.

Dalam proses pemutakhiran, semakin besar prosentase pemutakhiran data PBB berakibat semakin kecil perbedaan data SPPT dengan kondisi lapangan yang bermakna semakin terwujudnya keadilan pemungutan PBB di masyarakat. Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut di atas, dapat kita lihat jumlah SPPT PBB-P2 tahun pajak 2020 yang dimutakhirkan sampai 31 Desember 2020 tercatat 3.985 SPPT, agak jauh dari angka pemutakhiran di tahun sebelumnya. Hal ini tak lain disebabkan karena proses pengajuan perubahan SPPT oleh wajib pajak (baik itu mutasi nama, mutasi pecah, mutasi gabung, obyek pajak baru, dan penghapusan obyek pajak) untuk tahun ini ditiadakan. Bermula dari banyaknya keluhan terkait ditiadakannya penerimaan berkas pengajuan pemutakhiran SPPT PBB-P2 Tahun 2020 serta dinamisnya data perpindahan kepemilikan tanah di tingkat desa yang menyebabkan nama subjek pajak dalam SPPT harus diubah agar Wajib Pajak berkenan membayarkan kewajiban pajaknya mendorong para pembuat kebijakan di bidang pendapatan untuk membuka proses pengajuan pemutakhiran SPPT PBB-P2, namun penetapannya untuk tahun 2021.

Tabel 5.3.  
Pemutakhiran Objek Pajak Tahun 2020  
s.d Triwulan IV

| Uraian                                 | Jan | Feb | Mar | April | mei | Juni | Jul   | Agustus | Sep<br>t | Okt | Nop | Des | Jumlah |
|--|-----|-----|-----|-------|-----|------|-------|---------|----------|-----|-----|-----|--------|
| Jumlah SPPT yang dimutakhirkan datanya | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   | 0    | 2.269 | 191     | 929      | 366 | 185 | 45  | 3.985  |

## 6. Persentase Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu

Terhadap pajak yang bersifat official assessment maka BPPKAD wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan dokumen permohonan dan dokumen pemeriksaan lapangan. SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Dokumen ini diterbitkan oleh BPPKAD sebagai dasar pemungutan pajak daerah, SKPD yang diterbitkan meliputi;

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
4. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang yang digunakan untuk transaksi pajak reklame, pajak air tanah dan BPHTB. (Sumber: Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2011)

Proses penerbitan SKPD tersebut di atas secara tepat waktu dapat diartikan penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan stan dan pelayanan publik yang ada.

Pelayanan yang dimaksud adalah gambaran pelayanan secara keseluruhan, dari proses pengajuan sampai terbitnya SKPD tersebut dan kemudian disampaikan kepada wajib pajak.

Proses penerbitan SKPD dapat langsung diproses oleh Sub Bidang Penetapan Pendapatan setelah permohonan dari wajib pajak selesai di entri dalam sistem manajemen pendapatan daerah, untuk kemudian (jika diperlukan) ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan lapangan oleh tim pendataan lapangan dari unsur bidang pendapatan. Pengecekan lapangan biasanya dilakukan karena beberapa alasan. Untuk penerbitan SKPD reklame misalnya, pengecekan lapangan biasanya dilakukan saat dokumen pengajuan belum cukup melampirkan gambaran fisik reklame yang diajukan dan perizinannya belum diberikan oleh DPMPTSP, sehingga Sub Bidang Penetapan Pendapatan kesulitan menentukan jenis dan ketentuan pajaknya. Sementara untuk penerbitan SKPD air tanah biasanya dilakukan ketika meter air tanahnya dilaporkan rusak atau karena pendataan wajib pajak baru. Sedangkan untuk pengecekan lapangan dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN BPHTB biasanya dilakukan ketika wajib pajak merasa ada ketidaksesuaian antara nilai pasar yang dicantumkan sebagai harga transaksi dengan harga transaksi yang mereka lakukan, serta ketika luasan objek pajak sangat besar sehingga besaran pajak sangat tinggi. Setelah pengecekan lapangan selesai dilakukan, dibuktikan dengan berita acara pengecekan lapangan, Kepala Sub Bidang Penetapan Pendapatan selanjutnya dapat melakukan penetapan SKPD dalam system untuk kemudian diterbitkan SKPD secara fisik untuk diberikan kepada wajib pajak, baik itu SKPD reklame, air tanah, maupun BPHTB.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu, maka dihitung dengan cara membagi jumlah SKPD yang diterbitkan dengan jumlah permohonan/pengajuan SKPD dikalikan 100%.

Adapun Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu Tahun 2015-2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1.  
Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu  
Tahun 2015-2020s.d Triwulan IV

| NO | Uraian                            | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019         | 2020  |
|----|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| 1  | Jumlah SKPD yang diterbitkan      | 1.737 | 2.151 | 2.140 | 1.788 | <b>1.728</b> | 1.197 |
| 2  | Jumlah permohonan/ pengajuan SKPD | 1.737 | 2.151 | 2.140 | 1.788 | 1.728        | 1.197 |
| 3. | Persentase(%)                     | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%         | 100%  |

Sumber Data : Bidang Pengelolaan Data dan Penetapan Pendapatan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, prosentase 100 % secara konstan menunjukkan bahwa seluruh dokumen permohonan/pengajuan(SPOPD) telah melalui proses pengelolaan data dan telah ditetapkan menjadi SKPD untuk kemudian ditagih dan dibayarkan oleh wajib pajak.

Tabel 6.2.  
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tepat Waktu Tahun 2020  
Sampai dengan Triwulan IV

| No. | Jenis Pajak | Juli 2020 | Agustus 2020 | September 2020 | Oktober | Nopember | Desember | Jumlah       |
|-----|-------------|-----------|--------------|----------------|---------|----------|----------|--------------|
| 1.  | Air Tanah   | 41        | 42           | 44             | 46      | 51       | 497      | <b>497</b>   |
| 2.  | Reklame     | 16        | 139          | 57             | 101     | 71       | 605      | <b>607</b>   |
| 3.  | BPHTB       | 15        | 1            | 0              | 0       | 0        | 95       | <b>95</b>    |
|     | Jumlah      | 54        | 72           | 101            | 147     | 122      | 79       | <b>1.197</b> |

## 7. Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah merupakan perwujudan apa yang sudah direncanakan di ketetapan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu.

Untuk memperoleh angka persentase penerimaan pendapatan daerah didapat dari realisasi pendapatan daerah dibagi target pendapatan daerah dikali 100%.

Adapun Persentase realisasi terhadap target pendapatan Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1.  
Persentase Realisasi terhadap target Pendapatan Daerah Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| Tahun                                  | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Realisasi Pendapatan Daerah            | 1.469.482.958.105 | 1.678.688.079.170 | 1.779.850.394.321 | 1.731.168.366.276 | 1.840.953.306.303 | 1.830.789.907.558 |
| Target Pendapatan Daerah               | 1.460.287.073.763 | 1.709.015.655.249 | 1.782.091.942.671 | 1.746.113.814.151 | 1.861.308.494.735 | 1.798.454.020.290 |
| Persentase Realisasi Pendapatan Daerah | 100,63            | 98,23             | 99,87             | 99,96             | 98,91             | 102,32            |

Sumber: CALK 2014-2019 dan LRA 2020 Triwulan IV Bidang IV BPPKAD Kab. Temanggung

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10.163.398.745 jika dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini disebabkan karena penurunan capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah imbas dari pandemi covid-19 walaupun secara persentase capaian realisasi pendapatan daerah tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini tak lepas dari diturunkannya target pendapatan tahun 2020 sebesar 72.015.411.111.

Target pendapatan daerah disesuaikan dengan alasan kondisi wabah dan dampaknya terhadap wajib pajak baik dampak ekonomi maupun non ekonomi. Terhentinya usaha fisik wajib pajak selama masa pandemi tentu saja akan mengurangi perolehan pajak atas omzet usahanya

Tabel 7.2.  
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2020 Triwulan IV

| Tahun                         | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pendapatan Asli Daerah        | 212.498.139.929   | 281.328.148.970   | 308.466.748.340   | 251.819.135.353   | 277.967.595.997   | 307.431.698.576   |
| Dana Perimbangan              | 1.247.688.130.253 | 1.395.299.245.901 | 1.469.898.249.741 | 1.069.110.356.426 | 1.128.052.480.266 | 1.046.567.778.773 |
| Lain-lain Pendapatan Yang Sah | 9.296.687.923     | 2.060.684.299     | 1.485.396.240     | 420.138.975.497   | 434.933.230.040   | 476.790.430.209   |
| Jumlah                        | 1.469.482.958.105 | 1.678.688.079.170 | 1.779.850.394.321 | 1.731.168.366.276 | 1.840.953.306.303 | 1.830.789.907.558 |

Sumber: CALK 2015-2019 dan LRA 2020 Triwulan IV Bidang III BPPKAD Kab. Temanggung

## 8. Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu

Pelaporan pendapatan daerah tepat waktu adalah bentuk pertanggungjawaban OPD pemungut pendapatan yang dikirimkan kepada PPKD selaku BUD paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya (Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung Tahun Anggaran 2020) untuk memudahkan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah bulanan, triwulan dan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut BPPKAD selaku SKPKD selalu mengadakan monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua OPD pemungut pendapatan setiap semester, dimana kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Temanggung.

Rumus jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan dikali 100%.

Adapun persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu Tahun 2015-2020 s.d triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.1.  
Persentase Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu  
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| Tahun   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------|------|------|------|------|
| jumlah perangkat daerah yang melaporkan realisasi pendapatan daerah tepat waktu | 22   | 20   | 19   | 19   | 14   | 14   |
| jumlah perangkat daerah yang mengampu pendapatan                                | 22   | 20   | 19   | 19   | 14   | 14   |
| Persentase Pelaporan Tepat Waktu  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPPKAD Kab. Temanggung

Pelaporan Pengelola Pendapatan dilaksanakan tepat waktu oleh OPD pengelola pendapatan sesuai pedoman Pengelolaan APBD Kab Temanggung.

Tabel 8.2.  
Pelaporan Pendapatan Daerah Tepat Waktu Tahun 2015 s.d 2020 Triwulan IV

| N<br>O | NAMA OPD   | 2015        |                   | 2016        |                   | 2017        |                   | 2018        |                   | 2019        |                   | 2020        |                   |
|--------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|        |  | Tepat Waktu | Tidak Tepat Waktu |
| 1      | Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 |
| 2      | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga                   |             |                   |             |                   | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 |
| 3      | Dinas Kesehatan  | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 |
| 4      | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman  | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 |
| 5      | Dinas Tenaga Kerja                                     | √           | -                 |             |                   | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 |
| 6      | Dinas Lingkungan Hidup                                 |             |                   |             |                   | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 |
| 7      | Dinas Perhubungan                                      |             |                   |             |                   | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 |
| 8      | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM      | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 |
| 9      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 |
| 10     | Dinas Perikanan dan Peternakan                         | √           | -                 |             |                   | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 |
| 11     | Sekretariat Daerah                                     | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 |
| 12     | Kecamatan Temanggung                                   |             |                   |             |                   | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 |
| 13     | Kecamatan Pringsurat                                   | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 |
| 14     | Kecamatan Parakan                                      |             |                   |             |                   | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 | √           | -                 |

|               |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|---------------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| 15            | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan    |    |   | √  | - | √  | - | √  | - |    |   |    |   |
| 16            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | √  | - | √  | - | √  | - | √  | - |    |   |    |   |
| 17            | Dinbudparpora                           | √  | - | √  | - | √  | - | √  | - |    |   |    |   |
| 18            | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan        | √  | - |    |   | √  | - | √  | - |    |   |    |   |
| 19            | Kecamatan Kaloran                       |    |   |    |   | √  | - | √  | - |    |   |    |   |
| 20            | RSUD Temanggung                         | √  | - | √  | - |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 21            | Dinas Perhubungan dan Kominfo           | √  | - | √  | - |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 22            | Kelurahan Temanggung II                 | √  | - | √  | - |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 23            | Kelurahan Butuh                         |    |   | √  | - |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 24            | Kelurahan Jampirejo                     | √  | - | √  | - |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 25            | Kelurahan Banyuurip                     | √  | - | √  | - |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 26            | Kelurahan Kebonsari                     | √  | - | √  | - |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 27            | Kelurahan Sidorejo                      | √  | - | √  | - |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 28            | Kelurahan Parakan Wetan                 | √  | - | √  | - |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 29            | Dinas Pertanian dan Bunhut              | √  | - | √  | - |    |   |    |   |    |   |    |   |
| 30            | Kelurahan Jampiroso                     | √  | - |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
| <b>Jumlah</b> |   | 22 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |

Sumber : Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Daerah BPPKAD Kab. Temanggung

Tahun 2020 jumlah OPD yang mengelola pendapatan sama dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 14 OPD yaitu BPPKAD, Dindikpora, Dinkes, DPUPKP, Disnaker, DLH, Dishub, Disperindagkop, DPMPTSP, Dinakan, Sekda, Kecamatan Temanggung, Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Parakan.

perubahan jumlah OPD yang mengelola pendapatan yang terjadi pada tahun 2019 berkaitan dengan adanya perubahan SOTK dimana OPD Dintanpangan, Disdukcapil, Dinbudparpora, Dinarpus dan Kecamatan Kaloran tidak lagi mengelola pendapatan pada tahun 2019 dimana OPD ini awalnya pada tahun 2017 dan 2018 masih melaporkan pendapatan yang dikelolanya sehingga mengurangi jumlah OPD ditahun 2019, dimana pada tahun 2017 dan 2018 berjumlah 19 OPD, tahun 2019 dan 2020 menjadi 14 OPD. Sedangkan tahun 2015 berjumlah 22 OPD dan tahun 2016 mengalami penurunan 2 OPD yaitu Dinas Peternakan dan Perikanan serta Kelurahan Jampiroso yang sudah tidak lagi mengelola pendapatan sehingga jumlah OPD yang mengelola pendapatan pada tahun 2016 berjumlah 20 OPD.

## **9. Realisasi Belanja Terhadap APBD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang ekuitas dana atau nilai kekayaan bersih. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum APBD disusun secara rasional dengan memerhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Realisasi Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung tahun 2015 sampai 2020 dengan rumus Realisasi belanja daerah dibagi anggaran belanja daerah dikali 100%.

Adapun Persentase belanja terhadap APBD Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9.**

Persentase Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten  
Temanggung  
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| <b>Tahun</b>                         | <b>2015</b>           | <b>2016</b>           | <b>2017</b>           | <b>2018</b>           | <b>2019</b>           | <b>2020</b>              |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Realisasi Belanja (Rp)               | 1.505.003.745.<br>055 | 1.739.541.988<br>.789 | 1.768.574.354<br>.911 | 1.670.309.285<br>.608 | 1.841.033.63<br>5.270 | 1.783.202.807.<br>598,00 |
| Anggaran Belanja Daerah (Rp)         | 1.729.185.922.<br>576 | 1.881.134.953<br>.956 | 1.841.286.645<br>.554 | 1.782.086.882<br>.170 | 1.946.665.37<br>8.928 | 1.903.418.786.<br>991,00 |
| Persentase Belanja terhadap APBD (%) | 87,04                 | 92,47                 | 96,05                 | 93,73                 | 94,57                 | 93,68                    |

Sumber : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung selama 5 (Lima) tahun meningkat dari 87,04% menjadi 94,57%, Sedangkan pada Tahun 2018 Persentase Belanja menurun menjadi 93,73 %. Belanja pada tahun 2018 menurun dipengaruhi oleh pendapatan transfer dari pusat yang menurun sehingga belanja juga menurun. Tahun 2020 capaian belanja sampai dengan Triwulan IV lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan dampak dari pandemi covid. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020, APBD Kabupaten Temanggung mengalami penyesuaian sehubungan dengan penanganan covid-19. Pendapatan baik pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengalami penurunan sehingga mempengaruhi alokasi belanja. Belanja mengalami refocusing dan realokasi untuk menangani covid dan belanja Perangkat Daerah capaiannya menurun dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

Rata-rata persentase Belanja terhadap APBD Kabupaten Temanggung periode 2015-2020 adalah sebesar 93 %. Terhadap capaian belanja yang menurun tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya untuk mendorong Perangkat Daerah agar segera melaksanakan target kinerja agar capaian belanja dan kinerja dapat tercapai sampai dengan akhir tahun anggaran.



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**LAPORAN RINCIAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

-162448190605

| Kode Rekening | Nama Rekening   | Anggaran             | Realisasi            | Bertambah (Berkurang) |        |
|---------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|--------|
|               |   |                      |                      | Rupiah                | (%)    |
| 4             | PENDAPATAN  | 1.789.293.083.624,00 | 1.830.789.907.558,00 | 41.496.823.934,00     | 2,32   |
| 41            | PENDAPATAN ASLI DAERAH  | 251.969.585.751,00   | 307.431.698.576,00   | 55.462.112.825,00     | 22,01  |
| 411           | Hasil Pajak Daerah  | 36.723.000.000,00    | 47.887.604.813,00    | 11.164.604.813,00     | 30,40  |
| 41101         | Pajak Hotel   | 150.000.000,00       | 170.636.594,00       | 20.636.594,00         | 13,78  |
| 41102         | Pajak Restoran  | 1.294.000.000,00     | 1.916.160.155,00     | 622.160.155,00        | 48,08  |
| 41103         | Pajak Hiburan   | 34.000.000,00        | 39.936.150,00        | 5.936.150,00          | 17,46  |
| 41104         | Pajak Reklame   | 300.000.000,00       | 519.430.836,00       | 219.430.836,00        | 73,14  |
| 41105         | Pajak Penerangan Jalan  | 15.500.000.000,00    | 15.932.617.325,00    | 432.617.325,00        | 2,79   |
| 41107         | Pajak Parkir  | 75.000.000,00        | 114.054.600,00       | 39.054.600,00         | 52,07  |
| 41108         | Pajak Air Tanah   | 270.000.000,00       | 272.188.236,00       | 2.188.236,00          | 0,81   |
| 41112         | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan                     | 10.100.000.000,00    | 12.765.965.103,00    | 2.665.965.103,00      | 26,40  |
| 41113         | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan                           | 9.000.000.000,00     | 16.156.615.814,00    | 7.156.615.814,00      | 79,52  |
| 412           | Hasil Retribusi Daerah  | 7.492.767.100,00     | 8.436.169.882,00     | 943.402.782,00        | 12,59  |
| 41201         | Retribusi Jasa Umum   | 5.351.802.250,00     | 5.719.411.972,00     | 367.609.722,00        | 6,87   |
| 41202         | Retribusi Jasa Usaha  | 729.928.350,00       | 1.162.595.760,00     | 432.667.410,00        | 59,28  |
| 41203         | Retribusi Perizinan Tertentu  | 1.411.036.500,00     | 1.554.162.150,00     | 143.125.650,00        | 10,14  |
| 413           | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan                   | 19.555.026.271,00    | 18.800.858.165,00    | (754.168.106,00)      | (3,86) |
| 41301         | Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD | 19.555.026.271,00    | 18.800.858.165,00    | (754.168.106,00)      | (3,86) |
| 414           | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah                           | 188.198.792.380,00   | 232.307.065.716,00   | 44.108.273.336,00     | 23,44  |
| 41401         | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan                   | 12.000.000,00        | 38.271.800,00        | 26.271.800,00         | 218,93 |
| 41402         | Jasa Giro   | 2.904.180.034,00     | 2.682.531.338,00     | (221.648.696,00)      | (7,63) |
| 41403         | Pendapatan Bunga Deposito   | 3.270.533.582,00     | 5.357.372.256,00     | 2.086.838.674,00      | 63,81  |
| 41404         | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah                                      | 5.000.000,00         | 21.000.000,00        | 16.000.000,00         | 320,00 |
| 41407         | Pendapatan Denda Pajak  | 10.000.000,00        | 31.043.819,00        | 21.043.819,00         | 210,44 |
| 41408         | Pendapatan Denda Retribusi  | 0,00                 | 6.885.000,00         | 6.885.000,00          | 100,00 |
| 41410         | Pendapatan dari Pengembalian  | 1.589.384.317,00     | 2.810.979.230,00     | 1.221.594.913,00      | 76,86  |
| 41415         | Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)                         | 178.249.945.947,00   | 219.089.857.973,00   | 40.839.912.026,00     | 22,91  |
| 41417         | Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan            | 2.157.748.500,00     | 2.269.124.300,00     | 111.375.800,00        | 5,16   |
| 41418         | Pendapatan Denda Pelanggaran  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00   |
| 42            | DANA PERIMBANGAN  | 1.051.153.212.299,00 | 1.046.567.778.773,00 | (4.585.433.526,00)    | (0,44) |
| 421           | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                        | 51.012.781.000,00    | 52.880.696.555,00    | 1.867.915.555,00      | 3,66   |
| 42101         | Bagi Hasil Pajak  | 49.051.299.000,00    | 51.081.093.306,00    | 2.029.794.306,00      | 4,14   |
| 42102         | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam                             | 1.961.482.000,00     | 1.799.603.249,00     | (161.878.751,00)      | (8,25) |

|       |  |                      |                      |                      |         |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 422   | Dana Alokasi Umum  | 770.269.689.000,00   | 762.027.309.000,00   | (8.242.380.000,00)   | (1,07)  |
| 42201 | Dana Alokasi Umum (DAU)  | 737.916.187.000,00   | 737.916.187.000,00   | 0,00                 | 0,00    |
| 42202 | Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan   | 32.353.502.000,00    | 24.111.122.000,00    | (8.242.380.000,00)   | (25,48) |
| 423   | Dana Alokasi Khusus  | 229.870.742.299,00   | 231.659.773.218,00   | 1.789.030.919,00     | 0,78    |
| 42301 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler  | 39.620.675.000,00    | 37.588.938.737,00    | (2.031.736.263,00)   | (5,13)  |
| 42302 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik                                      | 174.292.412.299,00   | 186.392.326.659,00   | 12.099.914.360,00    | 6,94    |
| 42303 | Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan                                      | 15.957.655.000,00    | 7.678.507.822,00     | (8.279.147.178,00)   | (51,88) |
| 43    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                     | 486.170.285.574,00   | 476.790.430.209,00   | (9.379.855.365,00)   | (1,93)  |
| 431   | Pendapatan Hibah   | 79.509.964.574,00    | 71.776.230.000,00    | (7.733.734.574,00)   | (9,73)  |
| 43106 | Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)                  | 79.509.964.574,00    | 71.776.230.000,00    | (7.733.734.574,00)   | (9,73)  |
| 433   | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya        | 94.500.000.000,00    | 94.165.118.971,00    | (334.881.029,00)     | (0,35)  |
| 43301 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi                                      | 94.500.000.000,00    | 94.165.118.971,00    | (334.881.029,00)     | (0,35)  |
| 434   | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                      | 56.311.496.000,00    | 56.311.496.000,00    | 0,00                 | 0,00    |
| 43403 | Dana Insentif Daerah   | 56.311.496.000,00    | 56.311.496.000,00    | 0,00                 | 0,00    |
| 435   | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya            | 7.967.000.000,00     | 6.655.760.238,00     | (1.311.239.762,00)   | (16,46) |
| 43501 | Bantuan Keuangan dari Provinsi   | 7.967.000.000,00     | 6.655.760.238,00     | (1.311.239.762,00)   | (16,46) |
| 436   | Dana Desa  | 247.881.825.000,00   | 247.881.825.000,00   | 0,00                 | 0,00    |
| 43601 | Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN                               | 247.881.825.000,00   | 247.881.825.000,00   | 0,00                 | 0,00    |
|       | Jumlah Pendapatan  | 1.789.293.083.624,00 | 1.830.789.907.558,00 | 41.496.823.934,00    | 2,32    |
| 5     | BELANJA  | 1.903.418.786.991,00 | 1.783.202.807.598,00 | (120.215.979.393,00) | (6,32)  |
| 51    | BELANJA TIDAK LANGSUNG   | 1.270.761.798.151,00 | 1.213.287.179.823,00 | (57.474.618.328,00)  | (4,52)  |
| 511   | BELANJA PEGAWAI  | 716.635.962.801,00   | 671.072.509.371,00   | (45.563.453.430,00)  | (6,36)  |
| 51101 | Belanja Gaji dan Tunjangan   | 622.050.103.778,00   | 580.973.511.613,00   | (41.076.592.165,00)  | (6,60)  |
| 51102 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS   | 85.135.900.000,00    | 81.442.659.929,00    | (3.693.240.071,00)   | (4,34)  |
| 51103 | Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH      | 6.522.000.000,00     | 6.521.788.000,00     | (212.000,00)         | (0,00)  |
| 51105 | Insentif Pemungutan Pajak Daerah   | 2.175.000.000,00     | 1.705.150.000,00     | (469.850.000,00)     | (21,60) |
| 51106 | Insentif Pemungutan Retribusi Daerah                                     | 752.959.023,00       | 429.399.829,00       | (323.559.194,00)     | (42,97) |
| 514   | BELANJA HIBAH  | 71.157.887.850,00    | 68.809.177.692,00    | (2.348.710.158,00)   | (3,30)  |
| 51405 | Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi                            | 71.157.887.850,00    | 68.809.177.692,00    | (2.348.710.158,00)   | (3,30)  |
| 515   | BELANJA BANTUAN SOSIAL   | 8.782.520.000,00     | 7.162.252.000,00     | (1.620.268.000,00)   | (18,45) |
| 51501 | Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan           | 1.112.520.000,00     | 835.152.000,00       | (277.368.000,00)     | (24,93) |
| 51502 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat                        | 25.000.000,00        | 25.000.000,00        | 0,00                 | 0,00    |
| 51503 | Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat                         | 7.645.000.000,00     | 6.302.100.000,00     | (1.342.900.000,00)   | (17,57) |
| 516   | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa  | 6.502.600.000,00     | 6.484.504.647,00     | (18.095.353,00)      | (0,28)  |
| 51603 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa                 | 4.810.600.000,00     | 4.810.600.000,00     | 0,00                 | 0,00    |
| 51605 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa               | 1.692.000.000,00     | 1.673.904.647,00     | (18.095.353,00)      | (1,07)  |
| 517   | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa | 411.446.563.600,00   | 409.802.732.000,00   | (1.643.831.600,00)   | (0,40)  |
| 51703 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa                                     | 411.446.563.600,00   | 409.802.732.000,00   | (1.643.831.600,00)   | (0,40)  |
| 518   | Belanja Tidak Terduga  | 56.236.263.900,00    | 49.956.004.113,00    | (6.280.259.787,00)   | (11,17) |
| 51801 | Belanja Tidak Terduga  | 56.236.263.900,00    | 49.956.004.113,00    | (6.280.259.787,00)   | (11,17) |
| 52    | BELANJA LANGSUNG   | 632.656.988.840,00   | 569.915.627.775,00   | (62.741.361.065,00)  | (9,92)  |
| 521   | BELANJA PEGAWAI  | 132.227.665.531,00   | 122.876.914.568,00   | (9.350.750.963,00)   | (7,07)  |
| 52101 | Honorarium PNS   | 10.580.863.000,00    | 8.298.660.800,00     | (2.282.202.200,00)   | (21,57) |
| 52102 | Honorarium Non PNS   | 83.070.908.941,00    | 80.469.550.910,00    | (2.601.358.031,00)   | (3,13)  |
| 52103 | Uang Lembur  | 1.413.822.272,00     | 1.078.486.073,00     | (335.336.199,00)     | (23,72) |
| 52104 | Belanja Pegawai BOS  | 19.947.133.118,00    | 18.397.082.018,00    | (1.550.051.100,00)   | (7,77)  |
| 52105 | Belanja Pegawai BLUD   | 13.818.438.200,00    | 11.760.634.767,00    | (2.057.803.433,00)   | (14,89) |
| 52106 | Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat                      | 3.396.500.000,00     | 2.872.500.000,00     | (524.000.000,00)     | (15,43) |
| 522   | BELANJA BARANG DAN JASA  | 384.614.415.039,00   | 344.955.658.684,00   | (39.658.756.355,00)  | (10,31) |
| 52201 | Belanja Bahan Pakai Habis  | 12.363.035.687,00    | 10.988.071.456,00    | (1.374.964.231,00)   | (11,12) |
| 52202 | Belanja Bahan/Material   | 31.808.207.250,00    | 30.154.477.004,00    | (1.653.730.246,00)   | (5,20)  |
| 52203 | Belanja Jasa Kantor  | 30.865.962.488,00    | 34.602.036.846,00    | 3.736.074.358,00     | 12,10   |
| 52204 | Belanja Premi Asuransi   | 23.013.244.671,00    | 18.321.970.908,00    | (4.691.273.763,00)   | (20,39) |
| 52205 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor                                     | 3.066.314.758,00     | 2.793.220.808,00     | (273.093.950,00)     | (8,91)  |
| 52206 | Belanja Cetak dan Penggandaan  | 6.188.610.092,00     | 5.491.094.369,00     | (697.515.723,00)     | (11,27) |
| 52207 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir                                  | 1.606.080.000,00     | 1.187.453.427,00     | (418.626.573,00)     | (26,07) |
| 52208 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas  | 232.620.000,00       | 187.041.000,00       | (45.579.000,00)      | (19,59) |
| 52209 | Belanja Sewa Alat Berat  | 360.853.500,00       | 337.062.150,00       | (23.791.350,00)      | (6,59)  |
| 52210 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor                           | 2.131.421.300,00     | 1.850.105.980,00     | (281.315.320,00)     | (13,20) |
| 52211 | Belanja Makanan dan Minuman  | 15.858.445.327,00    | 11.933.023.555,00    | (3.925.421.772,00)   | (24,75) |
| 52212 | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya                                     | 1.822.297.200,00     | 1.614.433.305,00     | (207.863.895,00)     | (11,41) |
| 52213 | Belanja Pakaian Kerja  | 922.714.500,00       | 602.255.600,00       | (320.458.900,00)     | (34,73) |
| 52214 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu                            | 1.090.262.900,00     | 1.057.498.500,00     | (32.764.400,00)      | (3,01)  |
| 52215 | Belanja Perjalanan Dinas   | 28.896.756.967,00    | 22.954.080.706,00    | (5.942.676.261,00)   | (20,57) |
| 52216 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS  | 10.000.000,00        | 8.000.000,00         | (2.000.000,00)       | (20,00) |
| 52217 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis              | 4.929.145.000,00     | 3.470.527.984,00     | (1.458.617.016,00)   | (29,59) |
| 52220 | Belanja Pemeliharaan   | 4.350.279.900,00     | 4.164.771.979,00     | (185.507.921,00)     | (4,26)  |
| 52221 | Belanja Jasa Konsultansi   | 2.595.628.900,00     | 2.442.140.300,00     | (153.488.600,00)     | (5,91)  |
| 52222 | Belanja Barang dan Jasa BOS  | 35.957.740.891,00    | 28.886.074.413,00    | (7.071.666.478,00)   | (19,67) |
| 52223 | Belanja Barang dan Jasa BLUD   | 158.947.788.093,00   | 145.767.338.546,00   | (13.180.449.547,00)  | (8,29)  |
| 52224 | Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga       | 16.047.469.615,00    | 15.155.504.948,00    | (891.964.667,00)     | (5,56)  |
| 52225 | Belanja Kepesertaan  | 1.549.536.000,00     | 987.474.900,00       | (562.061.100,00)     | (36,27) |

|       |   | 1.075.000.000,00     | 507.474.500,00       | (567.525.500,00)     | (52,21) |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| 5220  | BELANJA MODAL   | 115.814.908.270,00   | 102.083.054.523,00   | (13.731.853.747,00)  | (11,86) |
| 52301 | Belanja Modal Pengadaan Tanah   | 99.999.200,00        | 93.448.300,00        | (6.550.900,00)       | (6,55)  |
| 52302 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00    |
| 52303 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor             | 4.105.483.500,00     | 3.896.630.500,00     | (208.853.000,00)     | (5,09)  |
| 52304 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor       | 33.000.000,00        | 21.600.000,00        | (11.400.000,00)      | (34,55) |
| 52309 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan | 237.880.448,00       | 214.980.699,00       | (22.899.749,00)      | (9,63)  |
| 52310 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor                              | 228.846.200,00       | 222.633.000,00       | (6.213.200,00)       | (2,72)  |
| 52311 | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor                           | 1.569.645.066,00     | 1.545.031.148,00     | (24.613.918,00)      | (1,57)  |
| 52312 | Belanja Modal Pengadaan Komputer                                      | 6.944.743.913,00     | 6.747.957.087,00     | (196.786.826,00)     | (2,83)  |
| 52313 | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair                                     | 543.450.200,00       | 529.505.700,00       | (13.944.500,00)      | (2,57)  |
| 52314 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur                               | 174.234.700,00       | 166.401.175,00       | (7.833.525,00)       | (4,50)  |
| 52315 | Belanja Modal Pengadaan Pengehias Ruangan Rumah Tangga                | 401.390.330,00       | 366.149.776,00       | (35.240.554,00)      | (8,78)  |
| 52316 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio                              | 340.504.800,00       | 329.958.999,00       | (10.545.801,00)      | (3,10)  |
| 52317 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi                          | 173.662.000,00       | 162.854.000,00       | (10.808.000,00)      | (6,22)  |
| 52318 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur                                | 24.933.200,00        | 24.933.200,00        | 0,00                 | 0,00    |
| 52319 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran                          | 8.323.678.050,00     | 10.461.780.939,00    | 2.138.102.889,00     | 25,69   |
| 52320 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium                        | 1.087.668.000,00     | 883.695.553,00       | (203.972.447,00)     | (18,75) |
| 52321 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan                              | 8.852.798.801,00     | 7.929.293.489,00     | (923.505.312,00)     | (10,43) |
| 52322 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan                           | 685.000,00           | 685.000,00           | 0,00                 | 0,00    |
| 52323 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air                       | 7.221.363.000,00     | 6.385.289.952,00     | (836.073.048,00)     | (11,58) |
| 52324 | Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota        | 7.012.742.000,00     | 263.182.100,00       | (6.749.559.900,00)   | (96,25) |
| 52325 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00    |
| 52326 | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan               | 27.222.526.919,00    | 25.866.946.867,00    | (1.355.580.052,00)   | (4,98)  |
| 52327 | Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan                              | 57.340.000,00        | 57.070.000,00        | (270.000,00)         | (0,47)  |
| 52328 | Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, dan Kebudayaan      | 538.315.000,00       | 336.893.120,00       | (201.421.880,00)     | (37,42) |
| 52330 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan               | 11.800.000,00        | 11.800.000,00        | 0,00                 | 0,00    |
| 52331 | Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan                                | 426.145.000,00       | 235.848.550,00       | (190.296.450,00)     | (44,66) |
| 52332 | Belanja Modal BOS   | 29.385.732.285,00    | 25.722.157.105,00    | (3.663.575.180,00)   | (12,47) |
| 52333 | Belanja Modal BLUD  | 10.796.340.658,00    | 9.606.328.264,00     | (1.190.012.394,00)   | (11,02) |
|       | Jumlah Belanja  | 1.903.418.786.991,00 | 1.783.202.807.598,00 | (120.215.979.393,00) | (6,32)  |
|       | Surplus (Defisit)   | (114.125.703.367,00) | 47.587.099.960,00    | 6.090.276.026,00     | 0,00    |

|       |   |                    |                    |                  |         |
|-------|---|--------------------|--------------------|------------------|---------|
| 6     | PEMBIAYAAN DAERAH   | 124.762.072.830,00 | 124.749.267.292,00 | (12.805.538,00)  | (0,01)  |
| 61    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH                                      | 124.762.072.830,00 | 124.749.267.292,00 | (12.805.538,00)  | (0,01)  |
| 611   | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) | 123.395.072.830,00 | 123.395.072.830,00 | 0,00             | 0,00    |
| 61104 | Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya                      | 123.395.072.830,00 | 123.395.072.830,00 | 0,00             | 0,00    |
| 616   | Penerimaan Piutang Daerah   | 0,00               | 106.875.000,00     | 106.875.000,00   | 100,00  |
| 61606 | Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir                        | 0,00               | 106.875.000,00     | 106.875.000,00   | 100,00  |
| 617   | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga                               | 1.367.000.000,00   | 1.247.319.462,00   | (119.680.538,00) | (8,75)  |
| 61701 | Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga                               | 1.367.000.000,00   | 1.247.319.462,00   | (119.680.538,00) | (8,75)  |
|       | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                                      | 124.762.072.830,00 | 124.749.267.292,00 | (12.805.538,00)  | (0,01)  |
| 6     | PEMBIAYAAN DAERAH   | 10.636.369.463,00  | 9.888.176.647,00   | (748.192.816,00) | (7,03)  |
| 62    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH                                     | 10.636.369.463,00  | 9.888.176.647,00   | (748.192.816,00) | (7,03)  |
| 622   | Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah                     | 5.000.000.000,00   | 4.171.840.542,00   | (828.159.458,00) | (16,56) |
| 62202 | Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)                                   | 5.000.000.000,00   | 4.171.840.542,00   | (828.159.458,00) | (16,56) |
| 625   | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga                              | 5.636.369.463,00   | 5.716.336.105,00   | 79.966.642,00    | 1,42    |
| 62501 | Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga                              | 5.636.369.463,00   | 5.716.336.105,00   | 79.966.642,00    | 1,42    |
|       | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                     | 10.636.369.463,00  | 9.888.176.647,00   | (748.192.816,00) | (7,03)  |
|       | Pembiayaan Netto  | 114.125.703.367,00 | 114.861.090.645,00 | (735.387.278,00) | 0,00    |
|       | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)                            | 0,00               | 162.448.190.605,00 | 0,00             | 0,00    |

\*Data LRA sd 31 Desember 2020 upload dari aplikasi tanggal 16 Februari 2021 jam 07.24.

## 10. Prosentase Konsistensi Penganggaran Terhadap Perencanaan

Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki peran penting dan menjadi satu rangkaian dalam rencana kerja suatu pemerintah daerah. (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019)

Penganggaran diawali dengan penyusunan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) setelah diketahui informasi berapa jumlah anggaran yang tersedia. PPAS berfungsi sebagai dokumen untuk merancang APBD yang menjembatani antara perencanaan (RKPD) dengan kebijakan dan rancangan anggaran yang berdasar pada ketersediaan atau pagu anggaran.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan adalah kesesuaian nama kegiatan yang ada dalam penganggaran, yang sama dengan nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dibandingkan dengan jumlah total nama kegiatan yang ada dalam perencanaan.

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja Pemerintah Daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Konsistensi penganggaran terhadap perencanaan dihitung dengan rumus jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran dibagi dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dikali seratus persen.

Rumusnya adalah Jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran dibagi dengan jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan dikali seratus.

Adapun Persentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan Tahun 2015-2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.  
 Persentase Konsistensi Penganggaran terhadap Perencanaan  
 Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| Uraian  | Tahun |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| Jumlah nama kegiatan yang sama dalam perencanaan dan penganggaran | 3750  | 3758  | 1810  | 1859  | 2.754 | 2.862 |
| jumlah nama kegiatan yang ada dalam perencanaan                   | 4525  | 4400  | 2200  | 2175  | 2.815 | 2.966 |
| Persentase konsistensi penganggaran terhadap perencanaan (%)      | 82,87 | 84,41 | 81,73 | 85,47 | 97,83 | 96,49 |

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Di tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup besar yaitu menjadi 97,83% dan 96,49% hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi. Namun kalau dihitung secara rata-rata konsistensi penganggaran terhadap perencanaan di Kabupaten Temanggung selama 6 tahun (2015-2020) adalah sebesar 88,13%. Angka tersebut menunjukkan bahwa konsistensi penganggaran terhadap perencanaan masih perlu diperhatikan dan dibutuhkan komitmen dari semua pihak yang berkepentingan untuk peningkatannya.

Upaya untuk meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran melalui sistem yang terintegrasi masih harus terus ditingkatkan, sehingga antara perencanaan dan penganggaran sudah tidak terjadi lagi inkonsistensi. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tersebut juga mempengaruhi capaian target kinerja suatu organisasi, dengan kata lain bahwa semakin tinggi realisasi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran menggambarkan pencapaian rencana dengan tingkat capaian yang semakin baik.

## 11. Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu

Dokumen penganggaran adalah semua rangkaian proses dalam penyusunan APBD sampai dengan disahkannya APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen penganggaran dimulai dengan menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS yang dibuat berdasarkan RKPD, selanjutnya disampaikan kepada DPRD pada minggu ke-2 bulan Juni, dibahas dan disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh bupati dan pimpinan DPRD, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Kepala Daerah berdasarkan nota kesepakatan tersebut menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai pedoman kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD pada minggu pertama bulan Agustus. (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019).

Selanjutnya berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD yang dikeluarkan oleh bupati tersebut, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD yang telah disusun, dibahas dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digunakan sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Setelah Rancangan APBD jadi, maka Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Setelah dievaluasi oleh gubernur, Rancangan APBD disahkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Persentase dokumen penganggaran tepat waktu dihitung dengan cara yaitu jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu di bagi dengan total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan dikali seratus persen.

Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu dalam penyusunan APBD di Kabupaten Temanggung selama 6 tahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11.  
Persentase Dokumen Penganggaran Tepat Waktu  
Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| Uraian   | Tahun |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu         | 3     | 2     | 3     | 3     | 4     | 6     |
| total jumlah dokumen penganggaran yang di rencanakan | 7     | 7     | 7     | 7     | 7     | 7     |
| Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu          | 42,86 | 28,57 | 42,86 | 42,86 | 57,14 | 85,71 |

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase dokumen penganggaran tepat waktu pada tahun 2020 (sampai dengan Triwulan IV) sebesar 85,71% atau mengalami peningkatan sebesar 28,54% dibanding tahun 2019. Realisasi dokumen penganggaran yang tepat waktu sebanyak 6 (enam) dokumen dari 7 (tujuh) dokumen yang direncanakan. Terdapat 1 (satu) dokumen yang belum tepat waktu yaitu penyampaian RAPBD kepada DPRD, hal ini disebabkan oleh keterlambatan beberapa SKPD pengampu kegiatan dalam meng-input rencana kerja dan kegiatan pada aplikasi *e-budgeting*. Tindak lanjutnya perlu asistensi kepada SKPD pada saat jadwal *input e-budgeting*.

Data Dokumen Penganggaran kabupaten Temanggung  
Tahun 2015-020 s.d Triwulan IV

| No | Dokumen<br>Penganggaran  | T A H U N |      |      |      |      |      | %     |
|----|--|-----------|------|------|------|------|------|-------|
|    |  | 2015      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |       |
| 1  | Penyampaian Rancangan KUA & PPAS kepada DPRD                         | x         | x    | x    | x    | √    | √    | 33,33 |
| 2  | Kesepakatan KUA & PPAS   | x         | x    | x    | x    | x    | √    | 16,67 |
| 3  | Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA                   | x         | x    | x    | x    | x    | √    | 16,67 |
| 4  | Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD                               | x         | x    | x    | x    | x    | x    | 0,00  |
| 5  | Persetujuan Bersama antara DPRD dengan Bupati tentang Rancangan APBD | √         | x    | √    | √    | √    | √    | 83,34 |
| 6  | Penyampaian Rancangan APBD kepada Gubernur                           | √         | √    | √    | √    | √    | √    | 100   |
| 7  | Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD                              | √         | √    | √    | √    | √    | √    | 100   |

Sumber Data : Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Keterangan:√ = Tepat waktu

X = Tidak tepat waktu

Keterangan : Tidak bisa diganti angka karena parameternya/tolok ukurnya beda.

## 12. Prosentase Penerbitan SP2D Yang Tepat Waktu.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SPM (Surat Perintah Membayar) (sumber : Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung TA 2020).

Penerbitan SP2D disebut tepat waktu apabila diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterima dan dinyatakan lengkap/memenuhi syarat pengajuan SPM sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Untuk memperoleh angka prosentase penerbitan SP2D tepat waktu, dengan rumus : jumlah total SP2D yang dicairkan tepat waktu dibagi dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan dikali 100%.

Adapun Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12.1.  
Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu  
2015-2020 s.d Triwulan IV

| Tahun                                      | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Total SP2D yang dicairkan tepat waktu (%)  | 5.338 | 5.005 | 5.118 | 6.754 | 7.735 | 8.566 |
| Total SP2D yang diterbitkan (%)            | 5.338 | 5.005 | 5.118 | 6.754 | 7.735 | 8.566 |
| Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu (%) | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 6 tahun berturut-turut SP2D diterbitkan tepat waktu karena setiap ada pengajuan SPM segera mungkin diverifikasi dan segera diproses setelah dokumen dinyatakan lengkap.

Adapun data penerbitan SP2D Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12.2.  
Data Penerimaan SPM dan Penerbitan SP2D Tahun 2020 s.d Triwulan IV

| NO | NAMA OPD  | JUMLAH SPM | JUMLAH SP2D |
|----|---|------------|-------------|
| 1  | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga                   | 339        | 339         |
| 2  | Dinas Kesehatan   | 308        | 308         |
| 3  | Puskesmas Rejosari                                      | 20         | 20          |
| 4  | Puskesmas Dharma Rini                                   | 18         | 18          |
| 5  | Puskesmas Bulu  | 20         | 20          |
| 6  | Puskesmas Tembarak                                      | 22         | 22          |
| 7  | Puskesmas Selopampang                                   | 21         | 21          |
| 8  | Puskesmas Temanggung                                    | 22         | 22          |
| 9  | Puskesmas Kranggan                                      | 24         | 24          |
| 10 | Puskesmas Tlogomulyo                                    | 24         | 24          |
| 11 | Puskesmas Pringsurat                                    | 21         | 21          |
| 12 | Puskesmas Kaloran                                       | 21         | 21          |
| 13 | Puskesmas Kandangan                                     | 22         | 22          |
| 14 | Puskesmas Kedu  | 20         | 20          |
| 15 | Puskesmas Parakan                                       | 22         | 22          |
| 16 | Puskesmas Bansari                                       | 21         | 21          |
| 17 | Puskesmas Kledung                                       | 24         | 24          |
| 18 | Puskesmas Ngadirejo                                     | 20         | 20          |
| 19 | Puskesmas Jumo  | 24         | 24          |
| 20 | Puskesmas Gemawang                                      | 18         | 18          |
| 21 | Puskesmas Tretep  | 21         | 21          |
| 22 | Puskesmas Candiroto                                     | 22         | 22          |
| 23 | Puskesmas Bejen   | 21         | 21          |
| 24 | Puskesmas Tepusen                                       | 22         | 22          |
| 25 | Puskesmas Traji   | 20         | 20          |
| 26 | Puskesmas Pare  | 23         | 23          |
| 27 | Puskesmas Wonoboyo                                      | 22         | 22          |
| 28 | Puskesmas Banjarsari                                    | 19         | 19          |
| 29 | Rumah Sakit Umum Daerah                                 | 58         | 58          |
| 30 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman | 596        | 596         |
| 31 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran        | 98         | 98          |

|    |   |     |     |
|----|---|-----|-----|
| 32 | Dinas Sosial  | 125 | 125 |
| 33 | Dinas Tenaga Kerja  | 115 | 115 |
| 34 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA                        | 77  | 77  |
| 35 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                              | 298 | 298 |
| 36 | Dinas Lingkungan Hidup  | 143 | 143 |
| 37 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           | 118 | 118 |
| 38 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                            | 168 | 168 |
| 39 | Dinas Perhubungan   | 170 | 170 |
| 40 | Dinas Komunikasi dan Informatika                                  | 175 | 175 |
| 41 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM                   | 229 | 229 |
| 42 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            | 95  | 95  |
| 43 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                   | 136 | 136 |
| 44 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                  | 109 | 109 |
| 45 | Dinas Perikanan dan Peternakan                                    | 103 | 103 |
| 46 | Inspektorat   | 65  | 65  |
| 47 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 211 | 211 |
| 48 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah            | 239 | 239 |
| 49 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | 93  | 93  |
| 49 | Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah                            | 752 | 752 |
| 50 | Bupati dan Wakil Bupati   | 21  | 21  |
| 51 | Bagian Pemerintahan   | 7   | 7   |
| 52 | Bagian Hukum  | 7   | 7   |
| 53 | Bagian Perekonomian   | 7   | 7   |
| 54 | Bagian Pembangunan  | 5   | 5   |
| 55 | Bagian Kesejahteraan Rakyat                                       | 15  | 15  |
| 56 | Bagian Umum   | 168 | 168 |
| 57 | Bagian Organisasi dan Tata Laksana                                | 9   | 9   |
| 58 | Bagian Hubungan Masyarakat  | 80  | 80  |
| 59 | Bagian pengadaan Barang dan Jasa                                  | 36  | 36  |
| 60 | Sekretariat DPRD  | 118 | 118 |
| 61 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                                    | 52  | 52  |
| 62 | Badan Penanggulangan Bencana                                      | 124 | 124 |

|    | Daerah                      |    |    |
|----|-----------------------------|----|----|
| 63 | Kesatuan Bangsa dan Politik | 65 | 65 |
| 64 | Kecamatan Temanggung        | 75 | 75 |
| 65 | Kelurahan Temanggung I      | 48 | 48 |
| 66 | Kelurahan Temanggung II     | 54 | 54 |
| 67 | Kelurahan Butuh             | 54 | 54 |
| 68 | Kelurahan Jampiroso         | 40 | 40 |
| 69 | Kelurahan Jampirejo         | 41 | 41 |
| 70 | Kelurahan Kertosari         | 47 | 47 |
| 71 | Kelurahan Banyuurip         | 54 | 54 |
| 72 | Kelurahan Kowangan          | 49 | 49 |
| 73 | Kelurahan Jurang            | 54 | 54 |
| 74 | Kelurahan Tlogorejo         | 36 | 36 |
| 75 | Kelurahan Kebonsari         | 62 | 62 |
| 76 | Kelurahan Manding           | 54 | 54 |
| 77 | Kelurahan Mungseng          | 50 | 50 |
| 78 | Kelurahan Purworejo         | 47 | 47 |
| 79 | Kelurahan Giyanti           | 45 | 45 |
| 80 | Kelurahan Madureso          | 38 | 38 |
| 81 | Kelurahan Sidorejo          | 50 | 50 |
| 82 | Kelurahan Walitelon Selatan | 53 | 53 |
| 83 | Kelurahan Walitelon Utara   | 50 | 50 |
| 84 | Kecamatan Tembarak          | 71 | 71 |
| 85 | Kecamatan Pringsurat        | 74 | 74 |
| 86 | Kecamatan Kaloran           | 78 | 78 |
| 87 | Kecamatan Parakan           | 83 | 83 |
| 88 | Kelurahan Parakan Kauman    | 40 | 40 |
| 89 | Kelurahan Parakan Wetan     | 36 | 36 |
| 90 | Kecamatan Bulu              | 78 | 78 |
| 91 | Kecamatan Kedu              | 70 | 70 |
| 92 | Kecamatan Kandangan         | 65 | 65 |
| 93 | Kecamatan Candiroto         | 59 | 59 |
| 94 | Kecamatan Ngadirejo         | 74 | 74 |
| 95 | Kelurahan Manggong          | 39 | 39 |
| 96 | Kecamatan Jumo              | 52 | 52 |
| 97 | Kecamatan Wonoboyo          | 72 | 72 |
| 98 | Kecamatan Kranggan          | 72 | 72 |

|     |                       |       |       |
|-----|-----------------------|-------|-------|
| 99  | Kelurahan Kranggan    | 35    | 35    |
| 100 | Kecamatan Bejen       | 75    | 75    |
| 101 | Kecamatan Kledung     | 76    | 76    |
| 102 | Kecamatan Bansari     | 69    | 69    |
| 103 | Kecamatan Tlogomulyo  | 67    | 67    |
| 104 | Kecamatan Selopampang | 64    | 64    |
| 105 | Kecamatan Gemawang    | 59    | 59    |
| 106 | Kecamatan Tretep      | 69    | 69    |
|     | JUMLAH                | 8.566 | 8.566 |

Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan Tahun 2020

**CEK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPM LS UNTUK BARANG/JASA/MODAL/BTL  
NON BELANJA PEGAWAI**

| NO  | DOKUMEN   | ADA | TIDAK ADA |
|-----|---|-----|-----------|
| 1.  | FORM SPP-LS   |     |           |
| 2.  | SALINAN DPA/DPPA YANG DIBERLAKUKAN SEBAGAI SPD                    |     |           |
| 3.  | SSP PPN DAN PPH YANG TELAH DITANDATANGANI                         |     |           |
| 4.  | SPK   |     |           |
| 5.  | SURAT KETERANGAN NO.REK BANK PIHAK KETIGA/ FOTOCOPY BUKU REKENING |     |           |
| 6.  | BA PENYELESAIAN PEKERJAAN   |     |           |
| 7.  | BA SERAH TERIMA BARANG  |     |           |
| 8.  | BA PEMBAYARAN   |     |           |
| 9.  | KUITANSI BERMETERAI CUKUP   |     |           |
| 10. | JAMINAN UANG MUKA   |     |           |
| 11. | BA PEMERIKSAAN PEKERJAAN  |     |           |
| 12. | SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN DENDA KETERLAMBATAN                   |     |           |
| 13. | INVOICE   |     |           |
| 14. | DOKUMEN LAIN YANG DIPERSYARATKAN                                  |     |           |
| 15. | SPTJ PENYEDIA   |     |           |
| 16. | SPTJ PPTK / PPK   |     |           |
| 17. | SPTJ PA   |     |           |
| 18. | NPHD  |     |           |

VERIFIKATOR

Tabel 12.3.  
REKAPITULASI PENERBITAN SP2D YANG TEPAT WAKTU PER BULAN  
PADA TAHUN 2020

| NO. | BULAN   | SPM | SP2D TEPAT WAKTU |
|-----|---------|-----|------------------|
| 1   | JANUARI | 471 | 464              |

|    |           |       |       |
|----|-----------|-------|-------|
| 2  | PEBRUARI  | 426   | 426   |
| 3  | MARET     | 668   | 527   |
| 4  | APRIL     | 516   | 516   |
| 5  | MEI       | 680   | 680   |
| 6  | JUNI      | 628   | 628   |
| 7  | JULI      | 769   | 766   |
| 8  | AGUSTUS   | 725   | 691   |
| 9  | SEPTEMBER | 571   | 608   |
| 10 | OKTOBER   | 745   | 765   |
| 11 | NOVEMBER  | 1.002 | 1.021 |
| 12 | DESEMBER  | 1.365 | 1.474 |
|    | Jumlah    | 8566  | 8566  |

*Sumber Data: Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan*

Berdasarkan Tabel 12.3 terdapat perbedaan data antara pengajuan SPM dengan terbitnya SP2D tepat waktu, hal ini dikarenakan pengajuan SPM yang telah dikoreksi (diverifikasi) belum ditindaklanjuti oleh SKPD sehingga atas ajuan SPM tersebut belum bisa diterbitkan SP2Dnya. Apabila koreksi pengajuan SPM sudah ditindaklanjuti oleh SKPD, dinyatakan benar dan lengkap oleh verifikator (BUD) maka SP2D akan diterbitkan, sebagaimana

ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020

**13 Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja**

Pengertian Pengelolaan administrasi aset yang akuntabel adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Pelaksanaan pengelolaan aset dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Siregar, 2004 )

Satuan kerja yang tertib adalah satuan kerja yang mengirim laporan SPJ Barang sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan laporan tersebut sesuai dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan dan penggunaan setiap bulan sesuai pedoman APBD.

Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah satuan kerja yang tertib dibagi jumlah satuan kerja dikali 100% .

Adapun Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13.1.  
Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| Tahun                           | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jumlah satuan kerja yang tertib | 55    | 61    | 130   | 134   | 136   | 137   |
| Jumlah satuan kerja             | 81    | 81    | 168   | 168   | 168   | 168   |
| Persentase (%)                  | 67,90 | 75,31 | 77,38 | 79,76 | 80,95 | 81,55 |

Sumber Data: Bidang Pengelolaan Aset Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas untuk Tahun 2020 Triwulan IV (Okt - Des), jumlah satuan kerja yang sudah tertib dalam pengelolaan administrasi aset yang akuntabel sebesar 81,55%. Hal ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019.

Adapun daftar pengelolaan administrasi aset yang akuntabel Tahun 2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13.2.  
Daftar Pengelolaan Administrasi Aset yang Akuntabel  
Tahun Anggaran 2020 s.d Triwulan IV

| No | Nama Satuan Kerja                      | Sudah Akuntabel |     |     | Belum Akuntabel |     |     |
|----|--|-----------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|
|    |  | bulan           |     |     | bulan           |     |     |
|    |  | Okt             | Nop | Des | Okt             | Nop | Des |
| 1  | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga |                 |     |     | V               | V   | V   |
| 2  | Koorwilcam Temanggung                  |                 |     |     | V               | V   | V   |
| 3  | SMPN 1 Temanggung                      | V               | V   | V   |                 |     |     |
| 4  | SMPN 2 Temanggung                      | V               | V   | V   |                 |     |     |
| 5  | SMPN 3 Temanggung                      | V               | V   | V   |                 |     |     |
| 6  | SMPN 4 Temanggung                      |                 |     |     | V               | V   | V   |
| 7  | SMPN 5 Temanggung                      |                 |     |     | V               | V   | V   |
| 8  | SMPN 6 Temanggung                      |                 |     |     | V               | V   | V   |
| 9  | Koorwilcam Tembarak                    | V               | V   | V   |                 |     |     |
| 10 | SMPN 1 Tembarak                        |                 |     |     | V               | V   | V   |
| 11 | Koorwilcam Pringsurat                  | V               | V   | V   |                 |     |     |
| 12 | SMPN 1 Pringsurat                      |                 |     |     | V               | V   | V   |
| 13 | SMPN 2 Pringsurat                      | V               | V   | V   |                 |     |     |
| 14 | Koorwilcam Kaloran                     | V               | V   | V   |                 |     |     |
| 15 | SMPN 1 Kaloran                         |                 |     |     | V               | V   | V   |
| 16 | SMPN 2 Kaloran                         |                 |     |     | V               | V   | V   |
| 17 | SMPN 3 Kaloran                         |                 |     |     | V               | V   | V   |
| 18 | Koorwilcam Parakan                     | V               | V   | V   |                 |     |     |
| 19 | SMPN 1 Parakan                         | V               | V   | V   |                 |     |     |
| 20 | Koorwilcam Bulu                        | V               | V   | V   |                 |     |     |
| 21 | SMPN 1 Bulu                            |                 |     |     | V               | V   | V   |
| 22 | SMPN 2 Bulu                            |                 |     |     | V               | V   | V   |
| 23 | SMPN 3 Bulu                            |                 |     |     | V               | V   | V   |
| 24 | Koorwilcam Kedu                        | V               | V   | V   |                 |     |     |
| 25 | SMPN 1 Kedu                            | V               | V   | V   |                 |     |     |
| 26 | SMPN 2 Kedu                            |                 |     |     | V               | V   | V   |
| 27 | SMPN 3 Kedu                            | V               | V   | V   |                 |     |     |
| 28 | Koorwilcam Kandangan                   | V               | V   | V   |                 |     |     |
| 29 | SMPN 1 Kandangan                       | V               | V   | V   |                 |     |     |
| 30 | SMPN 2 Kandangan                       |                 |     |     | V               | V   | V   |
| 31 | SMPN 3 Kandangan                       |                 |     |     | V               | V   | V   |
| 32 | Koorwilcam Candiroto                   | V               | V   | V   |                 |     |     |
| 33 | SMPN 1 Candiroto                       | V               | V   | V   |                 |     |     |
| 34 | SMPN 2 Candiroto                       |                 |     |     | V               | V   | V   |

|    |                              |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Koorwilcam Ngadirejo         | V | V | V |   |   |   |
| 36 | SMPN 1 Ngadirejo             |   |   |   | V | V | V |
| 37 | SMPN 2 Ngadirejo             | V | V | V |   |   |   |
| 38 | Koorwilcam Jumo              |   |   |   | V | V | V |
| 39 | SMPN 1 Jumo                  | V | V | V |   |   |   |
| 40 | Koorwilcam Wonobojo          | V | V | V |   |   |   |
| 41 | SMPN 1 Wonobojo              |   |   |   | V | V | V |
| 42 | SMPN 2 Wonobojo              |   |   |   | V | V | V |
| 43 | Koorwilcam Kranggan          | V | V | V |   |   |   |
| 44 | SMPN 1 Kranggan              |   |   |   | V | V | V |
| 45 | SMPN 2 Kranggan              |   |   |   | V | V | V |
| 46 | Koorwilcam Bejen             | V | V | V |   |   |   |
| 47 | SMPN 1 Bejen                 | V | V | V |   |   |   |
| 48 | SMPN 2 Bejen                 |   |   |   | V | V | V |
| 49 | Koorwilcam Kledung           | V | V | V |   |   |   |
| 50 | SMPN 1 Kledung               | V | V | V |   |   |   |
| 51 | SMPN 2 Kledung               |   |   |   | V | V | V |
| 52 | Koorwilcam Bansari           |   |   |   | V | V | V |
| 53 | SMPN 1 Bansari               |   |   |   | V | V | V |
| 54 | Koorwilcam Tlogomulyo        | V | V | V |   |   |   |
| 55 | SMPN 1 Tlogomulyo            | V | V | V |   |   |   |
| 56 | SMPN 2 Tlogomulyo            |   |   |   | V | V | V |
| 57 | Koorwilcam Selopampang       | V | V | V |   |   |   |
| 58 | SMPN 1 Selopampang           | V | V | V |   |   |   |
| 59 | SMPN 2 Selopampang           | V | V | V |   |   |   |
| 60 | Koorwilcam Gemawang          | V | V | V |   |   |   |
| 61 | SMPN 1 Gemawang              | V | V | V |   |   |   |
| 62 | Koorwilcam Tretep            |   |   |   | V | V | V |
| 63 | SMPN 1 Tretep                |   |   |   | V | V | V |
| 64 | SKB                          |   |   |   | V | V | V |
| 65 | Dinas Kesehatan              | V | V | V |   |   |   |
| 66 | UPT Puskesmas<br>Temanggung  | V | V | V |   |   |   |
| 67 | UPT Puskesmas Tlogomulyo     | V | V | V |   |   |   |
| 68 | UPT Puskesmas Tembarak       | V | V | V |   |   |   |
| 69 | UPT Puskesmas<br>Selopampang | V | V | V |   |   |   |
| 70 | UPT Puskesmas Pringsurat     | V | V | V |   |   |   |
| 71 | UPT Puskesmas Kranggan       | V | V | V |   |   |   |
| 72 | UPT Puskesmas Pare           | V | V | V |   |   |   |
| 73 | UPT Puskesmas Parakan        | V | V | V |   |   |   |
| 74 | UPT Puskesmas Traji          | V | V | V |   |   |   |
| 75 | UPT Puskesmas Bulu           | V | V | V |   |   |   |
| 76 | UPT Puskesmas Ngadirejo      | V | V | V |   |   |   |
| 77 | UPT Puskesmas Kaloran        | V | V | V |   |   |   |
| 78 | UPT Puskesmas Tepusen        | V | V | V |   |   |   |
| 79 | UPT Puskesmas Candiroto      | V | V | V |   |   |   |
| 80 | UPT Puskesmas Bejen          | V | V | V |   |   |   |
| 81 | UPT Puskesmas Bansari        | V | V | V |   |   |   |
| 82 | UPT Puskesmas Wonobojo       | V | V | V |   |   |   |
| 83 | UPT Puskesmas Tretep         | V | V | V |   |   |   |

|     |   |   |   |   |  |  |  |
|-----|---|---|---|---|--|--|--|
| 84  | UPT Puskesmas Kedu                                      | V | V | V |  |  |  |
| 85  | UPT Puskesmas Kledung                                   | V | V | V |  |  |  |
| 86  | UPT Puskesmas Kandangan                                 | V | V | V |  |  |  |
| 87  | UPT Puskesmas Jumo                                      | V | V | V |  |  |  |
| 88  | UPT Puskesmas Gemawang                                  | V | V | V |  |  |  |
| 89  | UPT Puskesmas Dharma Rini                               | V | V | V |  |  |  |
| 90  | UPT Puskesmas Rejosari                                  | V | V | V |  |  |  |
| 91  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman | V | V | V |  |  |  |
| 92  | Dinas Sosial  | V | V | V |  |  |  |
| 93  | Dinas Tenaga Kerja                                      | V | V | V |  |  |  |
| 94  | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan P3A                | V | V | V |  |  |  |
| 95  | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan                    | V | V | V |  |  |  |
| 96  | Dinas Lingkungan Hidup                                  | V | V | V |  |  |  |
| 97  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                 | V | V | V |  |  |  |
| 98  | Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa                  | V | V | V |  |  |  |
| 99  | Dinas Perhubungan                                       | V | V | V |  |  |  |
| 100 | Dinas Komunikasi dan Informatika                        | V | V | V |  |  |  |
| 101 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM     | V | V | V |  |  |  |
| 102 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TSP                 | V | V | V |  |  |  |
| 103 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                         | V | V | V |  |  |  |
| 104 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                        | V | V | V |  |  |  |
| 105 | Dinas Peternakan dan Perikanan                          | V | V | V |  |  |  |
| 106 | Inspektorat   | V | V | V |  |  |  |
| 107 | BAPPEDA   | V | V | V |  |  |  |
| 108 | BPPKAD  | V | V | V |  |  |  |
| 109 | BKD dan Pengembangan SDM                                | V | V | V |  |  |  |
| 110 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                     | V | V | V |  |  |  |
| 111 | Pengelola   | V | V | V |  |  |  |
| 112 | Bagian Umum   | V | V | V |  |  |  |
| 113 | Bagian Humas  | V | V | V |  |  |  |
| 114 | Bagian Hukum  | V | V | V |  |  |  |
| 115 | Bagian Kesra  | V | V | V |  |  |  |
| 116 | Bagian Perekonomian                                     | V | V | V |  |  |  |
| 117 | Bagian Pembangunan                                      | V | V | V |  |  |  |
| 118 | Bagian Pemerintahan                                     | V | V | V |  |  |  |
| 119 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                        | V | V | V |  |  |  |

|     |   |   |   |   |  |  |  |
|-----|---|---|---|---|--|--|--|
| 120 | Bagian Organisasi dan Tata Laksana              | V | V | V |  |  |  |
| 121 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah      | V | V | V |  |  |  |
| 122 | Rumah Sakit Umum Daerah                         | V | V | V |  |  |  |
| 123 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik              | V | V | V |  |  |  |
| 124 | Satuan Polisi Pamong Praja dan PemadamKebakaran | V | V | V |  |  |  |
| 125 | Kecamatan Temanggung                            | V | V | V |  |  |  |
| 126 | Kelurahan Temanggung I                          | V | V | V |  |  |  |
| 127 | Kelurahan Temanggung II                         | V | V | V |  |  |  |
| 128 | Kelurahan Butuh                                 | V | V | V |  |  |  |
| 129 | Kelurahan Jampiroso                             | V | V | V |  |  |  |
| 130 | Kelurahan Jampirejo                             | V | V | V |  |  |  |
| 131 | Kelurahan Kertosari                             | V | V | V |  |  |  |
| 132 | Kelurahan Banyuurip                             | V | V | V |  |  |  |
| 133 | Kelurahan Kowangan                              | V | V | V |  |  |  |
| 134 | Kelurahan Jurang                                | V | V | V |  |  |  |
| 135 | Kelurahan Madureso                              | V | V | V |  |  |  |
| 136 | Kelurahan Sidorejo                              | V | V | V |  |  |  |
| 137 | Kelurahan Tlogorejo                             | V | V | V |  |  |  |
| 138 | Kelurahan Kebonsari                             | V | V | V |  |  |  |
| 139 | Kelurahan Manding                               | V | V | V |  |  |  |
| 140 | Kelurahan Mungseng                              | V | V | V |  |  |  |
| 141 | Kelurahan Purworejo                             | V | V | V |  |  |  |
| 142 | Kelurahan Giyanti                               | V | V | V |  |  |  |
| 143 | Kelurahan Walitelon Selatan                     | V | V | V |  |  |  |
| 144 | Kelurahan Walitelon Utara                       | V | V | V |  |  |  |
| 145 | Kecamatan Tembarak                              | V | V | V |  |  |  |
| 146 | Kecamatan Pringsurat                            | V | V | V |  |  |  |
| 147 | Kecamatan Kaloran                               | V | V | V |  |  |  |
| 148 | Kecamatan Parakan                               | V | V | V |  |  |  |
| 149 | Kelurahan Parakan Wetan                         | V | V | V |  |  |  |
| 150 | Kelurahan Parakan Kauman                        | V | V | V |  |  |  |
| 151 | Kecamatan Bulu                                  | V | V | V |  |  |  |
| 152 | Kecamatan Kedu                                  | V | V | V |  |  |  |
| 153 | Kecamatan Kandangan                             | V | V | V |  |  |  |
| 154 | Kecamatan Candiroto                             | V | V | V |  |  |  |
| 155 | Kecamatan Ngadirejo                             | V | V | V |  |  |  |
| 156 | Kelurahan Manggong                              | V | V | V |  |  |  |
| 157 | Kecamatan Jumo                                  | V | V | V |  |  |  |
| 158 | Kecamatan Wonobojo                              | V | V | V |  |  |  |
| 159 | Kecamatan Kranggan                              | V | V | V |  |  |  |
| 160 | Kelurahan Kranggan                              | V | V | V |  |  |  |
| 161 | Kecamatan Bejen                                 | V | V | V |  |  |  |
| 162 | Kecamatan Kledung                               | V | V | V |  |  |  |
| 163 | Kecamatan Bansari                               | V | V | V |  |  |  |
| 164 | Kecamatan Tlogomulyo                            | V | V | V |  |  |  |

|     |                       |   |   |   |  |  |  |
|-----|-----------------------|---|---|---|--|--|--|
| 165 | Kecamatan Selopampang | V | V | V |  |  |  |
| 166 | Kecamatan Gemawang    | V | V | V |  |  |  |
| 167 | Kecamatan Tretep      | V | V | V |  |  |  |

Sumber Data: Bidang pengelolaan Aset Tahun 2020

#### 14. Persentase Pemanfaatan Aset Di Satuan Kerja

Pemanfaatan adalah Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya (Perda Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah).

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Yang dimaksud dengan pertimbangan “teknis” antara lain berkenaan dengan kondisi atau keadaan Barang Milik Daerah dan rencana penggunaan.

Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dihitung dengan rumus jumlah aset yang sudah dimanfaatkan dibagi jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan dikali 100%.

Adapun Persentase Pemanfaatan aset di satuan kerja dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 14.1.  
Persentase Pemanfaatan Aset di Satuan Kerja  
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| Tahun                                      | 2015 | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|--|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan        | n.a  | n.a  | 2.150 | 2.350 | 3.391 | 945   |
| Jumlah potensi aset yang bisa dimanfaatkan | n.a  | n.a  | 2.462 | 2.462 | 3.441 | 1.200 |
| Persentase (%)                             | n.a  | n.a  | 87,33 | 95,45 | 98,55 | 78,75 |

Sumber Data: Bidang Pengelolaan Aset Tahun 2020

Ada beberapa aset tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan hal ini dikarenakan:

1. Tanah non pertanian yang belum didirikan bangunan.
2. Tanah didirikan bangunan tapi bangunan masih milik Negara (BMN), belum diserahkan ke PEMDA (contoh: Rusunawa).

3. Bangunan sudah tidak layak untuk dimanfaatkan baik untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun untuk pihak lain.

Dibandingkan Tahun 2019, pada Tahun 2020 mengalami penurunan pemanfaatan aset. Jumlah pemanfaatan tahun 2020 sebesar 78,75 %. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 dilakukan pendataan atas aset Pemda yang dapat dimanfaatkan diluar data aset Pemda yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Adapun data aset tanah dan gedung Tahun 2020 Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14.2.  
Berikut data Aset Tanah dan Gedung Tahun 2020  
Triwulan IV

| Uraian                              | 2020                                | 2020                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Jumlah aset yang sudah dimanfaatkan | Jumlah Aset Yang dapat dimanfaatkan | Jumlah Aset Yang sudah Dimanfaatkan |
| Tanah                               | 1.073                               | 825                                 |
| Bangunan                            | 127                                 | 120                                 |
| Jumlah                              | 1.200                               | 945                                 |

*Sumber : Data Pemanfaatan aset Tahun 2020*

### **15.Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus Akuntabilitas artinya dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, kesesuaian Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan APBD. Penyajian laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan serta untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari

pemerintah. Semua informasi tersebut digunakan oleh pihak yang terkait dengan laporan keuangan dari pemerintah.

Data dukung laporan keuangan Perangkat Daerah berupa SPJ yang terdiri dari LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan SPJ Administratif Bendahara.

Rumus Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan akuntabel dibagi jumlah keseluruhan perangkat daerah dikali 100%.

Adapun persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15.1.  
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel  
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| Tahun  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  |
|--|------|------|------|------|-------|-------|
| Jumlah Perangkat Daerah.                                     | 81   | 81   | 47   | 47   | 47    | 47    |
| Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Akuntabel. | 73   | 75   | 44   | 44   | 45    | 39    |
| Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Akuntabel (%)   | 90   | 92   | 93   | 93   | 95,74 | 82,98 |

Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan data di atas, selama Tahun 2015-2020 Laporan Keuangan Perangkat Daerah selalu akuntabel. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Tetapi masih ada temuan BPK atas SPI dan kepatuhan terhadap laporan keuangan di SKPD. Tahun 2020 Laporan Keuangan SKPD sampai dengan periode triwulan IV persentasenya menurun karena pergantian personil yang menangani atau mengelola penatausahaan keuangan. Oleh karena itu BPPKAD berupaya melakukan asistensi atau pendampingan terhadap Perangkat Daerah.

Tabel 15.2.  
Laporan Keuangan Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2020

| No | Perangkat Daerah   | Oktober   |                 | November  |                 | Desember  |                 |
|----|--|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
|    |  | Akuntabel | Tidak Akuntabel | Akuntabel | Tidak Akuntabel | Akuntabel | Tidak Akuntabel |
| 1  | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga  | V         |                 |           | V               | V         |                 |
| 2  | Dinas Kesehatan  | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 3  | Rumah Sakit Umum Daerah  | V         |                 |           | V               | V         |                 |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman  | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 5  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran   | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 6  | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik   |           | V               | V         |                 | V         |                 |
| 7  | Dinas Sosial   | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 8  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 9  | Dinas Tenaga Kerja   | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 10 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan   | V         |                 |           | V               | V         |                 |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup   | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 14 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 15 | Dinas Perhubungan  |           | V               | V         |                 | V         |                 |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informatika   | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 17 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                           | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   | V         |                 | V         |                 |           | V               |
| 19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 20 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan   | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 21 | Dinas Perikanan dan Peternakan   |           | V               | V         |                 | V         |                 |
| 22 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah   | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 23 | Sekretariat Daerah   | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 24 | Kecamatan Temanggung   |           | V               | V         |                 | V         |                 |
| 25 | Kecamatan Tembarak   |           | V               |           | V               | V         |                 |
| 26 | Kecamatan Pringsurat   |           | V               |           | V               | V         |                 |
| 27 | Kecamatan Kaloran  |           | V               | V         |                 |           | V               |
| 28 | Kecamatan Parakan  | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 29 | Kecamatan Bulu   | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 30 | Kecamatan Kedu   | V         |                 |           | V               | V         |                 |
| 31 | Kecamatan Kandangan  | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 32 | Kecamatan Candiroto  |           | V               | V         |                 | V         |                 |
| 33 | Kecamatan Ngadirejo  | V         |                 | V         |                 |           | V               |
| 34 | Kecamatan Jumo   | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 35 | Kecamatan Wonobojo   | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 36 | Kecamatan Kranggan   |           | V               | V         |                 |           | V               |
| 37 | Kecamatan Bejen  | V         |                 | V         |                 |           | V               |
| 38 | Kecamatan Kledung  | V         |                 | V         |                 | V         |                 |
| 39 | Kecamatan Bansari  |           | V               | V         |                 | V         |                 |

|    |   |    |    |    |   |    |   |
|----|---|----|----|----|---|----|---|
| 40 | Kecamatan Tlogomulyo  | V  |    | V  |   | V  |   |
| 41 | Kecamatan Selopampang   | V  |    | V  |   | V  |   |
| 42 | Kecamatan Gemawang  | V  |    | V  |   | V  |   |
| 43 | Kecamatan Tretep  | V  |    |    | V | V  |   |
| 44 | Inspektorat   | V  |    | V  |   | V  |   |
| 45 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | V  |    | V  |   | V  |   |
| 46 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah            | V  |    | V  |   | V  |   |
| 47 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | V  |    | V  |   | V  |   |
|    | JUMLAH  | 37 | 10 | 40 | 7 | 42 | 5 |

Sumber Data: Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

### 16. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu

Laporan Keuangan Perangkat Daerah harus disajikan tepat waktu untuk menunjukkan posisi keuangan dan kinerja Perangkat Daerah yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya keputusan tersebut. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keuangan kepada pemerintah pusat sebagai dasar penyaluran DAU kepada daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi APBD untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat yang disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah. Laporan Keuangan Perangkat Daerah harus dibuat periodik secara bulanan, triwulan, semester dan akhir tahun. Perda Nomor 11 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Laporan realisasi APBD bulanan Perangkat Daerah paling lambat diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan realisasi APBD triwulan paling lambat diterima oleh PPKD pada tanggal 10 bulan berikutnya dari setiap akhir triwulan tahun anggaran berkenaan. Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Perangkat Daerah diterima PPKD paling lambat pada tanggal 10 Juli tahun anggaran berkenaan. Sedangkan laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah disusun berdasarkan SAP untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dihitung dari jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dibagi jumlah seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung dikali 100 %

Adapun persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16.1.  
Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| Tahun  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu (%) | 65    | 65    | 40    | 40    | 40    | 39    |
| Jumlah Perangkat Daerah (%)  | 81    | 81    | 47    | 47    | 47    | 47    |
| Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)          | 80,25 | 80,25 | 85,11 | 85,11 | 85,11 | 82,98 |

Sumber Data: Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan data di atas, selama Tahun 2015 sampai 2019 terdapat peningkatan Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan tepat waktu tetapi Tahun 2020 Triwulan IV terdapat penurunan persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu yang menunjukkan penurunan kualitas kinerja keuangan dan kepatuhan Perangkat Daerah. Upaya yang dilakukan BPPKAD agar Perangkat Daerah tertib dalam menyampaikan laporan keuangan tepat waktu adalah dengan melakukan penguncian aplikasi dan melaksanakan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah yang dilaksanakan per triwulan dan sudah dimulai untuk laporan semester II.

Adapun Data dukung Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu disajikan berdasarkan penerimaan laporan keuangan Perangkat Daerah tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 16.2.  
Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2020

| No | Perangkat Daerah   | Oktober     |                   | November    |                   | Desember    |                   |
|----|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|    |  | Tepat Waktu | Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tidak Tepat Waktu |
| 1  | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga  | V           |                   |             | V                 | V           |                   |
| 2  | Dinas Kesehatan  | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 3  | Rumah Sakit Umum Daerah  | V           |                   |             | V                 | V           |                   |
| 4  | Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman  | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 5  | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran   | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 6  | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik   |             | V                 | V           |                   | V           |                   |
| 7  | Dinas Sosial   | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 8  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 9  | Dinas Tenaga Kerja   | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 10 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan   | V           |                   |             | V                 | V           |                   |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup   | V           |                   | V           |                   |             | V                 |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | V           |                   | V           |                   |             | V                 |
| 13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 14 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 15 | Dinas Perhubungan  |             | V                 | V           |                   | V           |                   |
| 16 | Dinas Komunikasi dan Informatika   | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 17 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                           | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 18 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   | V           |                   | V           |                   |             | V                 |
| 19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 20 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan   | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 21 | Dinas Perikanan dan Peternakan   |             | V                 | V           |                   | V           |                   |
| 22 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah   | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 23 | Sekretariat Daerah   | V           |                   | V           |                   |             | V                 |
| 24 | Kecamatan Temanggung   |             | V                 | V           |                   | V           |                   |
| 25 | Kecamatan Tembarak   |             | V                 |             | V                 | V           |                   |
| 26 | Kecamatan Pringsurat   |             | V                 |             | V                 | V           |                   |
| 27 | Kecamatan Kaloran  |             | V                 | V           |                   |             | V                 |
| 28 | Kecamatan Parakan  | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 29 | Kecamatan Bulu   | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 30 | Kecamatan Kedu   | V           |                   |             | V                 | V           |                   |
| 31 | Kecamatan Kandangan  | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 32 | Kecamatan Candiroti  |             | V                 | V           |                   | V           |                   |
| 33 | Kecamatan Ngadirejo  | V           |                   | V           |                   |             | V                 |
| 34 | Kecamatan Jumo   | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 35 | Kecamatan Wonoboyo   | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 36 | Kecamatan Kranggan   |             | V                 | V           |                   |             | V                 |
| 37 | Kecamatan Bejen  | V           |                   | V           |                   |             | V                 |
| 38 | Kecamatan Kledung  | V           |                   | V           |                   | V           |                   |
| 39 | Kecamatan Bansari  |             | V                 | V           |                   | V           |                   |

|    |   |    |    |    |   |    |   |
|----|---|----|----|----|---|----|---|
| 40 | Kecamatan Tlogomulyo  | V  |    | V  |   | V  |   |
| 41 | Kecamatan Selopampang   | V  |    | V  |   | V  |   |
| 42 | Kecamatan Gemawang  | V  |    | V  |   | V  |   |
| 43 | Kecamatan Tretep  | V  |    |    | V | V  |   |
| 44 | Inspektorat   | V  |    | V  |   | V  |   |
| 45 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | V  |    | V  |   | V  |   |
| 46 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah            | V  |    | V  |   | V  |   |
| 47 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia            | V  |    | V  |   | V  |   |
|    | JUMLAH  | 37 | 10 | 40 | 7 | 39 | 8 |

Sumber Data: Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

### 17. Persentasi Tanah Pemda Yang Bersertifikat

Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah). Pemberian hak atas tanah ini dilakukan oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bergantung pada jenis dan luas tanah yang diajukan permintaan hak atas tanah.

Tujuan pensertifikatan Tanah adalah:

- Untuk memberikan kepastian hukum atas Barang Milik Daerah berupa tanah.
- Memberikan perlindungan hukum kepada Pemegang Hak Atas Tanah.
- Melaksanakan tertib administrasi Barang Milik Daerah berupa tanah.
- Mengamankan Barang Milik Daerah berupa tanah.

Persentase Tanah Pemda yang bersertipikat di hitung dengan rumus jumlah Tanah Pemda yang sudah bersertipikat dibagi jumlah Tanah Pemda dikali 100%.

Adapun Persentase Tanah Pemda yang sudah bersertipikat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17.1.  
Persentase Tanah Pemda yang bersertipikat  
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

| Tahun                   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Jumlah Tanah Pemda yang | 1240 | 1276 | 1336 | 1342 | 1355 | 1366 |

|                     |       |       |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| sudah bersertipikat |       |       |       |       |       |       |
| Jumlah Tanah Pemda  | 2798  | 2813  | 2832  | 2839  | 2839  | 2861  |
| Persentase (%)      | 44,32 | 45,36 | 47,18 | 47,27 | 47,27 | 47,74 |

Sumber Data: Bidang Pengelolaan Aset Tahun 2020

Dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Pensertifikatan tahun 2020 sebesar 47,74 %. Jumlah sertifikat yang terbit tahun 2020 adalah 34 buah sertifikat, tetapi sertifikat yang baru hanya 11 buah, sedangkan untuk 23 buah adalah perubahan hak dari atas nama Pemerintah Desa ke atas nama Pemerintah Daerah.

Tabel 17.2.  
Persertifikatan Tanah Pemda Tahun 2020  
Triwulan IV

| Uraian                              | Oktober | November | Desember | Jumlah |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|--------|
| Jumlah Sertipikat tanah yang terbit | -       | -        | 30       | 30     |

Sumber Data: Bidang Pengelolaan Aset Tahun 2020

### 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut:

Belum optimalnya kinerja pelaksana pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah

### 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi

perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |   |                      |   |                |        |                       | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |   |                      |   |                |        |                       |
|--------------------------|---|----------------------|---|----------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---|----------------|--------|-----------------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi               | Indikator Program/Kegiatan                      |                |        |                       | no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi               | Indikator Program/Kegiatan                      | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif        |
|                          |   |                      |   | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif        |                                     |   |                      |   |                |        |                       |
| 1                        | 2   | 3                    | 4   | 5              | 6      | 7                     | 1                                   | 2   | 3                    | 4   | 5              | 6      | 7                     |
|                          | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>     |                      |   |                |        | <b>21.414.697.030</b> |                                     | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>     |                      |   |                |        | <b>21.414.697.000</b> |
|                          | <i>Administrasi Keuangan</i>                            |                      |   |                |        | <b>10.830.749.030</b> |                                     | <i>Administrasi Keuangan</i>                            |                      |   |                |        | <b>10.830.749.000</b> |
| 1                        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                       |                      |   |                |        |                       | 1                                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                       |                      |   |                |        |                       |
|                          | 1. Belanja Pegawai                                      | Kabupaten Temanggung | Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai | 14             | Bulan  | 2.584.863.308         |                                     | 1. Belanja Pegawai                                      | Kabupaten Temanggung | Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan pegawai | 14             | Bulan  | 2.584.863.308         |
|                          |   |                      | tunjangan keluarga                              |                |        | 271.726.064           |                                     |   |                      | tunjangan keluarga                              |                |        | 271.726.064           |
|                          |   |                      | tunjangan jabatan                               |                |        | 245.335.650           |                                     |   |                      | tunjangan jabatan                               |                |        | 245.335.650           |
|                          |   |                      | tunjangan fungsional                            |                |        | 30.693.600            |                                     |   |                      | tunjangan fungsional                            |                |        | 30.693.600            |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |   |         |  |                |        |                |
|--------------------------|---|---------|--|----------------|--------|----------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan                             |                |        |                |
|                          |   |         |  | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif |
| 1                        | 2   | 3       | 4  | 5              | 6      | 7              |
|                          |   |         | tunjangan fungsional umum                              |                |        | 57.195.250     |
|                          |   |         | tunjanagn beras  |                |        | 163.625.024    |
|                          |   |         | tunjangan PPH ( khusus                                 |                |        | 15.069.562     |
|                          |   |         | pembulatan gaji  |                |        | 34.132         |
|                          |   |         | asuransi kesehatan                                     |                |        | 211.419.145    |
|                          |   |         | Tapera   |                |        | 26.427.395     |
|                          | 2. Dana Insentif Desa                                   | Kab Tmg |  |                |        | -              |
|                          | 3. Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja           | Kab Tmg | Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja | 14             | Bulan  | 2.169.359.900  |
|                          | 4. Biaya pemungutan pajak daerah                        | Kab Tmg |  |                |        | 2.175.000.000  |
|                          | 5. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan PNS                  | Kab Tmg |  |                |        | 2.880.000.000  |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |   |         |  |         |        |                |
|-------------------------------------|---|---------|--|---------|--------|----------------|
| no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan                             | Target  | Satuan | Pagu Indikatif |
|                                     |   |         |  | Kinerja |        |                |
| 1                                   | 2   | 3       | 4  | 5       | 6      | 7              |
|                                     |   |         | tunjangan fungsional umum                              |         |        | 57.195.250     |
|                                     |   |         | tunjanagn beras  |         |        | 163.625.024    |
|                                     |   |         | tunjangan PPH ( khusus                                 |         |        | 15.069.562     |
|                                     |   |         | pembulatan gaji  |         |        | 34.102         |
|                                     |   |         | asuransi kesehatan                                     |         |        | 211.419.145    |
|                                     |   |         | Tapera   |         |        | 26.427.395     |
|                                     | 2. Dana Insentif Desa                                   | Kab Tmg |  |         |        | -              |
|                                     | 3. Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja           | Kab Tmg | Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja | 14      | Bulan  | 2.169.359.900  |
|                                     | 4. Biaya pemungutan pajak daerah                        | Kab Tmg |  |         |        | 2.175.000.000  |
|                                     | 5. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan PNS                  | Tmg     |  |         |        | 2.880.000.000  |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |  |         |  |                |        |                    |
|--------------------------|--|---------|--|----------------|--------|--------------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan          | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan                         |                |        |                    |
|                          |  |         |  | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif     |
| 1                        | 2  | 3       | 4  | 5              | 6      | 7                  |
|                          |  |         |  |                |        | 10.583.948.000     |
|                          |  |         |  |                |        | 1.471.948.000      |
|                          | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |         |  |                |        | <b>293.948.000</b> |
|                          | Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan                        |         |  |                |        |                    |
| 1                        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab Tmg | Tersedianya komponen listrik bangunan kantor       | 12             |        | 25.000.000         |
| 4                        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kab Tmg | Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan | 12             | Bulan  | 75.000.000         |
| 5                        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Kab Tmg | Tersedianya barang cetakan dan fotocopy            | 12             | Bulan  | 15.000.000         |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |  |         |  |         |        |                    |
|-------------------------------------|--|---------|--|---------|--------|--------------------|
| no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan          | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan                         | Target  | Satuan | Pagu Indikatif     |
|                                     |  |         |  | Kinerja |        |                    |
| 1                                   | 2  | 3       | 4  | 5       | 6      | 7                  |
|                                     |  |         |  |         |        | 10.583.948.000     |
|                                     |  |         |  |         |        | 1.471.948.000      |
|                                     | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |         |  |         |        | <b>293.948.000</b> |
|                                     | Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan                        |         |  |         |        |                    |
| 1                                   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab Tmg | Tersedianya komponen listrik bangunan kantor       | 12      |        | 25.000.000         |
| 4                                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kab Tmg | Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan | 12      | Bulan  | 75.000.000         |
| 5                                   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Kab Tmg | Tersedianya barang cetakan dan fotocopy            | 12      | Bulan  | 15.000.000         |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |  |         |  |                |        |                |
|--------------------------|--|---------|--|----------------|--------|----------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan          | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan   | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif |
|                          |  |         |  | 5              | 6      | 7              |
| 1                        | 2  | 3       | 4  | 5              | 6      | 7              |
| 6                        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Kab Tmg | Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 12             |        | 3.000.000      |
| 8                        | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kab Tmg | Tesedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai  | 12             | Bulan  | 80.948.000     |
| 9                        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Kab Tmg | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah   | 12             |        | 95.000.000     |
|                          | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |         |  |                |        | 175.000.000    |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |  |         |  |                |        |                    |
|-------------------------------------|--|---------|--|----------------|--------|--------------------|
| no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan          | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan   | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif     |
|                                     |  |         |  | 5              | 6      | 7                  |
| 1                                   | 2  | 3       | 4  | 5              | 6      | 7                  |
| 6                                   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Kab Tmg | Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 12             |        | 3.000.000          |
| 8                                   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | Kab Tmg | Tesedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai  | 12             | Bulan  | 80.948.000         |
| 9                                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Kab Tmg | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah   | 12             |        | 95.000.000         |
|                                     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |         |  |                |        | <b>175.000.000</b> |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |  |         |   |                |        |                |
|--------------------------|--|---------|---|----------------|--------|----------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan            | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan  | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif |
|                          |  |         |   | 5              | 6      | 7              |
| 1                        | 2  | 3       | 4   | 5              | 6      | 7              |
| 6                        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Kab Tmg | Tersedianya peralatan gedung kantor (blj modal komputer & printer) honor pengadaan, acces point dan mikrotik dan komputer (sekretariat)Pembelian Komputer dan Laptop /sekretariat | 12             | bulan  | 90.000.000     |
| 10                       | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab Tmg | Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian blj modal meja rapat, rak arsip,  | 12             | Bulan  | 85.000.000     |
|                          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |         |   |                | Bulan  | 733.000.000    |
| 1                        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Kab Tmg | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah   | 12             | Bulan  | 5.000.000      |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |  |         |   |                |        |                    |
|-------------------------------------|--|---------|---|----------------|--------|--------------------|
| no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan            | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan  | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif     |
|                                     |  |         |   | 5              | 6      | 7                  |
| 1                                   | 2  | 3       | 4   | 5              | 6      | 7                  |
| 6                                   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Kab Tmg | Tersedianya peralatan gedung kantor (blj modal komputer & printer) honor pengadaan, acces point dan mikrotik dan komputer (sekretariat)Pembelian Komputer dan Laptop /sekretariat | 12             | bulan  | 90.000.000         |
| 10                                  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab Tmg | Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian blj modal meja rapat, rak arsip,  | 12             | Bulan  | 85.000.000         |
|                                     | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               |         |   |                | Bulan  | <b>733.000.000</b> |
| 1                                   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Kab Tmg | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah   | 12             | Bulan  | 5.000.000          |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |  |         |  |                |        |                |
|--------------------------|--|---------|--|----------------|--------|----------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan  | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan   |                |        |                |
|                          |  |         |  | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif |
| 1                        | 2  | 3       | 4  | 5              | 6      | 7              |
| 2                        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Kab Tmg | Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik                    | 12             | Bulan  | 250.000.000    |
| 4                        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Kab Tmg | tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur             | 24             | orang  | 478.000.000    |
|                          |  | Kab Tmg | seragam dinas karyawan   | 74             | orang  |                |
|                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |         |  |                |        | 270.000.000    |
| 2                        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab Tmg | Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK | 12             | Bulan  | 100.000.000    |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |  |         |  |                |        |                    |
|-------------------------------------|--|---------|--|----------------|--------|--------------------|
| no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan  | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan   | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif     |
|                                     |  |         |  |                |        |                    |
| 2                                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Kab Tmg | Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air listrik                    | 12             | Bulan  | 250.000.000        |
| 4                                   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Kab Tmg | tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur             | 24             | orang  | 478.000.000        |
|                                     |  | Kab Tmg | seragam dinas karyawan   | 74             | orang  |                    |
|                                     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |         |  |                |        | <b>270.000.000</b> |
| 2                                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab Tmg | Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK | 12             | Bulan  | 100.000.000        |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022                          |  |         |  |                |         |                |
|---|--|---------|--|----------------|---------|----------------|
| no  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan                                      | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan   | Target Kinerja | Satuan  | Pagu Indikatif |
|   |  |         |  | 5              | 6       | 7              |
| 1   | 2  | 3       | 4  | 5              | 6       | 7              |
| 9   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Kab Tmg | Terpeliharanya gedung kantor                                       | 12             | Bulan   | 75.000.000     |
| 10  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Kab Tmg | terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC | 12             | Bulan   | 45.000.000     |
| 11  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab Tmg | Terpeliharanya service lift dan genset                             | 12             |         | 50.000.000     |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH               |  |         |  |                |         | 4.202.000.000  |
| Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |  |         |  |                |         | 1.750.000.000  |
| 1   | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS   | Kab Tmg | Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2023                 | 4              | dokumen | 90.000.000     |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022               |  |         |  |                |         |                      |
|---|--|---------|--|----------------|---------|----------------------|
| no  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan                                      | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan   | Target Kinerja | Satuan  | Pagu Indikatif       |
|   |  |         |  | 5              | 6       | 7                    |
| 1   | 2  | 3       | 4  | 5              | 6       | 7                    |
| 9   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Kab Tmg | Terpeliharanya gedung kantor                                       | 12             | Bulan   | 75.000.000           |
| 10  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Kab Tmg | terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC | 12             | Bulan   | 45.000.000           |
| 11  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab Tmg | Terpeliharanya service lift dan genset                             | 12             |         | 50.000.000           |
| PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH               |  |         |  |                |         | <b>4.202.000.000</b> |
| Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah |  |         |  |                |         | <b>1.750.000.000</b> |
| 1   | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS   | Kab Tmg | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                             | 4              | dokumen | 110.000.000          |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |   |         |  |                |         |                |
|--------------------------|---|---------|--|----------------|---------|----------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan   | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan   | Target Kinerja | Satuan  | Pagu Indikatif |
|                          |   |         |  | 5              | 6       | 7              |
| 1                        | 2   | 3       | 4  | 5              | 6       | 7              |
| 2                        | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  | Kab Tmg | Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022  | 4              | dokumen | 40.000.000     |
| 3                        | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD  | Kab Tmg | Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD APBD TA 2023 dan RKPA SKPD APBD TA 2022   | 8.608          | dokumen | 40.000.000     |
| 5                        | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD  | Kab Tmg | Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi DPA SKPD APBD TA 2023 dan DPPA SKPD APBD TA 2022   | 8.608          | dokumen | 30.000.000     |
| 7                        | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Kab Tmg | Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 | 4              | dokumen | 200.000.000    |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |   |         |  |                |         |                |
|-------------------------------------|---|---------|--|----------------|---------|----------------|
| no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan   | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan   | Target Kinerja | Satuan  | Pagu Indikatif |
|                                     |   |         |  | 5              | 6       | 7              |
| 1                                   | 2   | 3       | 4  | 5              | 6       | 7              |
| 2                                   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  | Kab Tmg | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   | 4              | dokumen | 75.000.000     |
| 3                                   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD  | Kab Tmg | Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD APBD TA 2023 dan RKPA SKPD APBD TA 2022   | 4324           | dokumen | 30.000.000     |
| 5                                   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD  | Kab Tmg | Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi DPA SKPD APBD TA 2023 dan DPPA SKPD APBD TA 2022   | 4324           | dokumen | 20.000.000     |
| 7                                   | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Kab Tmg | Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 | 3              | dokumen | 265.000.000    |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |   |         |  |                |         |                |
|--------------------------|---|---------|--|----------------|---------|----------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan   | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan   | Target Kinerja | Satuan  | Pagu Indikatif |
|                          |   |         |  | 5              | 6       | 7              |
| 1                        | 2   | 3       | 4  | 5              | 6       | 7              |
| 8                        | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kab Tmg | Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022   | 4              | dokumen | 150.000.000    |
| 9                        | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  | Kab Tmg | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran terkait dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan pemerintah provinsi | 1              | paket   | 1.150.000.000  |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |   |         |  |                |         |                |
|-------------------------------------|---|---------|--|----------------|---------|----------------|
| no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan   | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan   | Target Kinerja | Satuan  | Pagu Indikatif |
|                                     |   |         |  | 5              | 6       | 7              |
| 1                                   | 2   | 3       | 4  | 5              | 6       | 7              |
| 8                                   | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Kab Tmg | Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022   | 3              | dokumen | 220.000.000    |
| 9                                   | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  | Kab Tmg | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran terkait dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan pemerintah provinsi | 1              | paket   | 1.000.000.000  |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |   |         |   |                |        |                |
|--------------------------|---|---------|---|----------------|--------|----------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan  |                |        |                |
|                          |   |         |   | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif |
| 1                        | 2   | 3       | 4   | 5              | 6      | 7              |
| 1                        | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah          | Kab Tmg | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan SKPD serta pemerintah desa | 1              | paket  | 50.000.000     |
|                          | penyusunan sistem informasi keuangan daerah             |         |   |                |        |                |
|                          | Penyusunan Analisis standar belanja ( Lanjutan)         |         |   |                |        |                |
|                          | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah        |         |   |                |        | 680.000.000    |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |   |         |   |                |        |                    |
|-------------------------------------|---|---------|---|----------------|--------|--------------------|
| no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan  | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif     |
|                                     |   |         |   |                |        |                    |
| 1                                   | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah          | Kab Tmg | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan SKPD serta pemerintah desa | 1              | paket  | 30.000.000         |
|                                     | penyusunan sistem informasi keuangan daerah             |         |   |                |        |                    |
|                                     | Penyusunan Analisis standar belanja ( Lanjutan)         |         |   |                |        |                    |
|                                     | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah        |         |   |                |        | <b>680.000.000</b> |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |   |         |   |                |           |                |
|--------------------------|---|---------|---|----------------|-----------|----------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan  | Target Kinerja | Satuan    | Pagu Indikatif |
|                          |   |         |   | 5              | 6         | 7              |
| 1                        | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                   | Kab Tmg | Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                   | 12             | kegiatan  | 500.000.000    |
|                          |   |         | Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung                              | 6.335          | ASN/Orang |                |
|                          |   | Kab Tmg | Terlaksananya laporan-laporan dan konfirmasi dana transfer ke dan dari pemerintah     | 12             | kegiatan  |                |
|                          |   | Kab Tmg | Terlaksananya pembayaran iuran BPJS Pegawai Tidak Tetap (PTT) se-Kabupaten Temanggung | 12             | kegiatan  |                |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |   |         |   |                |           |                |
|-------------------------------------|---|---------|---|----------------|-----------|----------------|
| no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan  | Target Kinerja | Satuan    | Pagu Indikatif |
|                                     |   |         |   | 5              | 6         | 7              |
| 1                                   | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                   | Kab Tmg | Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                               | 12             | kegiatan  | 500.000.000    |
|                                     |   |         | Tersedianya daftar gaji bagi PNS se Kabupaten Temanggung                          | 6.335          | ASN/Orang |                |
|                                     |   | Kab Tmg | Terlaksananya laporan-laporan dan konfirmasi dana transfer ke dan dari pemerintah | 12             | kegiatan  |                |
|                                     |   | Kab Tmg | Terlaksananya pembayaran iuran BPJS Pegawai Tidak Tetap (PTT) se- Kab Tmg         | 12             | kegiatan  |                |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |   |         |   |                |            |                |
|--------------------------|---|---------|---|----------------|------------|----------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan                 | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan  | Target Kinerja | Satuan     | Pagu Indikatif |
|                          |   |         |   | 5              | 6          | 7              |
| 1                        | 2   | 3       | 4   | 5              | 6          | 7              |
|                          |   | Kab Tmg | Terlaksananya pengalokasian dan penyaluran bantuan keuangan se-Kabupaten Temanggung   | 104            | unit kerja |                |
|                          |   | Kab Tmg | terlaksananya pengalokasian dn penyaluran bantuan keuangan se kab Temanggung  | 104            | unit kerja |                |
| 3                        | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Kab Tmg | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP | 104            | unit kerja | 120.000.000    |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |   |         |   |                |            |                |
|-------------------------------------|---|---------|---|----------------|------------|----------------|
| no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan                 | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan  | Target Kinerja | Satuan     | Pagu Indikatif |
|                                     |   |         |   | 5              | 6          | 7              |
| 1                                   | 2   | 3       | 4   | 5              | 6          | 7              |
|                                     |   | Kab Tmg | Terlaksananya pengalokasian dan penyaluran bantuan keuangan se-Kabupaten Temanggung   | 104            | unit kerja |                |
|                                     |   | Kab Tmg | terlaksananya pengalokasian dn penyaluran bantuan keuangan se kab Temanggung  | 104            | unit kerja |                |
| 3                                   | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Kab Tmg | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP | 104            | unit kerja | 120.000.000    |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |  |         |  |                |            |                |
|--------------------------|--|---------|--|----------------|------------|----------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan  | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan   |                |            |                |
|                          |  |         |  | Target Kinerja | Satuan     | Pagu Indikatif |
| 1                        | 2  | 3       | 4  | 5              | 6          | 7              |
|                          |  | Kab Tmg | Terlaksananya pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D   | 104            | unit kerja |                |
| 9                        | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Kab Tmg | Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait | 104            | unit kerja | 60.000.000     |
|                          |  | Kab Tmg | Terlaksananya koordinasi pelayanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen dan Instansi Terkait lainnya                  | 12             | kegiatan   |                |
|                          | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah   |         |  |                |            | 1.772.000.000  |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |  |         |  |                |            |                      |
|-------------------------------------|--|---------|--|----------------|------------|----------------------|
| no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan  | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan   |                |            |                      |
|                                     |  |         |  | Target Kinerja | Satuan     | Pagu Indikatif       |
| 1                                   | 2  | 3       | 4  | 5              | 6          | 7                    |
|                                     |  | Kab Tmg | Terlaksananya pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D   | 104            | unit kerja |                      |
| 9                                   | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Kab Tmg | Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait | 104            | unit kerja | 60.000.000           |
|                                     |  | Kab Tmg | Terlaksananya koordinasi pelayanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen dan Instansi Terkait lainnya                  | 12             | kegiatan   |                      |
|                                     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah   |         |  |                |            | <b>1.772.000.000</b> |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |   |         |   |                |            |                |
|--------------------------|---|---------|---|----------------|------------|----------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan   | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan                          | Target Kinerja | Satuan     | Pagu Indikatif |
|                          |   |         |   | 5              | 6          | 7              |
| 1                        | 2   | 3       | 4   | 5              | 6          | 7              |
| 3                        | Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Kab Tmg | Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan | 104            | Unit Kerja | 52.000.000     |
| 4                        | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                | Kab Tmg | Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntable  | 104            | Unit Kerja | 150.000.000    |
|                          |   | Kab Tmg | Tersedianya laporan keuangan daerah                 | 1              | Dokumen    |                |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |   |         |  |                |            |                |
|-------------------------------------|---|---------|--|----------------|------------|----------------|
| no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan   | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan                         | Target Kinerja | Satuan     | Pagu Indikatif |
|                                     |   |         |  | 5              | 6          | 7              |
| 1                                   | 2   | 3       | 4  | 5              | 6          | 7              |
| 3                                   | Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Kab Tmg | Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntable | 104            | Unit Kerja | 52.000.000     |
| 4                                   | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                | Kab Tmg | Tersedianya laporan keuangan Pemerintah Daerah     | 1              | Dokumen    | 150.000.000    |
|                                     |   |         |  |                |            |                |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |   |         |  |                |            |                |
|--------------------------|---|---------|--|----------------|------------|----------------|
| No                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan   | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan   | Target Kinerja | Satuan     | Pagu Indikatif |
|                          |   |         |  | 5              | 6          | 7              |
| 5                        | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Kab Tmg | Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota | 4              | Dokumen    | 170.000.000    |
| 11                       | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota   | Kab Tmg | Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung        | 104            | Unit Kerja | 1.400.000.000  |
|                          | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah   |         |  |                |            |                |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |   |         |                            |                |        |                |
|-------------------------------------|---|---------|----------------------------|----------------|--------|----------------|
| No                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan   | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif |
|                                     |   |         |                            | 5              | 6      | 7              |
| 5                                   | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Kab Tmg |                            |                |        | 170.000.000    |
| 11                                  | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota   | Kab Tmg |                            |                |        | 1.400.000.000  |
|                                     | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah   |         |                            |                |        |                |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |   |         |   |                |              |                |
|--------------------------|---|---------|---|----------------|--------------|----------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan  | Target Kinerja | Satuan       | Pagu Indikatif |
|                          |   |         |   | 5              | 6            | 7              |
| 1                        | 2   | 3       | 4   | 5              | 6            | 7              |
| 8                        | Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan    | Kab Tmg | Terlaksananya pelaksanaan alokasi dan penyaluran bantuan keuangan khusus  | 104            | unit kerja   |                |
|                          | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                 |         |   |                |              | 3.220.000.000  |
|                          | Pengelolaan Barang Milik Daerah                         |         |   |                |              |                |
| 1                        | Penyusunan Standar Harga                                | Kab Tmg | Tersusunnya standar harga   | 168            | SATUAN KERJA | 70.000.000     |
| 5                        | Penatausahaan Barang Milik Daerah                       | Kab Tmg | pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMBADA  | 1              | Aplikasi     | 875.000.000    |
|                          |   | Kab Tmg | Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah | 168            | SATUAN KERJA |                |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |   |         |   |                |              |                |
|-------------------------------------|---|---------|---|----------------|--------------|----------------|
| no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan  | Target Kinerja | Satuan       | Pagu Indikatif |
|                                     |   |         |   | 5              | 6            | 7              |
| 1                                   | 2   | 3       | 4   | 5              | 6            | 7              |
| 8                                   | Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan    | Kab Tmg |   |                |              |                |
|                                     | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                 |         |   |                |              | 3.220.000.000  |
|                                     | Pengelolaan Barang Milik Daerah                         |         |   |                |              |                |
| 1                                   | Penyusunan Standar Harga                                | Kab Tmg | Tersusunnya standar harga   | 180            | SATUAN KERJA | 70.000.000     |
| 5                                   | Penatausahaan Barang Milik Daerah                       | Kab Tmg | pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMBADA  | 1              | Aplikasi     | 875.000.000    |
|                                     |   | Kab Tmg | Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah | 578            | SATUAN KERJA |                |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |   |         |   |                |                |                |
|--------------------------|---|---------|---|----------------|----------------|----------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan   | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan  | Target Kinerja | Satuan         | Pagu Indikatif |
|                          |   |         |   | 5              | 6              | 7              |
| 1                        | 2   | 3       | 4   | 5              | 6              | 7              |
|                          |   | Kab Tmg | Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu   | 168            | SATUAN KERJA   |                |
|                          |   | Kab Tmg | Tertibnya pengelolaan barang milik daerah   | 168            | SATUAN KERJA   |                |
|                          |   | Kab Tmg | Terbayarnya honor pengurus barang Pengguna/ Pembantu pengurus barang Pengguna ( plus di sekolah)  | 168            | SATUAN KERJA   |                |
| 7                        | Pengamanan Barang Milik Daerah  | Kab Tmg | Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat  | 1.000          | bidang         | 1.600.000.000  |
| 10                       | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kab Tmg | Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok | 296            | tanah/Bangunan | 135.000.000    |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |   |         |  |                |                |                |
|-------------------------------------|---|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan   | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan   | Target Kinerja | Satuan         | Pagu Indikatif |
|                                     |   |         |  | 5              | 6              | 7              |
| 1                                   | 2   | 3       | 4  | 5              | 6              | 7              |
|                                     |   | Kab Tmg | Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu  | 578            | SATUAN KERJA   |                |
|                                     |   | Kab Tmg | Tertibnya pengelolaan barang milik daerah  | 578            | SATUAN KERJA   |                |
|                                     |   | Kab Tmg | Terbayarnya honor pengurus barang Pengguna/ Pembantu pengurus barang Pengguna ( plus di sekolah)                       | 578            | SATUAN KERJA   |                |
| 7                                   | Pengamanan Barang Milik Daerah  | Kab Tmg | Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat   | 1000           | bidang         | 1.600.000.000  |
| 10                                  | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Kab Tmg | Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari | 578            | tanah/Bangunan | 135.000.000    |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |   |         |  |                |              |                |
|--------------------------|---|---------|--|----------------|--------------|----------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan   | Target Kinerja | Satuan       | Pagu Indikatif |
|                          |   |         |  | 5              | 6            | 7              |
| 1                        | 2   | 3       | 4  | 5              | 6            | 7              |
|                          |   |         |  |                |              |                |
|                          |   | Kab Tmg | Terlaksananya pemberdayaan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah | 168            | SATUAN KERJA |                |
| 12                       | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                  | Kab Tmg | Terlaksananya laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun                      | 168            | Unit Kerja   | 540.000.000    |
|                          |   | Kab Tmg | Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang                            | 168            | Unit Kerja   |                |
|                          | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                   |         |  |                |              | 1.690.000.000  |
|                          | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                  |         |  |                |              |                |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |   |         |  |                |              |                |
|-------------------------------------|---|---------|--|----------------|--------------|----------------|
| no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan   | Target Kinerja | Satuan       | Pagu Indikatif |
|                                     |   |         |  | 5              | 6            | 7              |
| 1                                   | 2   | 3       | 4  | 5              | 6            | 7              |
|                                     |   |         | sewa tanah eks bengkok   |                |              |                |
|                                     |   | Kab Tmg | Terlaksananya pemberdayaan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah | 578            | SATUAN KERJA |                |
| 12                                  | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                  | Kab Tmg | Terlaksananya laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun                      | 578            | Unit Kerja   | 540.000.000    |
|                                     |   | Kab Tmg | Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang                            | 578            | Unit Kerja   |                |
|                                     | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                   |         |  |                |              | 1.690.000.000  |
|                                     | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                  |         |  |                |              |                |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |   |                         |  |                |                 |                |
|--------------------------|---|-------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi                  | Indikator Program/Kegiatan                                   | Target Kinerja | Satuan          | Pagu Indikatif |
|                          |   |                         |  | 5              | 6               | 7              |
| 1                        | 2   | 3                       | 4  | 5              | 6               | 7              |
| 5                        | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah            | kec parakan             | pemutakhiran data jml obyek pajak pbb-p2                     | 29.000         | SKPD dan SKPKD  | 1.100.000.000  |
|                          |   | Kab Tmg                 | terverif perub data tepat waktu                              | 10.000         | sppt            |                |
|                          |   | Kab Tmg                 | peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2                   | 280.000        | OP              |                |
|                          |   | Kab Tmg                 | Peta digitasi obyek pajak blok                               | 10.000         | op              |                |
|                          |   | Kab Tmg                 | terlaksana pendataan wajib/ obyek pajak daerah               | 7.000          | op              |                |
|                          |   | desa m/ kel se kec. Tmg | Belanja Hadiah untuk desa terlunas sebelum jatuh tempo (DID) | 24             | desa/ kelurahan |                |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |   |                         |  |                |               |                |
|-------------------------------------|---|-------------------------|--|----------------|---------------|----------------|
| no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi                  | Indikator Program/Kegiatan   | Target Kinerja | Satuan        | Pagu Indikatif |
|                                     |   |                         |  | 5              | 6             | 7              |
| 1                                   | 2   | 3                       | 4  | 5              | 6             | 7              |
| 5                                   | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah            | kec parakan             | Terlayannya permohonan pelayanan pajak daerah                      | 12             | Bulan         | 620.000.000    |
|                                     |   | Kab Tmg                 | Terlaksananya verifikasi permohonan pelayanan pajak daerah         | 10000          | dokumen       |                |
|                                     |   | Kab Tmg                 | Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan PBB – P2                     | 20             | Kecamatan     |                |
|                                     |   | Kab Tmg                 | Tersusunnya target pendapatan perangkat daerah pengelola PAD       | 23             | Pengelola PAD |                |
|                                     |   | Kab Tmg                 | Terlaksananya pendataan dan pemutakhiran obyek/subyek pajak daerah | 10000          | OP/WP         |                |
|                                     |   | desa m/ kel se kec. Tmg | Terlaksananya pendataan/ penilaian individual Obyek/Subyek         | 5              | Obyek Pajak   |                |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |   |         |  |                |                |                |
|--------------------------|---|---------|--|----------------|----------------|----------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan         | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan   | Target Kinerja | Satuan         | Pagu Indikatif |
|                          |   |         |  | 5              | 6              | 7              |
| 1                        | 2   | 3       | 4  | 5              | 6              | 7              |
|                          |   |         |  |                |                |                |
|                          |   | Kab Tmg | Terlaksananya pendataan/ penilaian individual subyek/ obyek khusus PBB                 | 5              | Op             |                |
| 6                        | Pengolahan , pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Kab Tmg | Terbangunnya sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan (SIM-PBB)              | 1              | SIM PBB        | 420.000.000    |
|                          |   | Kab Tmg | Tercetaknya SPPT DHKP  | 289            | DHKP           |                |
|                          |   | Kab Tmg | Tercetaknya SPPT PBB   | 585.000        | SPPT           |                |
|                          |   | Kab Tmg | Tercetaknya surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar | 188            | SKPD dan SKPKD |                |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |   |         |  |                |             |                |
|-------------------------------------|---|---------|--|----------------|-------------|----------------|
| no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan         | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan                                     | Target Kinerja | Satuan      | Pagu Indikatif |
|                                     |   |         |  | 5              | 6           | 7              |
| 1                                   | 2   | 3       | 4  | 5              | 6           | 7              |
|                                     |   |         | Pajak PBB  |                |             |                |
|                                     |   | Kab Tmg |  |                |             |                |
| 6                                   | Pengolahan , pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Kab Tmg | Terlaksananya penetapan dan cetak surat ketetapan pajak daerah | 1000           | SKPD        | 420.000.000    |
|                                     |   | Kab Tmg | Terlaksananya penetapan dan cetak masal SPPT PBB-P2            | 600000         | SPPT        |                |
|                                     |   | Kab Tmg | Tercetaknya DHKP SPPT PBB-P2                                   | 289            | DHKP        |                |
|                                     |   | Kab Tmg | Terlaksananya penetapan dan cetak pemuakhiran SPPT PBB-P2      | 12000          | Objek Pajak |                |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |   |         |   |                |              |                |
|--------------------------|---|---------|---|----------------|--------------|----------------|
| no                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan  | Target Kinerja | Satuan       | Pagu Indikatif |
|                          |   |         |   | 5              | 6            | 7              |
| 1                        | 2   | 3       | 4   | 5              | 6            | 7              |
|                          |   | Kab Tmg | Terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 & pajak daerah | 7              | Pajak Daerah |                |
|                          |   | Kab Tmg | Terakhirnya data obyek dan subyek pajak daerah                    | 110.000        | Objek Pajak  |                |
|                          |   | Kab Tmg | Tersedianya blanko SPPT untuk cetak massal                        | 125            | Box          |                |
| 7                        | sarana prasarana pelayanan kantor                       | Kab Tmg | 3 komputer pelayanan, <i>cardreader</i>                           | 12             | bulan        | 60.000.000     |
| 8                        | Penagihan Pajak Daerah                                  | Kab Tmg | Terlaksananya penagihan pajak daerah                              | 12             | Bulan        | 45.000.000     |

| HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |   |         |   |                |                  |                |
|-------------------------------------|---|---------|---|----------------|------------------|----------------|
| no                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan  | Target Kinerja | Satuan           | Pagu Indikatif |
|                                     |   |         |   | 5              | 6                | 7              |
| 1                                   | 2   | 3       | 4   | 5              | 6                | 7              |
|                                     |   | Kab Tmg | Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan Pajak daerah | 4              | aplikasi         |                |
|                                     |   | Kab Tmg |   |                |                  |                |
|                                     |   | Kab Tmg |   |                |                  |                |
| 7                                   | sarana prasarana pelayanan kantor                       | Kab Tmg |   |                |                  | 60.000.000     |
| 8                                   | Penagihan Pajak Daerah                                  | Kab Tmg |   |                |                  | 525.000.000    |
|                                     |   |         | Belanja Hadiah untuk desa terlunas sebelum jatuh tempo (DID)                          | 24             | desa / kelurahan |                |

| RANCANGAN AWAL RKPD 2022 |   |         |  |                |        |                | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2022 |   |         |  |                |        |                |
|--------------------------|---|---------|--|----------------|--------|----------------|-------------------------------------|---|---------|--|----------------|--------|----------------|
| No                       | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan                             |                |        |                | No                                  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Lokasi  | Indikator Program/Kegiatan                             | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif |
|                          |   |         |  | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif |                                     |   |         |  |                |        |                |
| 1                        | 2   | 3       | 4  | 5              | 6      | 7              | 1                                   | 2   | 3       | 4  | 5              | 6      | 7              |
| 9                        | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah   | Kab Tmg | Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD     | 12             | Bulan  | 65.000.000     | 9                                   | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah   | Kab Tmg |  |                |        | 65.000.000     |
|                          | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                   |         |  |                |        | 2.800.000.000  |                                     | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                   |         |  |                |        | 2.800.000.000  |
|                          | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                  |         |  |                |        | 2.800.000.000  |                                     | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                  |         |  |                |        | 2.800.000.000  |
|                          | Biaya insentif Pemungutan Pajak Daerah                  | BPPKA D | bagian Insentif perangkat daerah pemungut pajak daerah |                |        | 2.800.000.000  |                                     | Biaya insentif Pemungutan Pajak Daerah                  | BPPKA D | bagian Insentif perangkat daerah pemungut pajak daerah |                |        | 2.800.000.000  |
|                          |   | BPPKA D | Bagian Insentif Triwulan IV tahun 2021                 |                |        |                |                                     |   | BPPKA D | Bagian Insentif Triwulan IV tahun 2021                 |                |        |                |

Sumber :BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

## 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh (Perangkat Daerah). Namun dalam proses ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam ketersediaan anggaran oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

| No    | Program/<br>Kegiatan | Lokasi | Indikator<br>Kinerja | Volume/Besaran | Catatan |
|-------|----------------------|--------|----------------------|----------------|---------|
| Nihil |                      |        |                      |                |         |

## 2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ada 5 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6

Daftar Inovasi Perangkat Daerah  
2019-2021

| No. | Nama Inovasi | Input Inovasi |          | Proses Inovasi   | Output Inovasi   | Outcome Inovasi  | Pelaksana / Tahun |
|-----|--------------|---------------|----------|--|--|--|-------------------|
|     |              | SDM           | Anggaran |  |  |  |                   |
| 1   | OpenTax      | BPKPAD        | ABPD     | system operasionalisasi Pajak Bumi Daerah versi online | Opentax itu aplikasi pengelolaan dan pengolahan data PBB yang mudah dan dapat dioperasikan secara online..opentax mrpkn aplikasi internal bukan untuk masyarakat dan WP. Misalnya untuk simulasi reklas NJOP Simulasi stimulus ataupun relaksasi | Digunakan untuk perencanaan dan potensi, pendatan, pemutakhiran, simulasi usulan skenario ketetapan tahun selanjutnya, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawa ban pengelolaan PBB | BPPKAD 2019       |

|   |                  |        |      |   |  |                                 |             |
|---|------------------|--------|------|---|--|---------------------------------|-------------|
| 2 | Mapatda          | BPKPAD | ABPD | Pelayanan Pajak Daerah untuk BPHTB, Pajak Reklame dan pajak air tanah berbasis Kinerja Integrasi Data   | Akses desa Dan kecamatan Untuk pengelolaan dan pemungutan PBB dalam wilayahnya.                      | Peningkatan pajak daerah        | BPPKAD 2019 |
| 3 | SiTante          | BPKPAD | ABPD | Sebuah system untuk mencetak tanda terima SPJ yang telah terverifikasi dari OPD   | Memudahkan layanan kepada OPD untuk penatausahaan keuangan   | Laporan keuangan yang akuntabel | BPPKAD 2019 |
| 4 | Klinik Akuntansi | BPKPAD | ABPD | Sebuah inovasi untuk penyelenggaraan Konsultasi Pelaporan Keuangan Daerah dari OPD sehingga pelaporan keuangan menjadi akuntabel.   | Media konsultasi penatausahaan keuangan/ SPJ dari OPD ke BPKPAD selaku SKPKD                         | Laporan keuangan yang akuntabel | BPPKAD 2019 |
| 5 | E BPHTB          | BPKPAD | ABPD | aplikasi pelayanan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terintegrasi secara host to host dengan Bank Persepsi dan layanan Pertanahan Kementrian Agraria dan Tata ruang/BPN. | Akses Wajib pajak dengan memasukkan NJOP maka akan keluar informasi tentang pajak yang harus dibayar | Peningkatan pajak daerah        | BPPKAD 2020 |
|   | PBB-Online       | BPKPAD | ABPD | Pelayanan PBB-P2 online   | Akses wajib pajak yang ingin mengetahui dan menuaikan kewajiban membayar pajak                       | Peningkatan pajak daerah        | BPPKAD 2021 |

## 2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah ada 2 (dua) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7  
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019-2021

| No. | Nama Penghargaan    | Pemberi Pemnghargaan | Skala    | Perangkat Daerah Pengampu |
|-----|---------------------|----------------------|----------|---------------------------|
| 1   | OPINI WTP yang ke 7 | BPK                  | Nasional | BPPKAD                    |
| 2   | OPINI WTP yang ke 8 | BPK                  | Nasional | BPPKAD                    |

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPKPAD**

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2022, maka tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 adalah:

“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan public yang berkualitas berbasis Tehnologi”.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini adalah dalam rangka: “Meningkatnya Kualitas Managemen Pemerintahan”.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.  
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja  
dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten  
Temanggung Tahun 2022

**VISI BPKPAD KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023**  
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM

| MISI  | TUJUAN  | SASARAN  | PROGRAM   | INDIKATOR SASARAN  | SATUAN TARGET | TARGET TAHUN 2022 | TARGET KONDISI AKHIR 2020 |
|---|---|--|---|--|---------------|-------------------|---------------------------|
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi | Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, pengkajian pembangunan daerah dan |   | WTP  | -             | 100               | 100                       |
|   |   |  | Perencanaan, pendapatan dan pelayanan pendapatan daerah | Persentase Peningkatan data jumlah obyek pajak                 | %             | 0,96              | 1,06                      |
|   |   |  |   | Persentase terverifikasinya perubahan data yang tepat waktu    | %             | 100               | 100                       |
|   |   |  | Pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah        | Prosentase pemutakhiran obyek pajak                            | %             | 2,9               | 0,66                      |
|   |   |  |   | Persentase penerbitan surat ketetapan pajak daerah tepat waktu | %             | 100               | 100                       |
|   |   |  | Peningkatan pendapatan daerah                           | Persentase realisasi penerimaan pendapatan daerah              | %             | 90                | 92,54                     |
|   |   |  |   | Persentase pelaporan pendapatan daerah tepat waktu             | %             | 100               | 100                       |
|   |   |  | Pengelolaan keuangan daerah                             | Realisasi Belanja Terhadap APBD                                | %             | 90,51             | 90,05                     |
|   |   |  |   | Prosentase konsistensi penganggaran                            | %             | 100               | 96,49                     |

|  |  |  |  |  |   |       |       |
|--|--|--|--|--|---|-------|-------|
|  |  |  |  | terhadap Perencanaan   |   |       |       |
|  |  |  |  | Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu                                    | % | 100   | 85,71 |
|  |  |  |  | Prosentase penerbitan SP2D yang tepat waktu                                    | % | 100   | 100   |
|  |  |  | Pengelolaan aset                                     | Persentase tertib pengelolaan administrasi aset yang akuntabel di satuan kerja | % | 86,31 | 66,47 |
|  |  |  |  | Persentase pemanfaatan aset di satuan kerja                                    | % | 98,9  | 99,39 |
|  |  |  | Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah | Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel                    | % | 97    | 82,98 |
|  |  |  |  | Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu                  | % | 97    | 82,98 |

Sumber : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung Tahun 2019-2023.

Kebijakan dan strategi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2019-2023.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2022.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.  
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan  
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung  
Tahun 2022

| <b>RANCANGAN RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TAHUN 2022</b> |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| no   | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan      | Pagu Indikatif        |
| 1  | 2  | 3                     |
|  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>          | <b>21.414.697.000</b> |
|  | <i>Administrasi Keuangan</i>                                 | <b>10.830.749.000</b> |
| 1  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                            |                       |
|  | 1. Belanja Pegawai   | 3.606.389.100         |
|  | 2. Dana Insentif Desa  | -                     |
|  | 3. Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja                | 2.169.359.900         |
|  | 4. Biaya pemungutan pajak daerah                             | 2.175.000.000         |
|  | 5. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan PNS                       | 2.880.000.000         |
|  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b> | <b>10.583.948.000</b> |
|  |  | 1.471.948.000         |
|  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                    | <b>293.948.000</b>    |
|  | Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan                    |                       |

| <b>RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022</b> |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| no  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan      | Pagu Indikatif        |
| 1   | 2  | 3                     |
|   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>          | <b>21.414.697.000</b> |
|   | <i>Administrasi Keuangan</i>                                 | <b>10.830.749.000</b> |
| 1   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                            |                       |
|   | 1. Belanja Pegawai   | 3.606.389.100         |
|   | 2. Dana Insentif Desa  | -                     |
|   | 3. Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja                | 2.169.359.900         |
|   | 4. Biaya pemungutan pajak daerah                             | 2.175.000.000         |
|   | 5. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan PNS                       | 2.880.000.000         |
|   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b> | <b>10.583.948.000</b> |
|   |  | 1.471.948.000         |
|   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                    | <b>293.948.000</b>    |
|   | Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan                    |                       |

| <b>RANCANGAN RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TAHUN 2022</b> |  |                |
|--|--|----------------|
| no   | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan            | Pagu Indikatif |
| 1  | 2  | 3              |
| 1  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 25.000.000     |
| 4  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | 75.000.000     |
| 5  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | 15.000.000     |
| 6  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | 3.000.000      |
| 8  | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 80.948.000     |
| 9  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 95.000.000     |
|  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 175.000.000    |
| 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 90.000.000     |
| 10   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 85.000.000     |
|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | 733.000.000    |
| 1  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 5.000.000      |
| 2  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | 250.000.000    |
| 4  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | 478.000.000    |

| <b>RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022</b> |  |                    |
|---|--|--------------------|
| no  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan            | Pagu Indikatif     |
| 1   | 2  | 3                  |
| 1   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 25.000.000         |
| 4   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | 75.000.000         |
| 5   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | 15.000.000         |
| 6   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | 3.000.000          |
| 8   | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 80.948.000         |
| 9   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 95.000.000         |
|   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 175.000.000        |
| 6   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 90.000.000         |
| 10  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 85.000.000         |
|   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | <b>719.800.000</b> |
| 1   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | 5.000.000          |
| 2   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | 250.000.000        |
| 4   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | 464.800.000        |

| RANCANGAN RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TAHUN 2022 |  |                | RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 |  |                      |
|---|--|----------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| no  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan  | Pagu Indikatif | no                                   | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan  | Pagu Indikatif       |
| 1   | 2  | 3              | 1                                    | 2  | 3                    |
|   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 270.000.000    |                                      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | <b>270.000.000</b>   |
| 2   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100.000.000    | 2                                    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100.000.000          |
| 9   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 75.000.000     | 9                                    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 75.000.000           |
| 10  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | 45.000.000     | 10                                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | 45.000.000           |
| 11  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | 50.000.000     | 11                                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | 50.000.000           |
|   | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  | 4.202.000.000  |                                      | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  | 4.202.000.000        |
|   | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah  | 1.750.000.000  |                                      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah  | <b>1.750.000.000</b> |
| 1   | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS   | 90.000.000     | 1                                    | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS   | 110.000.000          |
| 2   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   | 40.000.000     | 2                                    | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   | 75.000.000           |
| 3   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD   | 40.000.000     | 3                                    | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD   | 30.000.000           |
| 5   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD   | 30.000.000     | 5                                    | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD   | 20.000.000           |
| 7   | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD      | 200.000.000    | 7                                    | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD      | 265.000.000          |

| RANCANGAN RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TAHUN 2022 |   |                | RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 |   |                      |
|---|---|----------------|--------------------------------------|---|----------------------|
| no  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan   | Pagu Indikatif | no                                   | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan   | Pagu Indikatif       |
| 1   | 2   | 3              | 1                                    | 2   | 3                    |
| 8   | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD   | 150.000.000    | 8                                    | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD   | 220.000.000          |
| 9   | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  | 1.150.000.000  | 9                                    | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  | 1.000.000.000        |
| 11  | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah  | 50.000.000     | 11                                   | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah  | 30.000.000           |
|   | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah  | 680.000.000    |                                      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah  | <b>680.000.000</b>   |
| 1   | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   | 500.000.000    | 1                                    | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   | 500.000.000          |
| 3   | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD   | 120.000.000    | 3                                    | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD   | 120.000.000          |
| 9   | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait  | 60.000.000     | 9                                    | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait  | 60.000.000           |
|   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  | 1.772.000.000  |                                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  | <b>1.772.000.000</b> |
| 3   | Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban   | 52.000.000     | 3                                    | Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban   | 52.000.000           |
| 4   | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  | 150.000.000    | 4                                    | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  | 150.000.000          |
| 5   | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 170.000.000    | 5                                    | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 170.000.000          |

| <b>RANCANGAN RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TAHUN 2022</b> |   |                |
|--|---|----------------|
| no   | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan   | Pagu Indikatif |
| 1  | 2   | 3              |
| 11   | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                         | 1.400.000.000  |
|  | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah   |                |
| 8  | Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan  |                |
|  | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH   | 3.220.000.000  |
|  | Pengelolaan Barang Milik Daerah   |                |
| 1  | Penyusunan Standar Harga  | 70.000.000     |
| 5  | Penatausahaan Barang Milik Daerah   | 875.000.000    |
| 7  | Pengamanan Barang Milik Daerah  | 1.600.000.000  |
| 10   | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 135.000.000    |
| 12   | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | 540.000.000    |
|  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   | 1.690.000.000  |
|  | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah  |                |
| 5  | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  | 1.100.000.000  |

| <b>RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022</b> |   |                      |
|---|---|----------------------|
| no  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan   | Pagu Indikatif       |
| 1   | 2   | 3                    |
| 11  | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                         | 1.400.000.000        |
|   | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah   |                      |
| 8   | Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan  |                      |
|   | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH   | 3.220.000.000        |
|   | Pengelolaan Barang Milik Daerah   |                      |
| 1   | Penyusunan Standar Harga  | 70.000.000           |
| 5   | Penatausahaan Barang Milik Daerah   | 875.000.000          |
| 7   | Pengamanan Barang Milik Daerah  | 1.600.000.000        |
| 10  | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 135.000.000          |
| 12  | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | 540.000.000          |
|   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   | <b>1.690.000.000</b> |
|   | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah  |                      |
| 5   | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  | 620.000.000          |

| <b>RANCANGAN RENJA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah TAHUN 2022</b> |   |                |
|--|---|----------------|
| no   | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan         | Pagu Indikatif |
| 1  | 2   | 3              |
| 6  | Pengolahan , pemeliharann dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 420.000.000    |
| 7  | sarana prasarana pelayanan kantor                               | 60.000.000     |
| 8  | Penagihan Pajak Daerah  | 45.000.000     |
| 9  | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah           | 65.000.000     |
|  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                           | 2.800.000.000  |
|  | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                          | 2.800.000.000  |
|  | Biaya insentif Pemungutan Pajak Daerah                          | 2.800.000.000  |

| <b>RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022</b> |   |                |
|---|---|----------------|
| no  | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan         | Pagu Indikatif |
| 1   | 2   | 3              |
| 6   | Pengolahan , pemeliharann dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 480.000.000    |
| 7   | sarana prasarana pelayanan kantor                               |                |
| 8   | Penagihan Pajak Daerah  | 525.000.000    |
| 9   | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah           | 65.000.000     |
|   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                           | 2.800.000.000  |
|   | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah                          | 2.800.000.000  |
|   | Biaya insentif Pemungutan Pajak Daerah                          | 2.800.000.000  |

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2021

Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2022.

Tabel 3.3  
Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Temanggung  
Tahun 2022

| KODE REKENING | Urusan/Bidang<br>Pemerintahan Daerah, dan<br>Program/Kegiatan | Indikator<br>Program/Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2022 |                           |                    |  | Alokasi<br>2.021 | Kinerja Anggaran Tahun 2020 |                |               | Prakiraan Maju<br>Rencana 2023 | Sumber<br>Dana |               |     |
|---------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------|---------------|-----|
|               |   |                               | Lokasi                   | Targe<br>t<br>Kiner<br>ja | Satuan             | Pagu Indikatif   |                  | Alokasi                     | Realisasi      | %             |                                |                |               |     |
| 1             | 2   | 3                             | 4                        | 5                         | 6                  | 7  | 8                | 9                           | 10             | 11            | 12                             | 13             |               |     |
| X<br>X<br>X   |   | 1                             |                          |                           |                    | 21.401.497.000   |                  |                             |                |               | 21.401.497.030                 |                |               |     |
| X<br>X<br>X   |   | 1<br>2.0<br>2                 |                          |                           |                    | 10.830.749.000   | 15.050.683.243   | 31.080.029.503              | 12.629.022.606 |               | 10.830.749.030                 |                |               |     |
| X<br>X<br>X   |   | 1<br>2.0<br>2                 | 1                        |                           |                    |  |                  |                             | 23.855.669.603 | 7.687.554.187 |                                |                |               |     |
|               |   |                               |                          |                           | 1. Belanja Pegawai | Terpenuhinya<br>belanja gaji dan<br>tunjangan<br>pegawai | Kab Tmg          | 14                          | Bulan          | 2.584.863.308 | 6.807.887.353                  | 2.746.085.768  | 2.584.863.308 | DAU |
|               |   |                               |                          |                           |                    | tunjangan<br>keluarga                                    |                  |                             |                | 271.726.064   |                                |                | 271.726.064   |     |
|               |   |                               |                          |                           |                    | tunjangan<br>jabatan                                     |                  |                             |                | 245.335.650   |                                |                | 245.335.650   |     |
|               |   |                               |                          |                           |                    | tunjangan<br>fungsional                                  |                  |                             |                | 30.693.600    |                                |                | 30.693.600    |     |
|               |   |                               |                          |                           |                    | tunjangan<br>fungsional umum                             |                  |                             |                | 57.195.250    |                                |                | 57.195.250    |     |
|               |   |                               |                          |                           |                    | tunjanagn beras  |                  |                             |                | 163.625.024   |                                |                | 163.625.024   |     |
|               |   |                               |                          |                           |                    | tunjangan PPH (<br>khusus                                |                  |                             |                | 15.069.562    |                                |                | 15.069.562    |     |
|               |   |                               |                          |                           |                    | pembulatan gaji  |                  |                             |                | 34.102        |                                |                | 34.132        |     |

| KODE REKENING | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan       | Indikator Program/Kegiatan                             | Rencana Kerja Tahun 2022 |   |  |  | Alokasi 2021       | Kinerja Anggaran Tahun 2020 |                    |                    | Prakiraan Maju Rencana 2023 | Sumber Dana |            |       |            |  |
|---------------|---|--|--------------------------|---|--|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------|------------|--|
|               |   |  | Lokasi                   | Target Kinerja                            | Satuan   | Pagu Indikatif                                     |                    | Alokasi                     | Realisasi          | %                  |                             |             |            |       |            |  |
| 1             | 2   | 3  | 4                        | 5   | 6  | 7  | 8                  | 9                           | 10                 | 11                 | 12                          | 13          |            |       |            |  |
|               |   | asuransi kesehatan                                     |                          |   |  | 211.419.145  |                    |                             |                    |                    | 211.419.145                 |             |            |       |            |  |
|               |   | Tapera   |                          |   |  | 26.427.395   |                    |                             |                    |                    | 26.427.395                  |             |            |       |            |  |
|               | 2. Dana Insentif Desa   |  | Kab Tmg                  |   |  | -  | 480.000.000        |                             |                    |                    | -                           |             |            |       |            |  |
|               | 3. Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja                 | Terbayarnya Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja | Kab Tmg                  | 14  | Bulan  | 2.169.359.900                                      | 2.281.795.890      | 2.169.359.900               | 1.565.100.080      |                    | 2.169.359.900               | DAU         |            |       |            |  |
|               | 4. Biaya pemungutan pajak daerah                              |  | Kab Tmg                  |   |  | 2175000000   | 2.500.000.000      | 2.175.000.000               | 1.220.550.000      |                    | 2.175.000.000               | DAU         |            |       |            |  |
|               | 5. Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan PNS                        |  |                          |   |  | 2.880.000.000                                      | 2.981.000.000      | 2.880.000.000               | 2.155.818.339      |                    | 2.880.000.000               | DAU         |            |       |            |  |
|               | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA</b> |  |                          |   |  | 10.570.748.000                                     |                    |                             |                    |                    | 10.570.748.000              |             |            |       |            |  |
|               |   |  |                          |   |  | 1.458.748.000                                      | 931.616.000        | 1.529.878.034               | 845.020.694        |                    | 1.458.748.000               |             |            |       |            |  |
| <b>5</b>      | <b>2</b>  | <b>1</b>   | <b>2,06</b>              | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b> |  |  | <b>293.948.000</b> | <b>174.000.000</b>          | <b>248.623.052</b> | <b>104.908.351</b> | <b>293.948.000</b>          |             |            |       |            |  |
|               |   | Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan              |                          |   |  |  |                    | 3.225.000                   |                    |                    |                             |             |            |       |            |  |
| 5             | 2   | 1  | 2,06                     | 1   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen listrik bangunan kantor       | Kab Tmg            | 12                          |                    | 25.000.000         | 10.000.000                  | 13.000.000  | 2.437.500  | 18,75 | 25.000.000 |  |
| 5             | 2   | 1  | 2,06                     | 4   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Tersedianya alat tulis kantor dan bahan kebersihan | Kab Tmg            | 12                          | Bulan              | 75.000.000         | 44.000.000                  | 45.442.500  | 23.976.000 | 52,76 | 75.000.000 |  |

| KODE REKENING |          |          |             |   | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan                 | Indikator Program/Kegiatan  | Rencana Kerja Tahun 2022 |                |        |                | Alokasi 2021       | Kinerja Anggaran Tahun 2020 |                    |                    | Prakiraan Maju Rencana 2023 | Sumber Dana        |  |
|---------------|----------|----------|-------------|---|---|---|--------------------------|----------------|--------|----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|
|               |          |          |             |   |   |   | Lokasi                   | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif |                    | Alokasi                     | Realisasi          | %                  |                             |                    |  |
| 1             |          |          |             |   | 2   | 3   | 4                        | 5              | 6      | 7              | 8                  | 9                           | 10                 | 11                 | 12                          | 13                 |  |
| 5             | 2        | 1        | 2,06        | 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | Tersedianya barang cetakan dan fotocopy   | Kab Tmg                  | 12             | Bulan  | 15.000.000     | 10.000.000         | 39.999.800                  | 16.095.750         | 40,24              | 15.000.000                  |                    |  |
| 5             | 2        | 1        | 2,06        | 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Meningkatnya pengetahuan pegawai dengan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan  | Kab Tmg                  | 12             |        | 3.000.000      | 0                  | 2.520.000                   | 1.602.000          | 63,57              | 3.000.000                   |                    |  |
| 5             | 2        | 1        | 2,06        | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Tesedianya makan minum rapat, tamu dan harian pegawai   | Kab Tmg                  | 12             | Bulan  | 80.948.000     | 50.000.000         | 64.460.752                  | 37.350.950         | 57,94              | 80.948.000                  |                    |  |
| 5             | 2        | 1        | 2,06        | 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah  | Kab Tmg                  | 12             |        | 95.000.000     | 60.000.000         | 79.975.000                  | 23.446.151         | 29,32              | 95.000.000                  |                    |  |
| <b>5</b>      | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2,07</b> |   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |   |                          |                |        |                | <b>175.000.000</b> | <b>0</b>                    | <b>262.656.430</b> | <b>188.623.999</b> |                             | <b>175.000.000</b> |  |
| 5             | 2        | 1        | 2,07        | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Tersedianya peralatan gedung kantor (blj modal komputer & printer) honor pengadaan, acces point dan mikrotik dan komputer (sekretariat)Pembelian Komputer dan Laptop /sekretariat | Kab Tmg                  | 12             | bulan  | 90.000.000     | 0                  | 191.010.000                 | 142.350.000        | 74,52              | 90.000.000                  |                    |  |

| KODE REKENING     | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan  | Indikator Program/Kegiatan   | Rencana Kerja Tahun 2022 |                |        |                    | Alokasi 2021       | Kinerja Anggaran Tahun 2020 |                    |       | Prakiraan Maju Rencana 2023 | Sumber Dana |
|-------------------|--|--|--------------------------|----------------|--------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------|-----------------------------|-------------|
|                   |  |  | Lokasi                   | Target Kinerja | Satuan | Pagu Indikatif     |                    | Alokasi                     | Realisasi          | %     |                             |             |
| 1                 | 2  | 3  | 4                        | 5              | 6      | 7                  | 8                  | 9                           | 10                 | 11    | 12                          | 13          |
| 5.2.1.2.07.01     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Tersedianya perlengkapan gedung kantor (pembelian blj modal meja rapat, rak arsip, | Kab Tmg                  | 12             | Bulan  | 85.000.000         | 0                  | 71.646.430                  | 46.273.999         | 64,59 | 85.000.000                  |             |
| <b>5.2.1.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |                          |                | Bulan  | <b>719.800.000</b> | <b>617.616.000</b> | <b>597.142.152</b>          | <b>409.202.683</b> |       | <b>719.800.000</b>          |             |
| 5.2.1.2.08.01     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah  | Kab Tmg                  | 12             | Bulan  | 5.000.000          | 3.000.000          | 1.500.000                   | 585.000            | 39,00 | 5.000.000                   |             |
| 5.2.1.2.08.02     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air listrik                               | Kab Tmg                  | 12             | Bulan  | 250.000.000        | 210.000.000        | 209.671.152                 | 145.312.263        | 69,30 | 250.000.000                 |             |
| 5.2.1.2.08.04     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | tersedianya honor satpam, tenaga kebersihan dan SS, lembur                         | Kab Tmg                  | 24             | orang  | 464.800.000        | 404.616.000        | 373.471.000                 | 263.305.420        | 70,50 | 464.800.000                 |             |
|                   |  | seragam dinas karyawan   | Kab Tmg                  | 74             | orang  |                    |                    | 12.500.000                  |                    | -     |                             |             |
| <b>5.2.1.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     |  |                          |                |        | <b>270.000.000</b> | <b>140.000.000</b> | <b>421.456.400</b>          | <b>142.285.661</b> |       | <b>270.000.000</b>          |             |
| 5.2.1.2.09.02     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya service, pembelian suku cadang, BBM dan pembayaran STNK             | Kab Tmg                  | 12             | Bulan  | 100.000.000        | 80.000.000         | 163.620.000                 | 83.639.161         | 51,12 | 100.000.000                 |             |

| KODE REKENING      | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan                                      | Indikator Program/Kegiatan   | Rencana Kerja Tahun 2022 |                |         |                      | Alokasi 2021         | Kinerja Anggaran Tahun 2020 |                      |       | Prakiraan Maju Rencana 2023 | Sumber Dana |
|--------------------|--|--|--------------------------|----------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------|-----------------------------|-------------|
|                    |  |  | Lokasi                   | Target Kinerja | Satuan  | Pagu Indikatif       |                      | Alokasi                     | Realisasi            | %     |                             |             |
| 1                  | 2  | 3  | 4                        | 5              | 6       | 7                    | 8                    | 9                           | 10                   | 11    | 12                          | 13          |
| 5.2.1.2.09.9       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Terpeliharanya gedung kantor   | Kab Tmg                  | 12             | Bulan   | 75.000.000           | 20.000.000           | 134.836.400                 | 25.354.500           | 18,80 | 75.000.000                  |             |
| 5.2.1.2.09.10      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | terpeliharanya servise dan penggantian suku cadang komputer dan AC                       | Kab Tmg                  | 12             | Bulan   | 45.000.000           | 20.000.000           | 73.000.000                  | 23.222.000           | 31,81 | 45.000.000                  |             |
| 5.2.1.2.09.11      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terpeliharanya service lift dan genset   | Kab Tmg                  | 12             |         | 50.000.000           | 20.000.000           | 50.000.000                  | 10.070.000           | 20,14 | 50.000.000                  |             |
| <b>5.2.2.</b>      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>   |  |                          |                |         | <b>4.202.000.000</b> | <b>3.731.000.000</b> | <b>3.101.531.200</b>        | <b>1.351.657.951</b> |       | <b>4.202.000.000</b>        |             |
| <b>5.2.2.2.01.</b> | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                     |  |                          |                |         | <b>1.750.000.000</b> | <b>1.750.000.000</b> | <b>1.113.297.400</b>        | <b>407.213.192</b>   |       | <b>1.750.000.000</b>        |             |
| 5.2.2.2.01.1       | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS   | Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS APBD TA 2023                                       | Kab Tmg                  | 4              | dokumen | 110.000.000          | 80.000.000           |                             |                      |       | 90.000.000                  |             |
| 5.2.2.2.01.2       | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                   | Terlaksananya penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2022                            | Kab Tmg                  | 4              | dokumen | 75.000.000           | 40.000.000           | 150.000.000                 | 82.130.750           | 54,75 | 40.000.000                  |             |
| 5.2.2.2.01.3       | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD   | Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA SKPD APBD TA 2023 dan RKPA SKPD APBD TA 2022 | Kab Tmg                  | 8608           | dokumen | 30.000.000           | 40.000.000           |                             |                      |       | 40.000.000                  |             |

| KODE REKENING                | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan   | Indikator Program/Kegiatan  | Rencana Kerja Tahun 2022 |                |         |                | Alokasi 2021 | Kinerja Anggaran Tahun 2020 |           |      | Prakiraan Maju Rencana 2023 | Sumber Dana |
|------------------------------|---|---|--------------------------|----------------|---------|----------------|--------------|-----------------------------|-----------|------|-----------------------------|-------------|
|                              |   |   | Lokasi                   | Target Kinerja | Satuan  | Pagu Indikatif |              | Alokasi                     | Realisasi | %    |                             |             |
| 1                            | 2   | 3   | 4                        | 5              | 6       | 7              | 8            | 9                           | 10        | 11   | 12                          | 13          |
| 5<br>2<br>2<br>2,0<br>1<br>5 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD  | Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi DPA SKPD APBD TA 2023 dan DPPA SKPD APBD TA 2022  | Kab Tmg                  | 8608           | dokumen | 20.000.000     | 20.000.000   | 55.099.800                  | 1.575.000 | 2,86 | 30.000.000                  |             |
| 5<br>2<br>2<br>2,0<br>1<br>7 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Terlaksananya penyusunan Perda tentang APBD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan Perbup tentang penjabaran APBD Kabupaten Temanggung TA 2023                | Kab Tmg                  | 4              | dokumen | 265.000.000    | 195.000.000  |                             |           |      | 200.000.000                 |             |
| 5<br>2<br>2<br>2,0<br>1<br>8 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Terlaksananya penyusunan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA 2022 dan Perbup tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung TA | Kab Tmg                  | 4              | dokumen | 220.000.000    | 155.000.000  |                             |           |      | 150.000.000                 |             |

| KODE REKENING | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2022 |                |  |  | Alokasi 2021 | Kinerja Anggaran Tahun 2020 |           |               | Prakiraan Maju Rencana 2023 | Sumber Dana |             |       |               |  |
|---------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------|--|--|--------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|---------------|--|
|               |   |                            | Lokasi                   | Target Kinerja | Satuan   | Pagu Indikatif   |              | Alokasi                     | Realisasi | %             |                             |             |             |       |               |  |
| 1             | 2   | 3                          | 4                        | 5              | 6  | 7  | 8            | 9                           | 10        | 11            | 12                          | 13          |             |       |               |  |
|               |   | 2022                       |                          |                |  |  |              |                             |           |               |                             |             |             |       |               |  |
| 5             | 2   | 2                          | 2,01                     | 9              | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran terkait dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dan pemerintah provinsi | Kab Tmg      | 1                           | paket     | 1.000.000.000 | 1.200.000.000               |             |             |       | 1.150.000.000 |  |
| 5             | 2   | 2                          | 2,01                     | 11             | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                     | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota  | Kab Tmg      | 1                           | paket     | 30.000.000    | 20.000.000                  | 672.812.600 | 323.507.442 | 48,08 | 50.000.000    |  |





| KODE REKENING | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2022 |                |  |  | Alokasi 2021 | Kinerja Anggaran Tahun 2020 |            |                      | Prakiraan Maju Rencana 2023 | Sumber Dana          |                    |       |                      |  |
|---------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------|--|--|--------------|-----------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-------|----------------------|--|
|               |   |                            | Lokasi                   | Target Kinerja | Satuan   | Pagu Indikatif   |              | Alokasi                     | Realisasi  | %                    |                             |                      |                    |       |                      |  |
| 1             | 2   | 3                          | 4                        | 5              | 6  | 7  | 8            | 9                           | 10         | 11                   | 12                          | 13                   |                    |       |                      |  |
| 5             | 2   | 2                          | 2,02                     | 9              | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait | Kab Tmg      | 104                         | unit kerja | 60.000.000           | 20.000.000                  |                      |                    |       | 60.000.000           |  |
|               |   |                            |                          |                | Terlaksananya koordinasi pelayanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen dan Instansi Terkait lainnya    |  | Kab Tmg      | 12                          | kegiatan   |                      |                             |                      |                    |       |                      |  |
| <b>5</b>      | <b>2</b>  | <b>2</b>                   | <b>2,03</b>              |                | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>  |  |              |                             |            | <b>1.772.000.000</b> | <b>1.371.000.000</b>        | <b>1.764.293.500</b> | <b>828.047.200</b> |       | <b>1.772.000.000</b> |  |
| 5             | 2   | 2                          | 2,03                     | 3              | Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban      | Terlaksananya asistensi penyusunan laporan keuangan  | Kab Tmg      | 104                         | Unit Kerja | 52.000.000           | 45.000.000                  | 81.550.500           | 38.820.900         | 47,60 | 52.000.000           |  |
| 5             | 2   | 2                          | 2,03                     | 4              | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                     | Pelaporan Keuangan Perangkat daerah yang akuntabel   | Kab Tmg      | 104                         | Unit Kerja | 150.000.000          | 126.000.000                 | 1.682.743.000        | 789.226.300        | 46,90 | 150.000.000          |  |

| KODE REKENING | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan          | Rencana Kerja Tahun 2022 |                |   |  | Alokasi 2021         | Kinerja Anggaran Tahun 2020 |            |               | Prakiraan Maju Rencana 2023 | Sumber Dana |  |               |  |  |
|---------------|---|-------------------------------------|--------------------------|----------------|---|--|----------------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-------------|--|---------------|--|--|
|               |   |                                     | Lokasi                   | Target Kinerja | Satuan  | Pagu Indikatif   |                      | Alokasi                     | Realisasi  | %             |                             |             |  |               |  |  |
| 1             | 2   | 3                                   | 4                        | 5              | 6   | 7  | 8                    | 9                           | 10         | 11            | 12                          | 13          |  |               |  |  |
|               |   | Tersedianya laporan keuangan daerah | Kab Tmg                  | 1              | Dokumen   |  |                      |                             |            |               |                             |             |  |               |  |  |
| 5             | 2   | 2                                   | 2,03                     | 5              | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/kota | Kab Tmg              | 4                           | Dokumen    | 170.000.000   | 145.000.000                 |             |  | 170.000.000   |  |  |
| 5             | 2   | 2                                   | 2,03                     | 11             | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota   | Terlaksananya workshop, rakor skpd sosialisasi kebijakan akuntansi dan tersedianya honor untuk pengelola keuangan se Kab Temanggung        | kabupaten temanggung | 104                         | Unit Kerja | 1.400.000.000 | 1.055.000.000               |             |  | 1.400.000.000 |  |  |
| 5             | 2   | 2                                   | 2,04                     |                | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah   |  |                      |                             |            |               |                             |             |  |               |  |  |
| 5             | 2   | 2                                   | 2,04                     | 8              | Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan  | Terlaksananya pelaksanaan alokasi dan penyaluran bantuan   | Kabupaten Temanggung | 104                         | unit kerja |               | 140.000.000                 |             |  |               |  |  |

| KODE REKENING | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2022                       |                                 |                                   |   | Alokasi 2021         | Kinerja Anggaran Tahun 2020 |                    |             | Prakiraan Maju Rencana 2023 | Sumber Dana |            |             |       |
|---------------|---|----------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|-------|
|               |   |                            | Lokasi   | TARGET Kinerja                  | Satuan                            | Pagu Indikatif  |                      | Alokasi                     | Realisasi          | %           |                             |             |            |             |       |
| 1             | 2   | 3                          | 4  | 5                               | 6                                 | 7   | 8                    | 9                           | 10                 | 11          | 12                          | 13          |            |             |       |
|               |   | keuangan khusus            |  |                                 |                                   |   |                      |                             |                    |             |                             |             |            |             |       |
| <b>5</b>      | <b>2</b>  | <b>3</b>                   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b> |                                 |                                   | <b>3.220.000.000</b>  | <b>3.160.000.000</b> | <b>538.847.500</b>          | <b>118.767.786</b> |             | <b>3.220.000.000</b>        |             |            |             |       |
| 5             | 2   | 3                          | 2,01   | Pengelolaan Barang Milik Daerah |                                   |   |                      | 3.160.000.000               | 538.847.500        | 118.767.786 |                             |             |            |             |       |
| 5             | 2   | 3                          | 2,01   | 1                               | Penyusunan Standar Harga          | Tersusunnya standar harga   | Kab Tmg              | 168                         | SATUAN KERJA       | 70.000.000  | 50.000.000                  |             |            | 70.000.000  |       |
| 5             | 2   | 3                          | 2,01   | 5                               | Penatausahaan Barang Milik Daerah | pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIMBADA  | Kab Tmg              | 1                           | Aplikasi           | 875.000.000 | 835.000.000                 |             |            | 875.000.000 |       |
|               |   |                            |  |                                 |                                   | Terlaksananya analisa kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah dengan pemasangan plang tanda kepemilikan barang milik daerah | Kab Tmg              | 168                         | SATUAN KERJA       |             |                             | 209.145.200 | 91.858.272 |             | 43,92 |
|               |   |                            |  |                                 |                                   | Terselesainya laporan barang milik daerah tepat waktu   | Kab Tmg              | 168                         | SATUAN KERJA       |             |                             |             |            |             |       |
|               |   |                            |  |                                 |                                   | Tertibnya pengelolaan barang milik daerah   | Kab Tmg              | 168                         | SATUAN KERJA       |             |                             |             |            |             |       |

| KODE REKENING | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan   | Rencana Kerja Tahun 2022 |                |   |   | Alokasi 2021 | Kinerja Anggaran Tahun 2020 |                |               | Prakiraan Maju Rencana 2023 | Sumber Dana |            |       |               |  |
|---------------|---|--|--------------------------|----------------|---|---|--------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------|-------|---------------|--|
|               |   |  | Lokasi                   | Target Kinerja | Satuan  | Pagu Indikatif  |              | Alokasi                     | Realisasi      | %             |                             |             |            |       |               |  |
| 1             | 2   | 3  | 4                        | 5              | 6   | 7   | 8            | 9                           | 10             | 11            | 12                          | 13          |            |       |               |  |
|               |   | Terbayarnya honor pengurus barang Pengguna/ Pembantu pengurus barang Pengguna ( plus di sekolah) | Kab Tmg                  | 168            | SATUAN KERJA  |   |              |                             |                |               |                             |             |            |       |               |  |
| 5             | 2   | 3  | 2,01                     | 7              | Pengamanan Barang Milik Daerah  | Terwujudnya tanah Pemda yang bersertifikat  | Kab Tmg      | 1000                        | bidang         | 1.600.000.000 | 2.000.000.000               | 218.927.500 | 9.888.700  | 4,52  | 1.600.000.000 |  |
| 5             | 2   | 3  | 2,01                     | 0              | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah dan pemindahtanganan barang milik daerah dan tercapainya target PAD dari sewa tanah eks bengkok | Kab Tmg      | 296                         | tanah/Bangunan | 135.000.000   | 135.000.000                 | 110.774.800 | 17.020.814 | 15,37 | 135.000.000   |  |
|               |   |  |                          |                |   | Terlaksananya pemberdayaan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah  | Kab Tmg      | 168                         | SATUAN KERJA   |               |                             |             |            |       |               |  |

| KODE REKENING | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | Rencana Kerja Tahun 2022 |                 |  |   | Alokasi 2021                   | Kinerja Anggaran Tahun 2020 |                 |                      | Prakiraan Maju Rencana 2023 | Sumber Dana          |                    |       |                      |  |
|---------------|---|----------------------------|--------------------------|-----------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-------|----------------------|--|
|               |   |                            | Lokasi                   | Targe t Kinerja | Satuan                                       | Pagu Indikatif  |                                | Alokasi                     | Realisasi       | %                    |                             |                      |                    |       |                      |  |
| 1             | 2   | 3                          | 4                        | 5               | 6  | 7   | 8                              | 9                           | 10              | 11                   | 12                          | 13                   |                    |       |                      |  |
| 5             | 2   | 3                          | 2,0<br>1                 | 1               | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah       | Terlaksananya laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun                   | Kab Tmg                        | 168                         | Unit Kerja      | 540.000.000          | 140.000.000                 |                      |                    |       | 540.000.000          |  |
|               |   |                            |                          |                 |  | Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang                         | Kab Tmg                        | 168                         | Unit Kerja      |                      |                             |                      |                    |       |                      |  |
| <b>5</b>      | <b>2</b>  | <b>4</b>                   |                          |                 | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b> |   |                                |                             |                 | <b>1.690.000.000</b> | <b>933.373.200</b>          | <b>1.394.115.516</b> | <b>472.370.702</b> |       | <b>1.690.000.000</b> |  |
| 5             | 2   | 4                          | 2,0<br>1                 |                 | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah       |   |                                |                             |                 | 933.373.200          | 1.394.115.516               | 472.370.702          |                    |       |                      |  |
| 5             | 2   | 4                          | 2,0<br>1                 | 5               | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | pemutakhiran data jml obyek pajak pbb-p2                                | kec parakan                    | 2900<br>0                   | SKPD dan SKPKD  |                      |                             |                      |                    |       |                      |  |
|               |   |                            |                          |                 |  | terverif perub data tepat waktu   | Kab Tmg                        | 1000<br>0                   | sppt            |                      |                             |                      |                    |       |                      |  |
|               |   |                            |                          |                 |  | peningkatan data jumlah obyek pajak PBB-P2                              | Kab Tmg                        | 2800<br>00                  | OP              |                      |                             |                      |                    |       |                      |  |
|               |   |                            |                          |                 |  | Peta digitasi obyek pajak blok  | Kab Tmg                        | 1000<br>0                   | op              | 620.000.000          | 500.000.000                 | 298.682.400          | 162.179.289        | 54,30 | 1.100.000.000        |  |
|               |   |                            |                          |                 |  | terlaksanya pendataan wajib/ obyek pajak daerah                         | Kab Tmg                        | 7000                        | op              |                      |                             |                      |                    |       |                      |  |
|               |   |                            |                          |                 |  | Belanja Hadiah untuk desa ter cepat pelunasan sebelum jatuh tempo (DID) | desa m/ kel se kec. Temanggung | 24                          | desa/ kelurahan |                      |                             |                      |                    |       |                      |  |

| KODE REKENING | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan   | Rencana Kerja Tahun 2022 |                |   |                | Alokasi 2021 | Kinerja Anggaran Tahun 2020 |             |    | Prakiraan Maju Rencana 2023 | Sumber Dana |
|---------------|---|--|--------------------------|----------------|---|----------------|--------------|-----------------------------|-------------|----|-----------------------------|-------------|
|               |   |  | Lokasi                   | Target Kinerja | Satuan  | Pagu Indikatif |              | Alokasi                     | Realisasi   | %  |                             |             |
| 1             | 2   | 3  | 4                        | 5              | 6   | 7              | 8            | 9                           | 10          | 11 | 12                          | 13          |
|               |   | Terlaksananya pendataan/ penilaian individual subyek/ obyek khusus PBB                 | Kab Tmg                  | 5              | Op  |                |              |                             |             |    |                             |             |
| 5             | 2   | 4  | 2,01                     | 6              | Pengolahan , pemeliharann dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 480.000.000    | 367.373.200  |                             |             |    | 420.000.000                 |             |
|               |   | Terbangunnya sistem informasi manajemen pajak bumi dan bangunan (SIM-PBB)              | Kab Tmg                  | 1              | SIM PBB   |                |              |                             |             |    |                             |             |
|               |   | Tercetaknya SPPT DHKP  | Kab Tmg                  | 289            | DHKP  |                |              | 1.040.801.216               | 271.700.568 |    |                             |             |
|               |   | Tercetaknya SPPT PBB   | Kab Tmg                  | 585000         | SPPT  |                |              |                             |             |    |                             |             |
|               |   | Tercetaknya surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar | Kab Tmg                  | 188            | SKPD dan SKPKD  |                |              |                             |             |    |                             |             |
|               |   | Terciptanya tertib administrasi pengelolaan PBB-P2 & pajak daerah                      | Kab Tmg                  | 7              | Pajak Daerah  |                |              |                             |             |    |                             |             |
|               |   | Termutakhirnya data obyek dan subyek pajak   | Kab Tmg                  | 110000         | Objek Pajak   |                |              |                             |             |    |                             |             |

| KODE REKENING | Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan                 | Rencana Kerja Tahun 2022 |                |   |  | Alokasi 2021 | Kinerja Anggaran Tahun 2020 |           |             | Prakiraan Maju Rencana 2023 | Sumber Dana |            |       |            |  |
|---------------|---|--|--------------------------|----------------|---|--|--------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-------------|------------|-------|------------|--|
|               |   |  | Lokasi                   | Target Kinerja | Satuan  | Pagu Indikatif                                     |              | Alokasi                     | Realisasi | %           |                             |             |            |       |            |  |
| 1             | 2   | 3  | 4                        | 5              | 6   | 7  | 8            | 9                           | 10        | 11          | 12                          | 13          |            |       |            |  |
|               |   | daerah                                     |                          |                |   |  |              |                             |           |             |                             |             |            |       |            |  |
|               |   | Tersedianya blanko SPPT untuk cetak massal | Kab Tmg                  | 125            | Box   |  |              |                             |           |             |                             |             |            |       |            |  |
|               | 7   | sarana prasarana pelayanan kantor          | Kab Tmg                  | 12             | bulan   |  |              |                             |           |             | 60.000.000                  |             |            |       |            |  |
| 5             | 2   | 4  | 2,01                     | 8              | Penagihan Pajak Daerah                                | Terlaksananya penagihan pajak daerah               | Kab Tmg      | 12                          | Bulan     | 525.000.000 | 25.000.000                  | 13.604.400  | 11.328.400 | 83,27 | 45.000.000 |  |
| 5             | 2   | 4  | 2,01                     | 9              | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi PAD | Kab Tmg      | 12                          | Bulan     | 65.000.000  | 41.000.000                  | 41.027.500  | 27.162.445 | 66,21 | 65.000.000 |  |

Temanggung , September 2021

KEPALA BPKPAD  
KABUPATEN TEMANGGUNG

TRI WINARNO, SE, MM  
Pembina Tk. I  
NIP 197310201999031000

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2022 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2022 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 57,81 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 82,11 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan semester I 34,97 % dengan realisasi belanja

Rp. 685.063.012.795 dari total anggaran sebesar Rp. 1.958.793.940.978

Dalam Renja Tahun Anggaran 2022 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar **Rp. 21.414.697.000 (dua puluh satu milyar empat ratus empat belas juta enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)** yang terdiri dari 4 (empat) program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Pengelolaan Keuangan daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.1

## Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKPAD Tahun 2022

|    | No  | KEGIATAN  | SUBKEGIATAN   |
|----|---|---|---|
| I  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |   |   |
|    | 1   | administrasi keuangan daerah                            | Penyediaan gaji dan tunjang ASN   |
|    | 2   | Adminstrasi umum Perangkat Daerah                       | Penyediaan instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor  |
|    |   |   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |
|    |   |   | Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan   |
|    |   |   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |
|    |   |   | Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD   |
|    | 3   | Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemda                  | Penyediaan Jasa surat menyurat  |
|    |   |   | Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA dan listrik  |
|    |   |   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor   |
|    | 4   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan dinas operasional lapangan  |
|    |   |   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |
|    |   |   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                |
|    |   |   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          |
| II | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                       |   |   |
|    | 1   | Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah       | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS  |
|    |   |   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  |
|    |   |   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD  |
|    |   |   | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD  |
|    |   |   | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD |

| No         | KEGIATAN   | SUBKEGIATAN  |
|------------|--|--|
|            |  | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD  |
|            |  | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran   |
|            |  | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan   |
| 2          | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                   | Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah  |
|            |  | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD  |
|            |  | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait   |
| 3          | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban  |
|            |  | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   |
|            |  | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran |
|            |  | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota  |
| 4          | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah            | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan   |
|            |  | Pengelolaan Dana darurat dan mendesak  |
|            |  | Pengelolaan Dana Bagi hasil Kab/ kota  |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                     |  |
| 5          | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                    | Penyusunan Standar Harga   |
|            |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah  |
|            |  | Pengamanan Barang Milik Daerah   |
|            |  | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah   |
|            |  | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah   |
| <b>IV</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                       |  |
| 7          | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                             | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   |
|            |  | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah  |
| 8          |  | Penagihan Pajak Daerah   |
|            |  | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  |

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat tercapai sesuai dengan

pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, September 2021

KEPALA BPKPAD  
KABUPATEN DEMANGGUNG



TRIWINARNO SE, MM ↓  
Pembina Tk. I

NIP 197310201999031000